

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial
Volume 15 No 4 Desember 2016
ISSN 1412 - 6451

Daftar Isi

Editorial

1. Proses Pemulihan Pascabencana Berdasarkan Model Permukiman Sosial 307 - 316
Post-Disaster Recovery Process Based on Social Resettlement Model
Oman Sukmana
2. Sinergi Peran Elemen Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Keluarga 317 - 328
melalui *Family Care Unit*
Sinergy The Role of Social Welfare Institution Holders through Family Care Unit (FCU)
Pranowo dan A. Nururrochman Hidayatullah
3. Tindakan Warga Merapi Pascaerupsi Menjaga Daerah Tangkapan Air 329 - 336
Post-disaster Act of Merapi Community to Keep Water Catchment Area
Napsiah
4. Sikap Keluarga terhadap Ibu atau Istri sebagai Wanita Karir 337 - 348
Family Attitude toward Their Mother or Wife as Career Women
Ikawati
5. Pemberdayaan dan Pengembangan Potensi Lansia menghadapi Masa Pensiun 349 - 356
Empowerment and Development of Elderly Potential Facing Retirement Period
Tomy Hendrawanto
6. Komunitas Miskin dengan Usia Harapan Hidup Panjang 357 - 364
Poor Community with Long Life Expectancy
Gunanto Surjono
7. Korban Kekerasan Seksual Sedarah terhadap Anak 365 - 376
Victim of Sameblood Sexual Violence toward Children
Soetji Andari
8. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan dengan Teori *Self Esteem* 377 - 386
Improving Street Children Welfare with Self Esteem Theory
Pipin Armita

Editorial

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial, Volume 15, Nomor 4, menutup edisi Desember tahun 2016 dengan artikel berjudul Proses Pemulihan Pascabencana Berdasarkan Model Permukiman Sosial, ditulis oleh Oman Sukmana, disusul topik lain yang ditulis oleh Pranowo dan A. Nururrochman Hidayatullah tentang Sinergi Peran Elemen Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Keluarga melalui *Family Care Unit*. Tindakan Warga Merapi Pascaerupsi dalam menjaga Daerah Tangkapan Air, dikemukakan oleh Napsiah, diikuti oleh Sikap Keluarga terhadap Ibu atau Istri sebagai Wanita Karir yang dibahas oleh Ikawati. Sebuah aspek permasalahan sosial lain, Tomy Hendrawanto membahas tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Potensi Lansia menghadapi Masa Pensiun, menyusul Gunanto Surjono dengan topik bahasan Komunitas Miskin dengan Usia Harapan Hidup Panjang. Soetji Andari mengemukakan topik tentang Korban Kekerasan Seksual Sedarah terhadap Anak, kemudian ditutup dengan bahasan tentang Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan dengan Teori *Self Esteem*, oleh Pipin Armita.

Dari Redaksi

Kata Kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh digandakan tanpa ijin dan biaya.
Keywords are based from articles. Abstract may be reproduced without permission and cost.

Oman Sukmana (Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang)

Proses Pemulihan Pascabencana Berdasarkan Model Permukiman Sosial

Post-Disaster Recovery Process Based on Social Resettlement Model

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 15 No 4 Desember 2016, hal 307 - 316

Lapindo mudflow disaster in Sidoarjo has caused a tremendous impact for the community, especially in the region of Porong and surrounding areas, not just the impact in the form of the destruction of the physical-ecological environment but also the social environment. In disaster management, disaster management conducted through four phases, namely: mitigation preparedness, emergency response, and recovery. The recovery phase includes rehabilitation and social reconstruction. This study aims to examine how efforts performed in the recovery phase post Sidoarjo mud disaster based on the model of social resettlement. It found that the Sidoarjo mudflow disaster recovery phase included social rehabilitation process consisting three programs, namely social assistance, protection and recovery. Social reconstruction effort post-disaster resettlement consisting three social models, namely model of full social resettlement, mix-social resettlement, and free social resettlement. The model of full social resettlement was the best model and fit reconstruction and social rehabilitation of post-disaster.

Keywords: recovery; social resettlement; disaster management.

Bencana semburan Lumpur Lapindo di Sidoarjo menimbulkan dampak luar biasa bagi masyarakat, khususnya di wilayah Kecamatan Porong dan sekitarnya, bukan saja dampak berupa hancurnya lingkungan fisik-ekologis melainkan juga lingkungan sosial. Dalam manajemen bencana, respons dilakukan melalui empat fase, yakni: mitigasi; kesiapsiagaan; tanggap darurat; dan fase pemulihan. Dalam fase pemulihan, di dalamnya meliputi upaya rehabilitasi sosial dan rekonstruksi sosial. Kajian ini bertujuan untuk mengungkap upaya yang dilakukan dalam fase pemulihan pascabencana Lumpur Sidoarjo berbasis model *social resettlement*. Kajian menggunakan paradigma interpretif, pendekatan kualitatif studi kasus. Hasil kajian dapat dideskripsikan bahwa dalam fase pemulihan pascabencana Lumpur Lapindo, Sidoarjo meliputi rehabilitasi sosial, terdiri atas tiga program, yakni bantuan, perlindungan, dan pemulihan Sosial. Rekonstruksi sosial pascabencana dilakukan melalui *resettlement* yang terdiri atas tiga model, yakni permukiman sosial penuh, campuran, dan bebas. Permukiman sosial penuh merupakan model yang paling baik dan cocok dalam rekonstruksi dan rehabilitasi sosial pascabencana.

Kata kunci: pemulihan bencana; social resettlement; manajemen bencana.

Pranowo¹ dan A. Nururrochman Hidayatullah² (¹B2P3KS, ²Badan Pendidikan Penelitian dan Penyuluhan Sosial, Kementerian Sosial)

Sinergi Peran Elemen Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Keluarga melalui Family Care Unit

Sinergy The Role of Social Welfare Institution Holders through Family Care Unit (FCU)

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 15 No 4 Desember 2016, hal 317 - 328

This research is to reconstruct synergy the role of social welfare institution holders through family ce unit (FCU), in Citangkil Subdistrict, Citangkil District, Cilegon Municipality, based on consideration that in that location the experiment on FCU was held with the role of social institutions. This research is qualitative-descriptive, describing the implementation and joint-work among the institutions holding FCU program and the commitment of those institutions to materialise plasma family to pioneer family. Data were gathered through interview, either structured and non-structured, observation, and docomentary analysis. Data were analysed through SWOPA technic (sthrengthness, weakness, opportunities, problem and action). The research found that the role of social welfare institutions in FCU program in Citangkil Subdistrict still limited on identification and selection activities of pioneer families. The advocation was yet supported by administrative management, facility, and financial. Coordination and unity among institutions should have been optimized, bacoused its human resources in the management should have more dedication to materialise plasma family to be pioneer family.

Keywords: *institutional sinergy; social welfare; FCU*

Penelitian ini merekonstruksikan sinergi peran lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial keluarga melalui program *family care unit* (FCU), di Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon didasari pertimbangan di lokasi tersebut telah dilakukan ujicoba FCU melalui peran lembaga sosial. Jenis penelitian ini deskriptif kualitatif, mendeskripsikan pelaksanaan dan kerjasama antarlembaga dalam menyelenggarakan program FCU dan keterlibatan kelembagaan dalam mewujudkan kemandirian keluarga plasma menjadi keluarga pionir. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, baik terstruktur maupun tidak, observasi dan telaah dokumen. Analisis data menggunakan teknik SWOPA (*sthrengthness, weakness, opportunities, problem and action*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran lembaga penyelenggara FCU di Kelurahan Citangkil masih sebatas pada aktivitas identifikasi dan seleksi keluarga pionir, advokasi sosial kurang didukung oleh pengelolaan administrasi, fasilitasi dan finansial. Koordinasi dan keterpaduan program FCU melalui pelibatan lembaga sosial seharusnya masih dapat dioptimalkan lebih baik, karena dari sisi SDM pengelolaan FCU yang dilakukan pengurus seharusnya memiliki dedikasi menjadikan keluarga plasma menuju keluarga pionir yang sejahtera dan mandiri.

Kata Kunci: *sinergi kelembagaan; kesejahteraan sosial; FCU*

Napsiah (Fakultas Ilmu Sosial dan Humanioran, Program Studi Sosiologi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Tindakan Warga Merapi Pascaerupsi Menjaga Daerah Tangkapan Air

Post-disaster Act of Merapi Community to Keep Water Catchment Area

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 15 No 4 Desember 2016, hal 329 - 336

The spring coming from Mount Merapi is the main source of life for local residents, protecting the environment of Merapi is the main actions performed by the residents who live in the area. This study aims to know what Merapi community action to protect the environment. Data were collected by interviewing selected informants using the purposed sampling method who involved and knew the research topic and issues. There were three groups of informants who have subsequently interviewed by snowball sampling method. Non-participant observation was also conducted to triangulate data obtained from interview. The secondary data (through documentary analysis) was used to strengthen the primary data (interview and observation). The results showed that the action based on local value dialogue and mutual agreement in fact couldn't stop excessive sand mining and exploitation on the slope of Merapi Mountain, it damaged water catchment area. The collective social action called "Bela Lereng Merapi" then done to stop the excessive mining, they overcame successfully.

Keywords: action; collective, citizen, environment.

Air yang berasal dari Gunung Merapi merupakan sumber penghidupan bagi warga yang bermukim di sekitarnya, menjaga lingkungan tangkapan air Gunung Merapi merupakan tindakan utama. Penelitian ini bertujuan mengetahui tindakan apa yang dilakukan oleh warga Merapi untuk menjaga lingkungan tangkapan air. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, informan dipilih secara *purposed sampling method* yang dianggap mengetahui, terlibat, dan menguasai informasi yang berkaitan dengan topik dan masalah penelitian. Dari tiga kelompok informan yang dipilih, selanjutnya diwawancarai secara *snowball*. Teknik observasi non partisipan juga dilakukan untuk melakukan triangulasi data dari wawancara. Data sekunder (dari telaah dokumen) digunakan untuk memperkuat data yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan nilai (musyawarah) yang dilakukan warga Merapi tidak dapat menghentikan aktivitas penambangan pasir secara berlebihan, sehingga merusak lingkungan tangkapan air. Namun tindakan kolektif yang "Bela Lereng Merapi" menjadi aksi sosial warga Merapi yang mampu menghentikan kerusakan lingkungan.

Kata kunci: tindakan; kolektif; warga; lingkungan.

Ikawati (B2P3KS)

Sikap Keluarga terhadap Ibu atau Istri sebagai Wanita Karir

Family Attitude toward Their Mother or Wife as Career Women

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 15 No 4 Desember 2016, hal 337 - 348

The research is to reveal family attitude toward their mother or wife as career women for their family welfare. Research location determined purposively in Yogyakarta Special Territory. Subjects researched determined

Penelitian ini bertujuan mengetahui sikap keluarga terhadap ibu atau istri sebagai wanita karir untuk kesejahteraan keluarganya. Lokasi penelitian ditentukan secara *purposive* di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penentuan

purposively, 30 respondents. Research object was family attitude toward their mother or wife as career women. Data were gathered through questionnaires distribution that were answered by respondents, data analysis through product moment technique. The result showed that $r=0,381$ with $p=0,036$ ($p<0,05$), so it can be concluded that there was positive and significant correlation (with the degree of significancy 5 percent) between family attitude and mother or wife as career women. That means the higher family attitude score toward mother or wife as career women the higher career establishment for family welfare. Determining coefficient 0,145 can be explained, that family attitude toward mother or wife as career women, 14,5 percent, while the rest of 85,5 percent caused by another variabel was not included in this research. It recommended to the Ministry of social Affairs, through the Directorate of Family empowerment, on its policy to enhance family welfare can be done through educating career women.

Keywords: *family attitude; career women; family welfare*

subyek yang diteliti secara *purposive*, 30 responden. Objek penelitian adalah sikap keluarga terhadap ibu atau istri sebagai wanita karir. Teknik pengumpulan data distribusi kuesioner yang dijawab responden, analisis data digunakan teknik *product moment*. Hasil penelitian menunjukkan $r = 0,381$ dengan $p = 0,036$ ($p < 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa ada korelasi positif yang signifikan (taraf signifikan 5 persen) antara sikap keluarga terhadap ibu atau istri sebagai wanita karir. Artinya, semakin tinggi skor sikap keluarga terhadap ibu atau istri sebagai wanita karir, semakin tinggi skor kemampuan karir untuk kesejahteraan keluarga. Koefisien determinasi sebesar 0,145 dapat dijelaskan, bahwa variabel sikap keluarga terhadap ibu atau istri sebagai wanita karir sebesar 14,5 persen, sedangkan 85,5 persen disebabkan oleh variabel lain yang tidak dilibatkan dalam penelitian ini. Direkomendasikan kepada Kementerian Sosial, khususnya Direktorat Pemberdayaan Keluarga, dalam mengembangkan kebijakan peningkatan kesejahteraan keluarga dapat dilakukan melalui pembinaan wanita karir.

Kata kunci: *sikap keluarga; wanita karir; kesejahteraan keluarga*

Tomy Hendrawanto (Yayasan Silaturrahim Pecinta Anak (SPA) Indonesia)
Pemberdayaan dan Pengembangan Potensi Lansia menghadapi Masa Pensiun
Empowerment and Development of Elderly Potential Facing Retirement Period
Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 15 No 4 Desember 2016, hal 349 - 356

There are many things that must be prepared for the elderly when facing retirement, so that they can live healthy, active and independent. This paper aims to explore and describe the empowerment and development of elderly potential, they should be able to determine the career options after entering retirement. The article uses a qualitative approach writing, data are analysed through descriptive technique. This paper is based on the discovery of a problematic condition associated with the elderly and retired, the empowerment and development of elderly potential facing retirement. The purpose of

Ada banyak hal yang harus dipersiapkan bagi lansia ketika menghadapi masa pensiun, agar para lansia dapat hidup sehat, aktif dan mandiri. Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan mendeskripsikan pemberdayaan dan pengembangan potensi lansia. Lansia harus dapat menentukan pilihan karir yang akan digeluti setelah memasuki masa pensiun. Penulisan artikel ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif. Fokus dalam kajian ini berdasarkan pada ditemukannya suatu kondisi problematik terkait dengan lansia dan pensiun, pemberdayaan

this study was to identify the factors that cause variety of problems that arise in order to provide practical solutions. The result is that there are three things for the elderly to the empowerment and development their potential career. First, to continue his career in accordance with the career of origin, same institution and place or in different place but same plane. Second, continue his career outside the home career path with self-employed and services. Third, enjoying retirement by increasing the worship, close to the family, do their hobby and socializing. It can be concluded that the empowerment and development potential of the elderly is an effort to learn about and appreciate the process of life long career when facing retirement.

Keywords: empowerment; development; elderly; retirement

Abstrak

dan pengembangan potensi lansia ketika menghadapi masa pensiun. Tujuan kajian ini untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan berbagai permasalahan yang muncul untuk kemudian memberikan solusi praktis terkait permasalahan tersebut. Hasil kajian adalah ada tiga hal yang dapat direncanakan bagi lansia untuk pemberdayaan dan pengembangan potensi dalam karir. Pertama, melanjutkan karir sesuai dengan karir asal, yakni di lembaga yang sama serta di tempat yang sama atau di tempat yang berbeda pada bidang yang sama. Kedua, melanjutkan karir di luar jalur karir asal dengan bentuk wiraswasta dan jasa. Ketiga, menikmati masa pensiun dengan meningkatkan ibadah, dekat dengan keluarga, menjalankan kegemaran dan bersosialisasi. Kesimpulan, bahwa pemberdayaan dan pengembangan potensi lansia merupakan usaha untuk mempelajari dan menghargai proses panjang kehidupan karir lansia ketika menghadapi masa pensiun.

Kata kunci: pemberdayaan; pengembangan; lansia; masa pensiun

Gunanto Surjono (B2P3KS)

Komunitas Miskin dengan Usia Harapan Hidup Panjang

Poor Community with Long Life Expectancy

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 15 No 4 Desember 2016, hal 357 - 364

Living on a remote island usually associated in general with poverty, far from food adequacy, limited health service, low life resources diversification, and poor mobile facility to go out of their island. But people from Giliyang Island, Sumenep Regency, Madura, East Java Province, show themselves different from general association. They, who have been living through generations and relatively poor, have high life expectancy, far longer from national life expectancy level. Through interview with several public and non-formal figures, field observation, and documentary analysis, found that elderly people looked more dominant in number than other age groups, yet they lived in fresh and healthy condition. More insight on the island

Hidup di pulau terpencil dengan fasilitas terbatas secara umum mengasosiasikan pada masyarakatnya yang miskin, jauh dari ketercukupan makan, minimnya layanan kesehatan, rendahnya diversifikasi sumber penghidupan, dan terbatasnya sarana mobilitas untuk lepas dari keterpencilannya. Namun masyarakat Pulau Giliyang, Kabupaten Sumenep, Madura, Provinsi Jawa Timur, membuktikan lain. Mereka yang sudah hidup secara turun temurun dan relatif miskin tersebut memiliki usia harapan hidup tinggi, jauh melebihi usia harapan hidup rata-rata nasional. Melalui pendekatan wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat setempat (formal dan informal), observasi lapangan, dan telaah dokumen, ditemukan jumlah

and its people revealed that oxygen deposit and its explosion on the island were very high (highest in the world), bringing the air clean and fresh, inhaled everyday and for a long time by the locals inhabiting the island, made the people avoid from disease caused be polluted air, looking fresh, healthy, and long life.

Keywords: poverty; oxygen; long life expectancy

penduduk usia lanjut sangat dominan, bahkan mereka hidup dalam kondisi tubuh bugar, tidak terkesan penyakit. Hasil penelusuran lebih jauh tentang pulau dan masyarakat menemukan, bahwa kandungan oksigen yang tinggi dan kadar pancarannya yang tinggi ternyata membuat kondisi udara bersih dan segar, yang dihirup setiap hari oleh penduduk yang tinggal di pulau tersebut, sehingga terhindar dari gangguan penyakit akibat udara polutif, yang membawa konsekuensi pada tubuh bugar, sehat, dan umur panjang.

Kata kunci: kemiskinan; oksigen; harapan hidup tinggi

Soetji Andari (B2P3KS)

Korban Kekerasan Seksual Sedarah terhadap Anak

Victim of Sameblood Sexual Violence toward Children

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 15 No 4 Desember 2016, hal 365 - 376

Incest is one type of sexual disorders, the sameblood relationship for example brother and sister, father and daughter, mother and son, or uncle and nephew. Socially, sexual intercourses happen due to the rooms in the house that did not allow parents, children, or brothers and sisters living separately as socially functioning. The research was done through qualitative-descriptive method to determine people's knowledge about sexual violence. It found that victims and perpetrators relations in Batam can be concluded that the forms of violences moslyt related to sexual violence. The act of sexual abusse manifested in sexual harassment, rape, and exploitation. Perpetrators are related by the biologically same blood, as father or stepfather, uncle, and grandfather. The violences mostly took place in the most privat space, homes mostly in the slums, and isolated areas.

Key word: victim violence; incest; woman and children

Hubungan sedarah merupakan salah satu jenis kelainan seksual, yaitu melakukan hubungan suami istri dengan saudara sedarahnya, misalnya ayah dan anak, ibu dan anak, ataupun paman dan keponakan. Secara sosial, hubungan hubungan seksual sedarah dapat disebabkan antara lain: ruangan dalam rumah yang tidak memungkinkan orangtua, anak, atau sesama saudara terpisah, sesuai peruntukan rumah. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif untuk mengetahui pengetahuan masyarakat tentang kekerasan seksual sedarah. Hasil penelitian disimpulkan bahwa bentuk kekerasan yang terjadi pada hubungan sedarah hampir seluruhnya berkaitan dengan kekerasan seksual. Tindakan penganiayaan seksual berupa pelecehan seksual, perkosaan, dan eksploitasi. Pelakunya bisa ayah kandung maupun ayah tiri, paman, dan kakek kandung. Lokasi kejadian hubungan seksual sedarah paling banyak adalah di ruang domestik, rumah tempat tinggal daerah kumuh, dan tempat tinggal yang terisolir.

Kata kunci: korban; kekerasan seksual sedarah; perempuan dan anak

Pipin Armita (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan dengan Teori *Self Esteem*

Improving Street Children Welfare with Self Esteem Theory

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 15 No 4 Desember 2016, hal 377 - 386

This study was intended to provide a solution to community or social organizations how to improve social welfare of street children with the self esteem theory and to know what are the constraints faced by street children in improving social welfare. Acceptance and knowing the existing potential toward street children are the basic concept of enhancing street children social welfare, because street children are still able to develop themselves optimally. This article offers four aspects in providing solutions to improve social welfare of street children with self esteem theory: power, significance, virtue, and competence. The basic concept is to offer treatment, protection, and empowerment of street children that can give a better results. All they take then is the willingness of all parties, especially social worker, community, and social organizations to sit together, discuss to find the best solution for street children and then formulate an intervention program that targeted and simultaneously undertake a more coordinated division of work. The basic argument that can be worked out is the street children can develop themselves if a community or social institution introduced self esteem theory in them.

Keywords: social welfare, street children, self esteem

Tulisan ini dimaksudkan untuk memberikan solusi kepada komunitas atau lembaga sosial dalam meningkatkan kesejahteraan sosial anak jalanan dengan teori *self esteem* dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi anak jalanan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Sikap penerimaan terhadap diri anak jalanan dan mengetahui potensi yang dimiliki adalah dasar untuk meningkatkan kesejahteraan sosial anak jalanan, karena seseorang anak masih dapat berkembang secara optimal. Tulisan ini menawarkan empat aspek dalam memberi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial anak jalanan dengan teori *self esteem*: Kekuatan, Keberartian, Kebajikan, dan kemampuan. Konsep dasar yang ditawarkan adalah agar penanganan dan upaya perlindungan dan pemberdayaan pada anak jalanan dapat memberi hasil yang lebih baik, dibutuhkan kesediaan semua pihak, terutama pekerja sosial dan komunitas atau lembaga sosial untuk duduk bersama, berdiskusi mencari jalan keluar terbaik bagi anak jalanan dan merumuskan program intervensi yang tepat sasaran dan sekaligus melakukan pembagian kerja yang lebih terkoordinasi. Argumen dasar yang dikembangkan adalah anak dapat mengembangkan dirinya jika komunitas atau lembaga sosial mengenalkan *self esteem* yang ada pada diri anak jalanan.

Kata kunci: kesejahteraan sosial; anak jalanan; *self esteem*

Proses Pemulihan Pascabencana Berdasarkan Model Permukiman Sosial

Post-Disaster Recovery Process Based on Social Resettlement Model

Oman Sukmana

Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah Malang. Jl. Raya Tlogomas 246 Malang, Jawa Timur.
HP. 08123200709; email: osukmana@ymail.com.

Diterima 20 September 2016, diperbaiki 27 September 2016, disetujui 10 Oktober 2016.

Abstract

Lapindo mudflow disaster in Sidoarjo has caused a tremendous impact for the community, especially in the region of Porong and surrounding areas, not just the impact in the form of the destruction of the physical-ecological environment but also the social environment. In disaster management, disaster management conducted through four phases, namely: mitigation preparedness, emergency response, and recovery. The recovery phase includes rehabilitation and social reconstruction. This study aims to examine how efforts performed in the recovery phase post Sidoarjo mud disaster based on the model of social resettlement. It found that the Sidoarjo mudflow disaster recovery phase included social rehabilitation process consisting three programs, namely social assistance, protection and recovery. Social reconstruction effort post-disaster resettlement consisting three social models, namely model of full social resettlement, mix-social resettlement, and free social resettlement. The model of full social resettlement was the best model and fit reconstruction and social rehabilitation of post-disaster.

Keywords: *recovery; social resettlement; disaster management.*

Abstrak

Bencana semburan Lumpur Lapindo di Sidoarjo menimbulkan dampak luar biasa bagi masyarakat, khususnya di wilayah Kecamatan Porong dan sekitarnya, bukan saja dampak berupa hancurnya lingkungan fisik-ekologis melainkan juga lingkungan sosial. Dalam manajemen bencana, respons dilakukan melalui empat fase, yakni: mitigasi; kesiapsiagaan; tanggap darurat; dan fase pemulihan. Dalam fase pemulihan, di dalamnya meliputi upaya rehabilitasi sosial dan rekonstruksi sosial. Kajian ini bertujuan untuk mengungkap upaya yang dilakukan dalam fase pemulihan pascabencana Lumpur Sidoarjo berbasis model *social resettlement*. Kajian menggunakan paradigma interpretif, pendekatan kualitatif studi kasus. Hasil kajian dapat dideskripsikan bahwa dalam fase pemulihan pascabencana Lumpur Lapindo, Sidoarjo meliputi rehabilitasi sosial, terdiri atas tiga program, yakni bantuan, perlindungan, dan pemulihan Sosial. Rekonstruksi sosial pascabencana dilakukan melalui *resettlement* yang terdiri atas tiga model, yakni permukiman sosial penuh, campuran, dan bebas. Permukiman sosial penuh merupakan model yang paling baik dan cocok dalam rekonstruksi dan rehabilitasi sosial pascabencana.

Kata kunci: *pemulihan bencana; social resettlement; manajemen bencana.*

A. Pendahuluan

Terjadinya bencana semburan Lumpur Lapindo (Lulap) atau disebut juga bencana Lumpur Sidoarjo (Lusid) telah menimbulkan dampak bagi masyarakat dan lingkungan di wilayah Kabupaten Sidoarjo, khususnya di tiga kecamatan baik yang masuk ke dalam peta area terdampak (DPAT) maupun luar peta area

terdampak (DPAT), yakni Kecamatan Porong, Tanggulangin, dan Jabon. Sekitar 1.071 hektar luas wilayah di tiga kecamatan tersebut, yang terdiri atas areal pertanian, pertambangan, industri, dan permukiman penduduk dikosongkan, baik karena tenggelam oleh luapan lumpur maupun karena dinyatakan sudah tidak layak huni sebagai dampak sosial-kemasyarakatan, *amblesan*,

maupun bahaya semburan gas. Sekitar 15.788 KK atau 48.983 jiwa harus pindah dari tempat tinggal asalnya ke tempat yang baru.

Bencana Lumpur Sidoarjo selain menimbulkan dampak pada terjadinya perubahan wilayah di Kecamatan Porong, Tanggulangin, dan Jabon sebagai akibat hilangnya beberapa wilayah karena tenggelam lumpur atau tidak layak huni, juga menimbulkan perubahan pada berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, lingkungan, pendidikan. Aset yang rusak terdiri atas, tanah dan bangunan hunian penduduk; tanaman produktif seperti tanaman padi, tebu, dan palawija; Bangunan dan peralatan pabrik; Infrastruktur, seperti jalan tol, jaringan listrik, jaringan irigasi, jaringan air bersih, jaringan telekomunikasi, jaringan pipa gas. Sekitar 3.562 buruh terkena PHK dan 2.302 buruh korban lumpur panas terkatung-katung tanpa pekerjaan, akibat 26 pabrik tempatnya bekerja terendam lumpur. Dalam bidang pendidikan, 33 sekolah terendam lumpur, akibatnya 5.397 siswa harus dimutasi ke sekolah lain atau belajar di sekolah darurat, 36 bangunan TK hingga SMA rusak, belum termasuk gedung sekolah di tepi tanggul lumpur yang harus tutup atau pindah.

Selain kerugian material, bencana Lumpur Sidoarjo juga memicu dampak non-fisik terhadap masyarakat mengakibatkan kerugian yang tidak kalah besar dengan kerugian materi, yaitu kerugian sosial-budaya, psikologis dan kesehatan. Dampak non-fisik ini belum menjadi perhatian utama pihak yang bertanggung jawab, yang seharusnya juga memberi ganti rugi kepada masyarakat korban kerusakan sosial-budaya, psikologi dan kesehatan. Respons terhadap bencana Lumpur Sidoarjo (Lusid) memasuki fase pemulihan (*recovery*). Mengacu kepada undang-undang tentang penanggulangan bencana, pemulihan dimaksudkan sebagai serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.

Penanggulangan bencana (*disaster management*) adalah serangkaian kegiatan dalam

pengurangan risiko dan penekanan dampak bencana baik sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya peristiwa bencana, dengan memperhatikan ancaman bencana dan memanfaatkan sumber-sumber lokal yang tersedia dan keterlibatan berbagai pihak. Tujuan penanggulangan untuk mengurangi risiko bencana (Wiguna, Citrosiswoyo dan Widodo, 2009: 42-43). Secara umum, menurut manajemen bencana, rangkaian fase penanggulangan bencana meliputi fase: Mitigasi; Kesiapsiagaan; Tanggap darurat; dan Pemulihan. Dalam fase pemulihan di dalamnya meliputi juga upaya rehabilitasi dan rekonstruksi. Menurut Mishra (2002: 467), dalam upaya mengurangi resiko bencana perlu dilakukan proses pemetaan, yang meliputi: Pernilaian bahaya dan analisis kerentanan); Mitigasi dan kesiapsiagaan; Fase pra-bencana; respons; penilaian kerugian dan kerusakan; rehabilitasi dan rekonstruksi.

Beach (2010: 4) mengemukakan, bahwa fase dari respons terhadap bencana meliputi fase: mitigasi, terdiri atas persiapan yang diperlukan untuk mengurangi dampak bencana. Mitigasi bisa berupa perbaikan fisik, seperti perbaikan infrastruktur, stok makanan dan air, atau pra-perencanaan organisasi; Respons, yakni suatu tindakan baik yang diorganisir maupun tidak yang diambil selama dan segera setelah kejadian. Hal ini bertujuan untuk menyelamatkan kehidupan, fisik dan property. Respons bisa dilakukan secara tidak terorganisir oleh korban sendiri, yang disebut dengan *self-rescue*, atau dilakukan secara terorganisir oleh pihak personel institusi penanggulangan bencana baik tingkat lokal, federal, maupun nasional; dan pemulihan, yakni suatu upaya untuk mengembalikan kepada keadaan normal setelah terjadinya bencana.

Salah satu kebijakan yang diterapkan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi sosial pada masyarakat korban Lumpur Sidoarjo adalah melalui program *social resettlement*, yakni program rehabilitasi dan rekonstruksi sosial melalui pembangunan pemukiman sosial yang baru dengan basis situasi dan kondisi kehidupan sosial semula. Terdapat tiga kawasan *social resettlement* baru bagi masyarakat korban Lumpur

Lapindo, yakni kawasan perumahan Renojoyo, perumahan Kahuripan Nirwana Village (KNV), dan satu lagi kawasan baru yang dipersiapkan untuk program *bedhol desa* bagi korban bencana Lumpur Lapindo yang berasal dari desa Mindi, Kecamatan Porong, dan sekitarnya.

Menurut Debnath (2007: 340), *resettlement* pada prinsipnya adalah proses relokasi, yakni upaya pemindahan sebagian atau seluruh aktivitas berikut sarana dan prasarana penunjang aktivitas tersebut, dari satu tempat ke tempat lain guna mempertinggi faktor keamanan, kelayakan, legalitas pemanfaatan dengan tetap memperhatikan keterkaitan antara yang dipindah dengan lingkungan alami dan binaan di tempat tujuan. Relokasi dilakukan dengan tetap mempertimbangkan tautan keseharian dan keberlanjutan yang dipindah dengan segala kondisi fisik dan non-fisik serta penduduk di tempat tujuan kepindahan. Mengingat bahwa fase pemulihan merupakan fase yang sangat penting bagi upaya memperbaiki kembali kehidupan sosial masyarakat korban Lumpur Sidoarjo yang telah hancur, kajian tentang pelaksanaan program rekonstruksi dan rehabilitasi sosial pascabencana menjadi hal yang sangat penting. Penelitian dilakukan untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut. Bagaimana kebijakan dan pelaksanaan fase pemulihan dalam upaya rekonstruksi dan rehabilitasi sosial pasca-bencana Lumpur Sidoarjo dan bagaimana gambaran proses model *social resettlement* dalam upaya rekonstruksi dan rehabilitasi sosial pascabencana Lumpur Sidoarjo?

B. Penggunaan Metode Kajian

Kajian menggunakan paradigma interpretif-konstruktivisme (Denzin dan Lincoln, 2009:16). Menurut Denzin dan Guba (Salim, 2001: 71), tujuan kajian dari paradigma interpretif-konstruktivisme adalah melakukan pemahaman dan rekonstruksi *social action*. Lingkup penjelasan keilmuan lebih menekankan pada aspek penjelasannya, karena memuat rasionalitas yang menjadi latar belakang suatu tindakan. Menurut Marvasti (2004: 8), tujuan dari kajian *cons-*

tructionism berkaitan dengan variasi kultural dan situasional yang mewarnai sebuah realitas. Pendekatan kajian yang digunakan adalah kualitatif (Denzin dan Lincoln, 2009: 6 dan Yin, 2011: 7-8), studi kasus (Creswell, 2007: 73). Lokasi kajian ditentukan di wilayah yang terkena dampak Lumpur Lapindo, yakni di Kecamatan Porong, Jabon, dan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Informan kajian ditentukan secara purposif (Babbie, 2008: 204 dan Neuman, 2007:142) meliputi masyarakat korban bencana; LSM Walhi; Karyawan PT. Lapindo Brantas dan PT MLJ; Aparat pemerintah (BPLS). Secara garis besar proses pengumpulan data menggunakan empat teknik pokok yang saling berkaitan dan melengkapi, yaitu *in-depth interview*, *observation*, dan telaah dokumen. Tahap proses pengolahan dan analisis meliputi proses *coding*, *memoing*, dan *concept mapping* (Babbie, 2008: 421).

C. Pemulihan Pascabencana Model Permukiman Bencana lumpur Sidoarjo

Kebijakan dan Pelaksanaan Fase Pemulihan (*Recovery*) dalam Upaya Rekonstruksi dan Rehabilitasi Sosial Pascabencana: Dalam Manajemen Bencana, fase pemulihan (*recovery*) merupakan fase akhir dari proses penanggulangan dampak bencana (Beach, 2010:4; Kusumastari, 2014: 21). Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana (Ramli, 2011: 38). Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala

aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana (Ramli, 2011: 38; Peraturan BNPB Nomor 11 Tahun 2008).

Menurut Picou, dkk. (2004: 149), ada tiga faktor yang sering menjadi hambatan dalam upaya membangun kembali masyarakat pascabencana, yakni kondisi kesehatan fisik dan mental korban bencana sehingga mereka sulit bangkit; Adanya persepsi dari organisasi dan pemerintah tentang ketakutan kegagalan; dan Proses litigasi yang berlarut-larut. Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, bahwa rekonstruksi dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik, meliputi pembangunan kembali prasarana dan sarana, pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat, peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya, peningkatan fungsi pelayanan publik; dan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat. Kementerian Sosial memberi pengertian bahwa rekonstruksi dimaksudkan berupa upaya dan kegiatan guna memperbaiki dan membangun kembali dalam rangka pemulihan sarana, prasarana, fasilitas sosial, rumah penduduk dan lingkungan sesuai standar persyaratan teknis konstruksi bangunan yang diakibatkan oleh bencana (Dirjen Bantuan Sosial Korban Bencana, Depsos RI, 2004:17).

Hakekat dari proses rekonstruksi pasca bencana adalah upaya untuk membangun kembali kapasitas masyarakat, interaksi antara modal manusia, sumberdaya organisasi, dan modal sosial yang ada dalam suatu masyarakat yang mampu mengatasi masalah kolektif dan meningkatkan kembali kehidupan masyarakat yang lebih baik (Chaskin, dkk., 2001: 7). Menurut Gaillard dan Masson (2007: 313-317) proses pemulihan pascabencana sebaiknya berbasis pada masyarakat, prinsipnya meliputi: menggambarkan dukungan masyarakat yang terkena dampak; memanfaatkan cadangan kemampuan

yang ada korban, yang masih dimiliki dan yang kurang; memperbaiki komunikasi untuk memfasilitasi distribusi bantuan; mitigasi resiko ke depan, baik berupa ancaman material maupun psikologis; dan menganggap seluruh pengalaman sebagai proses pembelajaran.

Kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam fase pemulihan bencana lumpur Lapindo di Sidoarjo, dapat dianalisis dalam tiga aspek kebijakan, yakni kebijakan kelembagaan, anggaran, dan program. **Kebijakan kelembagaan:** kebijakan pemerintah pada fase pemulihan dalam upaya rekonstruksi dan rehabilitasi sosial pascabencana Lumpur Sidoarjo (Lusid) tercermin dari dibentuknya sebuah badan, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Lumpur Sidoarjo (BPLS), yang diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2007.

Pertimbangan perlunya dibentuk kelembagaan secara khusus, yakni dampak luapan lumpur di Sidoarjo sudah demikian luas terhadap sendi kehidupan masyarakat di sekitarnya, perlu kebijakan nasional yang lebih komprehensif dalam rangka melanjutkan langkah-langkah penyelamatan penduduk, penanganan masalah sosial dan infrastruktur di sekitar bencana akibat luapan lumpur di Sidoarjo, perlu peningkatan penanganan masalah dimaksud, dengan memperhitungkan risiko lingkungan yang terkecil; berdasarkan pertimbangan tersebut dipandang perlu membentuk BPLS, yang bertugas menangani upaya penanggulangan semburan dan luapan, masalah sosial dan infrastruktur akibat luapan lumpur di Sidoarjo dengan memperhatikan risiko lingkungan yang terkecil.

Badan Penanggulangan terdiri dari dewan pengarah dan badan pelaksana. Dewan pengarah bertugas memberi arahan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan atas upaya penanggulangan semburan lumpur, penanganan luapan lumpur, penanganan masalah sosial dan infrastruktur akibat luapan lumpur di Sidoarjo, yang dilaksanakan BPLS. Dewan pengarah terdiri dari ketua, menteri pekerjaan umum merangkap anggota; Wakil ketua, Menteri Sosial merangkap anggota;

Anggota terdiri atas Menteri Keuangan, Energi Dan Sumber Daya Mineral, Dalam Negeri, Kelautan dan Perikanan, Perhubungan, Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Gubernur Provinsi Jawa Timur, Panglima Daerah Militer V Brawijaya, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur; dan Bupati Kabupaten Sidoarjo. Badan pelaksana, terdiri atas: kepala badan pelaksana, wakil kepala badan pelaksana, sekretaris badan pelaksana, deputi bidang operasi, deputi bidang sosial, dan deputi bidang infrastruktur.

Kebijakan anggaran: Wilayah terdampak bencana Lumpur Lapindo di Sidoarjo dibagi ke dalam dua kategori wilayah terdampak, yakni wilayah dalam peta area terdampak (DPAT) dan wilayah luar peta area terdampak (LPAT). Luas wilayah terdampak bencana Lumpur Lapindo yang masuk wilayah dalam DPAT meliputi 641 hektar, sementara luas wilayah terdampak yang masuk wilayah luar LPAT 550 hektar.

Penentuan wilayah yang masuk dalam PAT didasarkan atas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 tahun 2007, bahwa dalam rangka penanganan masalah sosial kemasyarakatan, PT Lapindo Brantas membeli tanah dan bangunan masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dengan pembayaran secara bertahap, dengan akta jual-beli bukti kepemilikan tanah yang mencantumkan luas tanah dan lokasi yang disahkan oleh pemerintah. Pembayaran bertahap yang dimaksud, seperti yang telah disetujui dan dilaksanakan pada daerah yang termasuk dalam peta area terdampak meliputi 20 persen dibayarkan di muka dan sisanya dibayarkan paling lambat sebulan sebelum masa kontrak rumah dua tahun habis. Biaya upaya penanggulangan semburan lumpur termasuk di dalamnya penanganan tanggul utama sampai Kali Porong dibebankan kepada PT Lapindo Brantas, sedangkan biaya untuk upaya penanganan masalah infrastruktur dan penanganan luapan lumpur di Sidoarjo, dibebankan kepada APBN dan sumber dana lainnya yang sah.

Penentuan wilayah yang masuk luar PAT didasarkan atas beberapa peraturan presiden (Perpres), yakni Perpres Nomor 48 tahun 2008; Perpres Nomor 40 tahun 2009; Perpres Nomor 68 tahun 2011; Perpres Nomor 37 tahun 2012; dan Perpres Nomor 33 tahun 2013. Intinya biaya penanganan masalah sosial kemasyarakatan di luar peta area terdampak (LPAT) dibebankan pada APBN. Dalam rangka penanganan masalah sosial kemasyarakatan, dilakukan pembelian tanah dan bangunan di wilayah tersebut dengan akta jual beli bukti kepemilikan tanah yang mencantumkan luas tanah dan lokasi yang disahkan oleh pemerintah. Proses jual beli dilakukan oleh BPLS atas nama pemerintah.

Relasi antara korban bencana Lumpur Lapindo dengan pihak PT LBI dan pihak pemerintah diatur melalui skema relasi jual-beli. Artinya, pihak warga korban bencana Lumpur Lapindo diposisikan sebagai pihak penjual aset tanah dan bangunan yang hancur tenggelam atau karena tidak layak huni, sedangkan pihak PT LBI dan pihak pemerintah diposisikan sebagai pihak pembeli aset tanah dan bangunan. Dalam proses jual-beli tersebut pihak PT LBI dan pemerintah mensyaratkan bukti kepemilikan atas aset tanah dan bangunan milik warga korban agar bisa dilakukan pembayaran.

Menurut penjelasan Humas BPLS, dana yang sudah dikeluarkan oleh pihak PT LBI 3,03 Triliun, sedangkan untuk dana APBN 2,8 Triliun. Namun menurut sumber lain, sejak 2006 pemerintah telah menggelontorkan total dana 7,6 triliun dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) melalui BPLS untuk menyelesaikan masalah korban bencana lumpur Sidoarjo. Dana tersebut digunakan antara lain, sebagai kompensasi atas kehilangan harta benda dan kehilangan pendapatan masyarakat yang menjadi korban bencana. Dana APBN sekitar 7,6 triliun tersebut dirinci sebagai berikut: APBN tahun 2007 sebesar 113,9 Miliar, APBN tahun 2008 sebesar 1,1 Triliun, APBN tahun 2009 sebesar 592,1 Miliar, APBN tahun 2010 sebesar 1,2 Triliun, APBN tahun 2011 sebesar 1,3 Triliun;

APBN tahun 2012 sebesar 1 Triliun, dan APBN tahun 2013 sebesar 2,2 Triliun rupiah.

Kebijakan Program: Kebijakan pemerintah terkait program pemulihan (*recovery*) dalam upaya rekonstruksi dan rehabilitasi sosial pascabencana Lumpur Sidoarjo (Lusi) meliputi: program bantuan sosial, perlindungan sosial, dan pemulihan sosial. **Pertama**, program bantuan sosial ditujukan untuk mengurangi dampak sosial pada kondisi darurat, baik yang terjadi karena dampak semburan maupun penurunan tanah, serta melaksanakan tindakan berjaga-jaga sebagai bentuk kesiapsiagaan apabila terjadi bencana, mengingat bahwa sumber bencana masih belum berhenti. Berdasarkan Perpres 14 tahun 2007, kegiatan yang dilaksanakan berkaitan dengan kegiatan bantuan sosial adalah sebagai berikut. Melaksanakan pengawasan pemberian bantuan sosial; Melaksanakan pemantauan pelaksanaan evakuasi warga korban luapan lumpur; Bantuan sosial berdasarkan Perpres 48 tahun 2008; bantuan air bersih; dan bantuan pemberdayaan.

Kedua, perlindungan sosial. Pokok kegiatannya adalah mengupayakan terlindunginya hak warga atas harta benda miliknya yang hilang atau berkurang karena dampak luapan lumpur, diberikan dalam rangka pelaksanaan ganti rugi atau jual beli tanah dan bangunan, kompensasi atas hilangnya pendapatan baik yang disebabkan oleh hilangnya pekerjaan, sawah, maupun usaha yang tidak dapat dilanjutkan lagi. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi: Pengawasan dan fasilitas ganti rugi dan jual beli tanah dan bangunan; Penanganan kompensasi gagal panen; Kompensasi perusahaan yang berhenti beroperasi; Kompensasi usaha kecil dan menengah (UKM); dan penanganan unjuk rasa.

Ketiga, pemulihan sosial. Tantangan kegiatan pemulihan sosial adalah warga yang mengalami kepanikan karena kehilangan tempat tinggal, warga yang kehilangan mata pencaharian, anak-anak warga yang mengalami gangguan proses belajar, lingkungan yang tidak lagi kondusif karena udara yang tercemar, serta trauma akibat bencana semburan lumpur. Sasaran yang ingin diwujudkan dalam kegiatan pemulihan

sosial adalah pulihnya kemampuan individu dan kelompok dalam melaksanakan tugas kehidupan baik sebagai individu, anggota keluarga maupun masyarakat, melalui penyebaran informasi, penyuluhan sosial, dan pendidikan. Selain itu juga dilaksanakan konseling bagi individu yang mengalami kegoncangan psikososial dan ventilasi (kesempatan untuk melepaskan segala bentuk tekanan psikologis). Kegiatan yang dilaksanakan meliputi: Sosialisasi dan sarasehan; Observasi dan pengumpulan informasi; Penanganan masalah pendidikan, kesehatan, mental spiritual, pemberdayaan masyarakat korban dan penanganan pengungsi di Pasar Porong Baru.

Gambaran Model Social Resettlement: upaya Rekonstruksi dan Rehabilitasi Sosial Pascabencana: Berdasarkan data hasil penelitian jumlah korban bencana Lumpur Sidoarjo (Lusid) yang harus pindah dari tempat asalnya, yakni wilayah Kecamatan Porong dan sekitarnya 15.788 KK atau 48.983 Jiwa. Dalam fase pemulihan, *social resettlement* pada prinsipnya adalah proses relokasi (Debnath (2007: 340). Relokasi yakni upaya pemindahan sebagian atau seluruh aktivitas berikut sarana dan prasarana penunjang dari satu tempat ke tempat lain guna mempertinggi faktor keamanan, kelayakan, legalitas pemanfaatan dengan tetap memperhatikan keterkaitan antara yang dipindah dengan lingkungan alami dan binaan di tempat tujuan (Dirjen Cipta Karya, Kementerian PU, 2010:17).

Relokasi dilakukan dengan tetap mempertimbangkan tautan keseharian dan keberlanjutan yang dipindah dengan segala kondisi fisik dan non-fisik serta penduduk di tempat tujuan. Berdasarkan hasil kajian, dapat dikonstruksikan bahwa terdapat tiga model relokasi dalam *social resettlement* fase pemulihan sosial (rekonstruksi dan rehabilitasi sosial) pascabencana Lumpur Sidoarjo, yakni model pemukiman sosial penuh; permukiman sosial campuran; dan model pemukiman sosial bebas.

Model pemukiman sosial penuh: pelaksanaannya mirip dengan program *bedhol desa*, dilakukan oleh warga korban bencana Lumpur Sidoarjo yang berasal dari Desa Renokenongo,

Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, tergabung dalam Kelompok Paguyuban Warga Renokenongo Menolak Kontrak (Pagarekontrak). Salah satu tuntutan dari warga korban bencana Lumpur Lapindo yang tergabung dalam kelompok Pagarekontrak adalah meminta agar tempat tinggal mereka yang baru bisa direlokasikan di satu tempat, sehingga mereka bisa berkumpul bersama seperti dulu saat tinggal di Desa Renokenongo, meliputi seluruh warga korban bencana lumpur Lapindo yang berasal dari desa Renokenongo, yang tinggal di tempat pengungsian Pasar Porong Baru (PPB), yang jumlahnya sekitar 766 KK.

Aspirasi warga korban bencana Lumpur Lapindo yang tergabung dalam kelompok Pagarekontrak yang menginginkan relokasi tempat tinggal secara bersama-sama di tempat yang baru kemudian direspons oleh pemimpin kelompok Pagarekontrak, kemudian mencari lokasi tanah untuk kawasan perumahan dan membangun rumah untuk hunian korban bencana Lumpur Lapindo melalui kerjasama dengan *Real Estate Indonesia* (REI) Jatim dan Bank Jatim, yang difasilitasi Gubernur Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo. Di atas tanah seluas sepuluh hektar dibangun 600 unit rumah tipe 36 yang kemudian menjadi kawasan Perumahan Renojoyo. Nama diambil dari asal desa warga korban bencana Lumpur Lapindo, yakni Desa Renokenongo. Proses pembayaran rumah oleh warga korban bencana Lumpur Lapindo dibayarkan oleh pihak PT Lapindo Brantas Inc. (PT LBI), sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam proses pembayaran ganti rugi (jual beli) aset korban bencana, kepada Bank Jatim sesuai dengan besaran jumlah dana yang harus dibayarkan kepada masing-masing korban bencana Lumpur Lapindo atas dasar jual-beli.

Kelebihan model ini adalah warga masyarakat tidak menemukan kesulitan dalam proses sosialisasi di lingkungan baru karena secara sosial mereka sudah saling mengenal. Masyarakat juga tidak perlu membangun struktur sosial yang baru karena masyarakat masih menggunakan struktur sosial lama. Proses sosialisasi dan

adaptasi masyarakat dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisik tidak mengalami kesulitan, sangat memudahkan dalam membangun relasi dan interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Kelemahan dari model ini karena struktur sosial yang tidak berubah, maka posisi sosial juga tidak berubah, sehingga peran dan fungsi dari masing-masing orang juga tidak berubah.

Model pemukiman sosial campuran: pelaksanaannya seperti *semi-bedhol desa*, dilakukan oleh warga korban bencana Lumpur Sidoarjo yang berasal dari Perumahan Tanggul Angin Sejahtera I (Perumtas I), Desa Tanggulangin, Kecamatan Siring, Kabupaten Sidoarjo, tergabung dalam kelompok Tim-16. Tuntutan mereka meminta penggantian rumah dengan rumah yang sudah siap huni, polanya rumah diganti dengan rumah. Pihak PT Lapindo Brantas Inc. (PT LBI), sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam proses pembayaran ganti rugi (jual beli) aset korban bencana, kemudian bekerjasama dengan pengembang perumahan yaitu Kahuripan Nirwana Village (KNV) yang berlokasi di Kota Sidoarjo untuk menyediakan beberapa unit rumah yang sudah siap huni. Rumah yang ada di perumahan Kahuripan Nirwana Village (KNV) sebagai pengganti rumah bagi korban bencana Lumpur Sidoarjo yang berasal dari Perumahan Tanggul Angin Sejahtera I (Perumtas I), Desa Tanggulangin, Kecamatan Siring, Kabupaten Sidoarjo. Jumlah rumah yang disediakan 200 unit tipe 36. Anggota kelompok Tim-16 sekitar 2.000 orang (jiwa), yang merupakan warga yang tinggal di Perumahan Tanggul Angin Sejahtera (Perumtas).

Proses pembayaran rumah oleh warga korban bencana Lumpur Lapindo dibayarkan oleh pihak PT Lapindo Brantas Inc. (PT LBI), sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam proses pembayaran ganti rugi (jual beli) aset korban bencana kepada pihak perumahan Kahuripan Nirwana Village (KNV). Model ini juga diikuti oleh sebagian warga korban bencana Lumpur Sidoarjo yang tergabung dalam kelompok Gerakan Pendukung Perpres (Geppres), dipimpin oleh seorang tokoh agama, yakni KH. Abdul Fatah,

yang merupakan pengasuh di Pondok Pesantren At-Tahzib, Karang Bendo, Tanggulangin, Sidoarjo. Yang dipilih oleh warga korban lumpur Lapindo sebagai Koordinator Geppres, dibantu Machmudatul Fatchiyah yang merupakan mantan Kepala Desa Renokenongo. Anggota Geppres, terdiri atas sebagian warga Perum TAS I dan warga Desa Jatirejo, Desa Siring, Desa Kedung Bendo, dan Desa Renokenongo, Desa Besuki, Desa Kedungcangkring, dan Desa Penjarakan.

Keuntungan dari model ini bahwa warga korban bencana masih bisa berkumpul dengan sesama warga korban lain dan juga bisa berbaur dengan warga baru dalam satu kawasan. Namun kelemahannya sebagian besar warga korban bencana Lumpur Sidoarjo berasal dari perdesaan, ketika mereka tinggal di kawasan perumahan Kahuripan Nirwana Village (KNV) yang berada di perkotaan, warga korban banyak yang mendapat kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan pola relasi dan interaksi sosial dalam kehidupan sosial sehari-hari di kawasan perumahan.

Model pemukiman sosial bebas: pelaksanaannya berbeda dengan pola *bedhol desa* atau *semi-bedol desa*, yang memberi kebebasan kepada setiap warga korban bencana Lumpur Sidoarjo untuk mencari tempat tinggal baru sesuai keinginan mereka. Warga korban bencana Lumpur Sidoarjo yang mengambil pola bebas adalah mereka yang tergabung ke dalam kelompok Gabungan Korban Luapan Lumpur (GKLL), yang memperjuangkan proses ganti rugi bagi warga korban lumpur Lapindo melalui skema *cash and carry (CnC)*, pembayaran ganti rugi secara bertahap melalui pembayaran uang muka sebesar 20 persen, dan sisanya sebesar 80 persen dilunasi dengan cara pembayaran tunai dalam kurun waktu dua tahun. Selama dua tahun warga korban diberikan uang untuk kontrak rumah sebesar lima juta, dan jatah hidup sebesar Rp 300.000,- untuk setiap jiwa per bulan. Anggota GKLL adalah warga korban bencana lumpur Lapindo, terutama yang berasal dari Desa Siring, Jatirejo, Renokenongo, Kedungbendo, dan sebagian warga Perumahan Tanggul Angin

Sejahtera (Perum TAS), yang jumlahnya 5.000 KK.

Relokasi warga korban bencana model pemukiman sosial bebas (*free-social resettlement*) tersebar di beberapa lokasi, pada umumnya mereka berbaur dengan masyarakat di lokasi komunitas baru atau mencari membangun rumah baru di sekitar tempat tinggal saudaranya. Keuntungan dari model ini adalah warga korban bencana Lumpur Sidoarjo memiliki kebebasan untuk mencari lokasi baru bagi tempat tinggalnya sesuai keinginannya. Namun kelemahannya, karena mereka tinggal di tempat yang baru, mereka harus mampu menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan lingkungan sosial baru. Dalam beberapa kasus, nilai harga tanah dan rumah dinaikkan jika diketahui bahwa yang akan membelinya adalah warga korban bencana Lumpur Sidoarjo, karena dianggap memiliki banyak uang dari hasil pembayaran ganti rugi (jual beli) dengan pihak PT Lapindo Brantas Inc. (PT LBI).

D. Penutup

Dari hasil penelitian dapat diperoleh gambaran bahwa dalam fase pemulihan (*recovery*) pascabencana Lumpur Sidoarjo upaya yang dilakukan meliputi proses rehabilitasi sosial dan rekonstruksi sosial. Upaya rehabilitasi sosial pascabencana terdiri atas tiga program, yakni program bantuan sosial, perlindungan sosial, dan pemulihan sosial. Rekonstruksi sosial pascabencana dilakukan melalui model permukiman sosial (*social resettlement*) terdiri atas tiga model, yakni model permukiman sosial penuh (*full-social resettlement model*), permukiman sosial campuran (*mix-social resettlement*), dan permukiman sosial bebas (*free-social resettlement*). Model permukiman sosial penuh (*full-social resettlement*) merupakan model yang paling baik dan cocok dalam upaya pemulihan (rekonstruksi dan rehabilitasi sosial) pascabencana dibandingkan dengan model permukiman sosial campuran (*mix-social resettlement*), dan model permukiman sosial bebas (*free-social resettlement*).

Pustaka Acuan

- Babbie, Earl. (2008). *The Basics of Social Research*. Belmont, USA: Thomson Wadsworth.
- Beach, Michael. (2010). *Disaster Preparedness and Management*. Philadelphia: F.A. Davis Company.
- Chaskin, Robert J. Et. Al. (2001). *Building Community Capacity*. New York: Aldine de Gruyter.
- Creswell, John W. (2007). *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches*. New Delhi: SAGE Publications.
- Debnath, B. (2007). *Resettlement and Rehabilitation*. Economic and Political Weekly, Vol. 42, No. 32.
- Denzin, Norman K.; & Lincoln, Yvonna S. (2009). *Handbook of Qualitative Research* (terj.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ramli, Soehatman. (2011). *Pedoman Praktis Manajemen Bencana*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Direktorat Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial, Dirjen Bantuan dan Jaminan Sosial, Depsos RI. (2004). *Pola Penanganan Korban Bencana Sosial di Indonesia*.
- Gaillard, Jean-Christophe dan Masson, Virginie Le. (2007). *Traditional Societies' Response to Volcanic Hazards in the Philippines: Implications for Community-Based Disaster Recovery*. Mountain Research and Development, Vol. 27, No. 4.
- Kalof, Linda, et. al. (2008). *Essentials of Social Research*. Berkshire: Open University Press.
- Kusumasari, Bevaola. (2014). *Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal*. Yogyakarta: Gava Media.
- Luce, Henry et. Al.. (1993). *Disaster Vulnerability: Scale, Power and Daily Life*. Geo Journal, Vol. 30, No. 2.
- Marvasti, Amir B. (2004). *Qualitative Research in Sociology: An Introduction*. London: Sage Publications.
- Mishra, Pramod K. (2002). *Maps and Disaster Management*. Economic and Political Weekly, Vol. 37, No. 47.
- Neuman, W. Lawrence. (2007). *Basics of Social Research: Qualitative and Quantitative Approaches*. Boston: Pearson Education, Inc.
- Picou, J. Steven, et. Al. (2004). *Disaster, Litigation, and the Corrosive Community*. Social Forces, Vol. 82, No. 4 (Jun., 2004), pp. 1493-1522.
- Rodriguez, H. Et. Al. (2007). *Handbook of Disaster Research*. New York: Springer Science+Business, LLC.
- Salim, Agus (peny.). (2001). *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial: Pemikiran Norman K. Denzin & Egon Guba, dan penerapannya*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Yin, Robert K. 2011. *Qualitative Research from Start to Finish*. New York: The Guilford Press.
- Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007, tentang Penanggulangan Bencana.
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.

**Sinergi Peran Elemen Lembaga Penyelenggara
Kesejahteraan Sosial Keluarga melalui *Family Care Unit*
*Sinergy The Role of Social Welfare Institution Holders
through Family Care Unit (FCU)***

Pranowo¹ dan A. Nururrochman Hidayatullah²

¹Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS)

Jl. Kesejahteraan Sosial No 1 Sonosewu Yogyakarta Telpn (0274) 377265.

²Badan Pendidikan Penelitian dan Penyuluhan Sosial, Kementerian Sosial.

HP +628156887587. Email: <pranowo19@gmail.com>; HP +6285643885019>. Email: <anhidayatullah79@gmail.com>.

Diterima 24 Juni 2016, diperbaiki 24 Juli 2016, disetujui 11 Oktober 2016.

Abstract

This research is to reconstruct synergy the role of social welfare institution holders through family ce unit (FCU), in Citangkil Subdistrict, Citangkil District, Cilegon Municipality, based on consideration that in that location the experiment on FCU was held with the role of social institutions. This research is qualitative-descriptive, describing the implementation and joint-work among the institutions holding FCU program and the commitment of those institutions to materialise plasma family to pioneer family. Data were gathered through interview, either structured and non-structured, observation, and docomentary analysis. Data were analysed through SWOPA technic (sthrengthness, weakness, opportunities, problem and action). The research found that the role of social welfare institutions in FCU program in Citangkil Subdistrict still limited on identification and selection activities of pioneer families. The advocation was yet supported by administrative management, facility, and financial. Coordination and unity among institutions should have been optimized, bacasued its human resources in the management should have more dedication to materialise plasma family to be pioneer family.

Keywords: institutional synergy; social welfare; FCU

Abstrak

Penelitian ini merekonstruksikan sinergi peran lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial keluarga melalui program *family care unit* (FCU), di Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon didasari pertimbangan di lokasi tersebut telah dilakukan ujicoba FCU melalui peran lembaga sosial. Jenis penelitian ini deskriptif kualitatif, mendeskripsikan pelaksanaan dan kerjasama antarlembaga dalam menyelenggarakan program FCU dan keterlibatan kelembagaan dalam mewujudkan kemandirian keluarga plasma menjadi keluarga pionir. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, baik terstruktur maupun tidak, observasi dan telaah dokumen. Analisis data menggunakan teknik SWOPA (*sthrengthness, weakness, opportunities, problem and action*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran lembaga penyelenggara FCU di Kelurahan Citangkil masih sebatas pada aktivitas identifikasi dan seleksi keluarga pionir, advokasi sosial kurang didukung oleh pengelolaan administrasi, fasilitasi dan finansial. Koordinasi dan keterpaduan program FCU melalui pelibatan lembaga sosial seharusnya masih dapat dioptimalkan lebih baik, karena dari sisi SDM pengelolaan FCU yang dilakukan pengurus seharusnya memiliki dedikasi menjadikan keluarga plasma menuju keluarga pionir yang sejahtera dan mandiri.

Kata Kunci: sinergi kelembagaan; kesejahteraan sosial; FCU

A. Pendahuluan

Dalam Undang-Undang 1945 tersirat bahwa tujuan pembangunan nasional Republik Indonesia adalah terwujudnya kesejahteraan rakyat, sehingga peran keluarga menjadi penting. Permasalahan yang dihadapi keluarga pada dasarnya

terdapat pada kompleksitas penyandang masalah kesejahteraan anggotanya. Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial menunjukkan, keluarga fakir miskin 7.504.736 KK, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), seperti keluarga tinggal di ru-

mah tidak layak huni 4.451.807 KK. Keluarga bermasalah sosial psikologis 200.230 KK, anak terlantar 1.677.769 jiwa, anak balita terlantar 341.458 Jiwa, dan anak nakal 146.228 jiwa serta anak jalanan 135.489 jiwa dan lanjut usia terlantar 2.298.425 jiwa (Kementerian Sosial, 2011). Isu aktual yang muncul di desa/kelurahan adalah adanya keluarga yang menyandang berbagai permasalahan sosial, kelompok penyandang permasalahan sosial ini disebut keluarga plasma, keluarga yang kurang mempunyai kemampuan untuk menjalankan peran dan fungsi, mengatasi masalah dan menjangkau pelayanan sosial.

Permasalahan keluarga plasma dikarenakan semakin kompleksnya masalah yang dihadapi, terutama kondisi kehidupan ekonomi yang berada di bawah garis kemiskinan, karena perceraian, tertutup akses sumber kesejahteraan sosial, ketidakseimbangan komunikasi, pola kehidupan yang cenderung egoistis, bergesernya nilai pola kerja, dan ritme kehidupan yang tidak kondusif. Hal ini terjadi karena berbagai faktor, meliputi kehidupan keluarga tidak harmonis, kurang mampu mengatasi masalah kesejahteraan keluarga, kebutuhan dasar kurang terpenuhi, jumlah atau banyaknya anak yang tidak ideal dan tidak didukung pendapatan keluarga, daya juang rendah tidak memiliki cita-cita, mudah menyerah pada nasib dan goyah dalam menghadapi masalah keluarga, tidak tahu kekuatan dirinya serta lemahnya sinergi peran antar lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial keluarga yang tidak didukung sistem penanganan secara terpadu.

Di sisi masyarakat, terdapat lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial, seperti karang taruna, lembaga koordinasi dan konsultasi keluarga, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, dunia usaha dan beberapa pekerja sosial yang potensial untuk mengatasi permasalahan keluarga plasma. Apabila sinergi mereka ditangani secara baik, menjadi sumber daya untuk mencapai kesejahteraan sosial. Pemerintah melalui Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pemberdayaan

Sosial Kementerian Sosial berupaya membuat dan melakukan uji coba model sinergi penyelenggaraan kesejahteraan sosial berbasis potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS). Model sinergi penyelenggaraan kesejahteraan sosial tersebut dibangun untuk memaksimalkan sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terpadu, melalui *family care unit* (FCU) sebagai unit pelayanan kesejahteraan sosial terpadu bagi keluarga di tingkat desa/kelurahan (Kementerian Sosial, 2012).

Kebijakan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial yang dituangkan berupa sinergi penyelenggaraan kesejahteraan sosial keluarga ditempuh dengan membentuk program FCU dilengkapi dengan kepengurusan, dan keluarga pionir sebagai contoh kehidupan sejahtera bagi keluarga plasma di pedesaan/kelurahan. Pembentukan FCU dimaksudkan sebagai wadah aliansi potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) untuk meningkatkan sinergi peran lembaga penyelenggara kesejahteraan keluarga, sehingga elemen lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat melakukan koordinasi, kerjasama dan integrasi secara baik dalam mewujudkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Keluarga pionir yaitu keluarga yang mampu mencegah, mengatasi permasalahan sosial dan mewujudkan kehidupan sejahtera yang dapat dicontoh keluarga plasma, sehingga pada akhirnya keluarga plasma bisa berubah menjadi keluarga pionir.

Program pembentukan FCU dilatarbelakangi adanya fenomena bahwa sinergi peran lembaga sebagai pilar pelayanan kesejahteraan sosial di tingkat desa/kelurahan pada kenyataannya belum maksimal dalam memberi pelayanan kesejahteraan sosial keluarga, khususnya dalam menopang terwujudnya kesejahteraan sosial keluarga yang memerlukan peningkatan sinergi peran. Karang taruna memfokuskan usaha kesejahteraan sosial pada pembinaan generasi muda, pekerja sosial masyarakat dan pendamping pada masalah yang dihadapi sesuai tugas pokoknya, masalah anak terlantar, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok usaha bersama (Kube) fakir

miskin, idealnya mereka bersama-sama membangun sinergi peran dalam membina kesejahteraan sosial keluarga plasma, tetapi masih ditemukan berbagai persoalan dalam pembentukan FCU. Kementerian Sosial (2014), mengungkapkan terdapat beberapa hal yang menghambat pembentukan FCU, kesulitan dalam penentuan dan penetapan keluarga pionir sesuai kriteria yang ada, terbatasnya biaya operasional, terbatasnya daya dukung prasarana untuk melaksanakan pembinaan keluarga plasma, dan terbatasnya peran lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial untuk terlibat nyata dalam kegiatan usaha kesejahteraan sosial di masyarakat. Eksistensi FCU yang dikelola masyarakat belum mampu berinteraksi dalam memainkan perannya sebagai potensi sumber kesejahteraan sosial. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian tentang sinergi peran elemen lembaga penyelenggara kesejahteraan keluarga melalui *family care unit* kiranya perlu dilakukan.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan program FCU dalam membangun sinergi peran lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial keluarga melalui FCU. Arikunto (2000) mengemukakan, bahwa tipe penelitian deskriptif bertujuan untuk mendapatkan gambaran kondisi lapangan tempat penelitian dilakukan. Berdasarkan pendapat ini, digambarkan upaya FCU dalam mewujudkan sinergi peran elemen penyelenggara kesejahteraan sosial keluarga di Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, tempat uji coba pemberdayaan keluarga melalui FCU sehingga memungkinkan dilakukan uji petik keberhasilan program.

Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Wawancara yang dilakukan terstruktur dan tidak terstruktur. Menurut Nasution (2006), wawancara terstruktur melalui pertanyaan yang dipersiapkan tertulis sesuai dengan permasalahan penelitian, dan wawancara tidak berstruktur dilakukan apabila ada jawaban berkembang di luar per-

tanyaan terstruktur tetapi tidak terlepas dari permasalahan penelitian. Wawancara ditujukan kepada informan yang terdiri atas pengurus FCU dan keluarga pionir. Kedua, observasi dengan menggunakan indra penglihatan (Irawan, 1995). Observasi digunakan untuk memperkuat dan mengkonfirmasi data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan kenyataan yang sebenarnya di lapangan. Observasi yang digunakan juga berstruktur sesuai catatan pedoman wawancara. Telaah dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen baik yang ada di Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil maupun yang ada di Kota Cilegon, melalui telaah dokumen yaitu mencari data berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, hasil rapat, agenda (Arikunto, 2000). Data dianalisis dengan menggunakan SWOPA yaitu kekuatan (*strengthness*, S), kelemahan (*weaknesses*, W), peluang atau kesempatan (*opportunities*, O). Masalah (*problem*), dan aksi atau tindakan (*action*, A) yang ada pada FCU.

C. Analisis Sinergi Peran Elemen Lembaga Penyelenggara FCU

Kota Cilegon merupakan bekas lokasi kawedanan (wilayah kerja Bupati KDH Serang), meliputi tiga Kecamatan Cilegon, Banjarnegara dan Pulomerak. Berdasarkan pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Cilegon berstatus sebagai kota administratif. Melalui surat Bupati KDH Serang nomor 86/Sek/Bapp/VI/84 tentang usulan pembentukan administratif Cilegon dan atas perkembangan obyektif, dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1986 tentang Pembentukan Kota Administratif Cilegon dengan luas wilayah 17.550 hektar yang meliputi tiga wilayah kecamatan, yaitu Pulomerak, Ciwandani, dan Cilegon. Kecamatan Banjarnegara masuk wilayah kerja pembantu Bupati KDH Serang, wilayah Kramatuwatu.

Pada 7 Februari 1992 Kota Administrasi Cilegon bertambah menjadi empat kecamatan yaitu Pulomerak, Ciwandani, Cilegon, dan Cibeber,

menyusul ditetapkan dan disahkan Undang-undang Nomor 15 tahun 1995, tentang pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Tingkat II Cilegon, Status Kota Administratif Cilegon berubah menjadi Kotamadya Cilegon dengan jumlah kecamatan sebanyak delapan, 43 kelurahan, meliputi Kecamatan Ciwandan terdiri atas 6 kelurahan, Kecamatan Citangkil terdiri atas 7 Kelurahan, Kecamatan Pulomerak terdiri atas 4 kelurahan, Kecamatan Purwakarta terdiri atas 6 kelurahan, Kecamatan Grogol terdiri atas 4 kelurahan, Kecamatan Cilegon terdiri atas 5 kelurahan, Kecamatan Jombang terdiri atas 5 Kelurahan, dan Kecamatan Cibeber terdiri atas 6 Kelurahan.

Kota Cilegon beriklim tropis, terletak di bagian barat Pulau Jawa, berada pada $5^{\circ} 52' 24''$ – $6^{\circ} 04' 07''$ LS dan $105^{\circ} 54' 05''$ – $106^{\circ} 05' 11''$ BT. Sebelah utara, timur dan selatan berbatasan dengan Kabupaten Serang dan sebelah barat dengan Selat Sunda. Kecamatan Citangkil adalah salah satu kecamatan di Kota Cilegon dengan ibukota kecamatan di Kebonsari. Luas wilayah 22,78 Km^2 (13,09 persen) dari wilayah Kota Cilegon. Letak berada pada $5^{\circ} 50' 49.1''$ – $6^{\circ} 02' 43.7''$ LS dan $105^{\circ} 52' 48.1''$ – $106^{\circ} 02' 54.5''$ LU. Jarak antar kecamatan dengan Kecamatan Ciwandan 6,5 Km, Pulomerak 17 km, Purwakarta 5,7 km, Grogol 6 km, Cilegon 5 km, Jombang 4,5 km dan Cibeber 18,8 km.

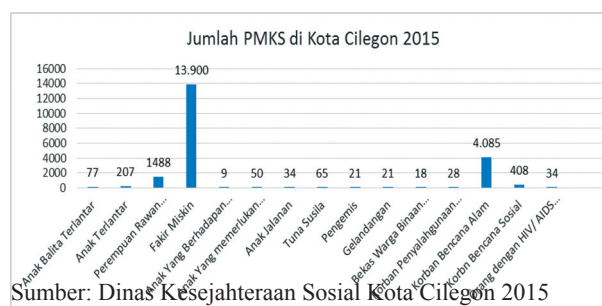
Kecamatan Citangkil terdiri 7 kelurahan, 49 RW, 173 RT. Jumlah penduduk 69.996 jiwa atau 17,57 persen dari jumlah penduduk Kotamadya Cilegon. Dilihat dari luas daerah, kepadatan penduduk 3.046 jiwa per Km^2 . Pertumbuhan penduduk tahun 2012 68.698 jiwa dan tahun 2013 69.998 jiwa, laju pertumbuhan penduduk per tahun 1,89 atau dua jiwa per Km^2 . Jumlah keluarga di Kelurahan Citangkil 20.298 KK, jumlah penduduk laki laki 35.751 jiwa dan perempuan 34.245 jiwa, sex ratio 104, yakni 104 jiwa penduduk laki-laki berbanding dengan 100 jiwa penduduk perempuan.

Kelurahan Citangkil merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, secara geografis termasuk datar-

an sedang, letak kelurahan berjarak kurang lebih 5 Km ke kantor kecamatan, dan 1,5 Km ke Kantor Walikota Cilegon. Batas wilayah secara administrasi meliputi: Sebelah Utara Kelurahan Ramanuju, Kecamatan Purwakarta. Sebelah Selatan: Kelurahan Taman Baru, Kecamatan Citangkil. Sebelah Barat: Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Citangkil. Sebelah Timur: Kelurahan Masiget, Kecamatan Jombang. Luas wilayah Kelurahan Citangkil adalah 159,873 ha, dihuni oleh 15.622 jiwa terletak di Kota Cilegon, Provinsi Banten. Secara administratif Kelurahan Citangkil terbagi menjadi 11 rukun warga (RW), terdiri 39 Rukun Tetangga (RT). Jumlah penduduk Kelurahan Citangkil 3.988 KK, 15.468 jiwa terdiri dari laki-laki 8.074 jiwa dan perempuan 7.394 jiwa.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Cilegon bervariasi dan kompleks, ada 15 jenis permasalahan tertera pada grafik 1 sebagai berikut

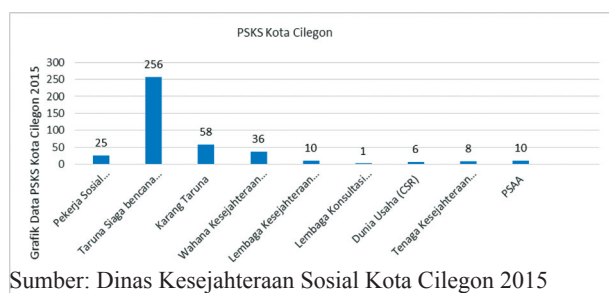
Grafik 1
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Cilegon



Berdasarkan data tersebut di atas, PMKS di Kota Cilegon yang paling menonjol adalah fakir miskin 13.900 jiwa, merupakan masalah yang mempengaruhi kehidupan kesejahteraan sosial keluarga hingga di kelurahan. Di Kelurahan Citangkil terdapat PMKS fakir miskin yang disebut keluarga plasma 275 keluarga. Keluarga miskin yang termasuk keluarga plasma perlu mendapat perhatian dengan mendayagunakan segenap ele-

men lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial dengan mendayagunakan potensi yang ada di daerah tersebut. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dapat didayagunakan untuk mendukung penyelenggaraan kesejahteraan keluarga di Kota Cilegon tampak pada grafik sebagai berikut.

Grafik 2
Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial
di Kota Cilegon



Sumber: Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Cilegon 2015

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa PSKS masih terbatas, sebagian besar adalah potensi dan sumber untuk penanganan bencana alam, yaitu taruna siaga bencana (Tagana).

Lembaga yang terdapat di kelurahan hanya Karang Taruna dan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM), FCU Bina Bahagia Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon membangun keluarga Pionir (keluarga idaman) untuk menjadi contoh kehidupan keluarga plasma. Satu-satunya lembaga yang memiliki tugas dan fungsi mengkoordinir kegiatan kesejahteraan keluarga adalah LK3, berada di Kota Cilegon, yang membangun sinergi antara penyelenggara kesejahteraan sosial perlu ditumbuhkan oleh FCU di kelurahan.

Peran FCU dari aspek LOAFAR (legalitas, organisasi, administrasi, fasilitas, aktualisasi dan relasi). Legalitas kelembagaan dan program kegiatan, pada tahun 2013, setelah model pemberdayaan keluarga melalui FCU diujicoba kemudian disosialisasikan oleh Direktorat Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial serta difasilitasi Dinas Sosial

Kota Cilegon bersama Camat Citangkil serta Kepala Kelurahan Citangkil, tokoh masyarakat beserta pilar pelaksanaan kesejahteraan keluarga, seperti pekerja sosial masyarakat/relawan sosial, karang taruna, Posyandu, Posdaya, PKK, PAUD, LPMD/K, kelompok keagamaan mendirikan FCU. Mereka mendirikan FCU adalah mewujudkan tanggung jawab dan kesadaran pentingnya wadah aliansi pilar penyelenggaraan kesejahteraan sosial. FCU dibentuk sebagai wahana dalam membangun keterpaduan yang sinergi, serta mengoptimalkan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) di tingkat kelurahan, tujuan untuk meningkatkan koordinasi, kerjasama, dan keterpaduan (kemitraan) yang sinergis dalam upaya meningkatkan taraf hidup keluarga plasma.

FCU di Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon yang dibentuk tahun 2013 diberi nama FCU Bina Bahagia, memiliki program melakukan identifikasi dan seleksi potensi keluarga pionir serta keluarga plasma, menjalankan advokasi sosial, pemberdayaan, dan kesehatan keluarga. Pembentukan FCU dan program kerja dilengkapi kepengurusan yang ditetapkan oleh Kepala Kelurahan Citangkil. Kantor Sekretariat FCU menempati salah satu ruang di Kantor Kelurahan Citangkil. FCU Bina Bahagia berperan menjalankan fungsi dengan baik sesuai cakupan tugas, melakukan pendataan potensi keluarga pionir, pemetaan masalah dan potensi keluarga plasma, memberi informasi dan rujukan keluarga plasma dengan sumber pelayanan kesejahteraan keluarga, baik aspek sosial melalui kelompok keagamaan atau rumah zakat, kesehatan melalui program BPJS dalam mekanisme jaminan kesehatan nasional (JKN) sebagai penerima bantuan iuran (PBI), pendidikan melalui Dinas Pendidikan, maupun ekonomi melalui program pemberdayaan keluarga berupa kelompok usaha bersama (Kube) fakir miskin.

Organisasi adalah syarat utama adanya manajemen, tanpa manajemen organisasi tidak ada. Philip Silznich (dalam Malayu, 2008: 26) mengemukakan, organisasi adalah suatu sistem yang dinamis yang selalu berubah dan menyesuaikan

diri dengan wahana internal dan eksternal serta selalu dalam proses evaluasi yang kontinyu. Pengorganisasian adalah fungsi manajemen dan merupakan suatu proses yang dinamis, FCU merupakan wadah pengorganisasian penyelenggaraan kesejahteraan keluarga yang di dalamnya melakukan penentuan pekerjaan yang harus dilakukan dan pembagian tugas. Dalam menjalankan organisasi, FCU ditopang SDM yang tergabung dalam kepengurusan dan keluarga pionir, struktur organisasi FCU Bina Bahagia di Kelurahan Citangkil terdiri atas penanggung jawab, koordinator, sekretaris, bendahara dan kelompok kerja.

FCU merupakan suatu organisasi yang pengurusnya berasal dari kelompok formal dan informal untuk melaksanakan tugas tertentu. Anggotanya diangkat oleh organisasi tetapi tidak harus pada setiap kasus. Sejumlah orang yang ditetapkan untuk melaksanakan setiap tugas tertentu merupakan bentuk dari kelompok formal tersebut. Di samping kelompok formal tersebut terdapat pula kelompok informal yang tumbuh dari proses interaksi, daya tarik dan kebutuhan seseorang, timbul berkembang dalam kelompok formal karena adanya beberapa anggota mempunyai nilai sama yang perlu ditularkan anggota lainnya (Miftah Thoha 1992). FCU secara kelembagaan terdiri atas kelompok formal dan informal yang saling bersinergi dan menjalankan tugas serta fungsi membangun kesejahteraan sosial keluarga. Penentuan pengurus (elemen organisasi) ditentukan dengan cara pengambilan suara terbanyak, dan kesepakatan melalui mekanisme yang telah ditentukan bersama.

Sinergi susunan pengurus tersebut di atas tergolong cukup baik, terdiri dari berbagai elemen pelayanan kesejahteraan keluarga, seperti dari aparat pemerintahan kelurahan, pekerja sosial masyarakat (PSM, keluarga pionir, kader PKK, PAUD, lembaga keagamaan dan kesehatan, pendidikan, karang taruna, tokoh masyarakat di lingkungan Kelurahan Citangkil. Pembagian tugas juga dibuat sesuai petunjuk teknis FCU, koordinator bertugas mengelola dan mengoordinir kegiatan FCU memberi bimbingan dan me-

motivasi anggota; Sekretaris bertugas membantu tugas koordinator dalam menjalankan tugas ke-sekretariatan kegiatan FCU seperti membuat surat menyurat, pencatatan, pendokumentasian dan penyusunan laporan; Bendahara bertugas membantu tugas koordinator dalam menjalankan aspek keuangan, seperti membukukan uang masuk (penerimaan), menyimpan, pengeluaran dan pertanggungjawaban keuangan kegiatan FCU; kelompok kerja (Pokja) membantu tugas koordinator dalam menjalankan kegiatan operasional kegiatan FCU seperti pendataan potensi keluarga pionir, dan masalah potensi keluarga plasma.

Keberadaan sumber daya manusia (SDM) pengurus FCU Bina Bahagia tergolong potensial, dilihat dari umur dan latar belakang pendidikan pengurus, 29 orang pengurus yang berumur antara 21- 40 tahun 11 orang (27,93 persen), 21-30 tahun 6 orang (20,58 persen), 41-50 tahun 5 orang (17,24 persen), 51-60 tahun 6 orang (20,58 persen). Sebagian besar berpendidikan SLTA, 19 orang (65,51persen), sarjana 7 orang (24,14 persen), S2 3 orang (10,34 persen). Di Kelurahan Citangkil, terdapat 7 keluarga pionir yang dijadikan contoh, bisa membimbing dan memberi konsultasi keluarga plasma agar menjadi keluarga pionir. Indikator keluarga pionir adalah keluarga yang diikat perkawinan yang sah; bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; hidup harmonis, sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal; berketahanan sosial, berwawasan nasional, dan berkontribusi kepada masyarakat, bangsa dan negara; keluarga yang mampu menyusun perencanaan sumber daya keluarga. Indikator keluarga plasma terikat dalam perkawinan yang sah, atau belum sah menurut hukum agama dan negara; takwa pada Tuhan yang Maha Esa seperti kurang taat dalam menjalankan ibadah dan nilai yang berlaku umum; keluarga kurang harmonis, belum dapat memenuhi kebutuhan dasar, jumlah anak tidak ideal; ketahanan keluarga lemah atau daya juang rendah, cepat putus asa, mudah goyah menghadapi masalah sosial, belum mampu mengatasi masalah keluarga; kurang memiliki perencanaan, tidak punya cita cita, tidak punya tabungan, tidak

mengetahui kekuatan dan kelemahan diri sendiri (Kementerian Sosial 2012).

Potensi SDM keluarga pionir dapat dilihat dari 7 kepala keluarga pionir berdasarkan umur dan pendidikan, umur 31–40 tahun 2 orang (28,57 persen), 31–50 tahun 6 orang (57,14 persen), 51–60 tahun 1 orang (14,28 persen), sedang berdasarkan pendidikan 6 orang (85,71 persen) dan sarjana 1 orang (14,29 persen). SDM keluarga pionir cukup berpotensi untuk mendampingi dan memberi contoh keluarga plasma. Administrasi kegiatan FCU cukup baik, kegiatan yang berjalan seperti pendataan dan bimbingan terhadap keluarga plasma yang tergabung dalam kelompok usaha bersama (Kube) didukung jadwal, dokumen dan catatan kegiatan sehingga mempermudah dalam proses penataan dan tertib administrasi.

Fasilitas dan finansial yang dimiliki FCU Bina Bahagia dalam rangka pelaksanaan kegiatan masih sangat terbatas, bahkan kantor atau sekretariat masih menggunakan ruang yang ada di Kelurahan Citangkil. Aktivitas FCU berjalan seirama dengan perkembangan permasalahan sosial keluarga yang semakin kompleks, memerlukan penanganan yang komprehensif dan terpadu dari seluruh elemen lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial. Kegiatan terpadu dilakukan dengan harapan untuk terwujudnya sinergi peran antarelemen lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial. FCU melakukan aktivitas identifikasi dan seleksi potensi keluarga pionir dan permasalahannya serta potensi yang dimiliki keluarga plasma, aktualisasi peran keluarga pionir melakukan pertemuan bimbingan kepada keluarga plasma, dan pemberdayaan keluarga plasma secara kelompok. Menurut sejumlah informan yang terdiri 29 pengurus orang, 7 keluarga pionir dan 4 keluarga plasma yang ditetapkan secara insidental random dapat menggambarkan bahwa aktivitas FCU dalam mengkoordinir (membangun sinergi peran) elemen penyelenggara kesejahteraan sosial dapat berjalan cukup baik.

Tabel 1
Kualitas Aktivitas FCU di Kelurahan Citangkil

No	Penilaian	Jumlah	Persen
1	Baik	3	7,50
2	Cukup baik	34	85,0
3	Kurang baik	3	7,50
<i>N</i>		40	100

Sumber: Jawaban Informan (2015)

Tabel di atas menunjukkan, bahwa 85 persen informan menyatakan kegiatan FCU dalam membangun sinergi peran lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial keluarga cukup baik. Indikator keberhasilan tersebut dilihat dari aspek administrasi yaitu terdapatnya daftar hadir dan dokumentasi, memiliki perencanaan, catatan pelaksanaan dan hasil, memiliki data (peta) keluarga pionir dan data keluarga plasma, dan keberhasilan aspek pelaksanaan kegiatan dilihat dari sinergi peran lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial keluarga dan dampaknya. Kegiatan FCU tersebut memperhatikan dan memanfaatkan potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada, serta memberi kesempatan keluarga pionir untuk dapat berjalan sesuai fungsinya, yaitu memberi contoh dan mendampingi keluarga plasma. Kekurangan atau kelemahan yang menyebabkan kurang baik (maksimal), yaitu masih kurangnya jalinan koordinasi lintas sektor dan dengan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) dan dengan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) di tingkat kota dan provinsi.

Relasi kemitraan: Kemitraan dapat diartikan persekutuan dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan, sehingga memperoleh hasil yang lebih baik. Kemitraan dilakukan oleh pihak-pihak terkait baik perorangan maupun badan hukum, atau kelompok-kelompok. pihak-pihak yang bermitra tersebut dapat memiliki status yang setara, memiliki kesamaan misi, atau misi berbeda tapi saling melengkapi secara fungsional. Jaringan kegiatan FCU memperhatikan dan memanfaatkan potensi dan sumber kesejahteraan sosial

yang ada, jaringan kerja yang ditumbuhkan dalam membangun sinergi antara lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial keluarga di FCU, yaitu sebagai pusat jaringan kegiatan di provinsi ataupun kota adalah lembaga Konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3), sedang sebagai fasilitator tingkat kecamatan adalah tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), yang mendayagunakan keluarga pionir di tingkat desa/kelurahan. Dari hasil pantauan di lapangan, lemahnya koordinasi dengan TKSK dan LK3 dan ke Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), dikarenakan belum terbangunnya sinergi yang baik, yaitu saling menunggu dalam arti bahwa tidak ada laporan atau rujukan dari kelurahan, FCU dipandang tidak ada permasalahan terkait kesejahteraan keluarga di desa dan kelurahan.

Sinergi Peran Berdasarkan Analisis SWOPA: Penelitian kebijakan pada dasarnya melakukan evaluasi program, dan sifatnya spesifik sesuai kebijakan yang diimplementasikan. Tujuan evaluasi untuk mengetahui capaian (Situmorang, 2005). Deardoff dan Williams (2006) menyebut, bahwa untuk mendapatkan sinergi diperlukan penguatan, yaitu sebuah proses interaksi dari dua atau lebih agen atau kekuatan yang menghasilkan pengaruh gabungan lebih besar dibandingkan jumlah dari pengaruh mereka secara individu. Berpangkal tolak dari pengertian ini, kajian SWOPA difokuskan pada capaian sinergi peran elemen lembaga penyelenggaraan kesejahteraan keluarga.

Peran diartikan oleh beberapa ahli (dalam E. Supiandi, 2014), sebagai seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem, peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Merton (1968) menyebut, peran dengan istilah *role set* artinya seperangkat peran, yang oleh Horton dan Hunt (1993) disebut *role*, merupakan perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status. Kozier Barbara (1995) menyebut, peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi tertentu. Abu Ahmadi (1982) menyebut, peran sebagai

suatu kompleksitas pengharapan dari manusia terhadap caranya individu harus berharap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsinya.

Dari pendapat ahli tersebut, sinergi peran elemen lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial keluarga melalui FCU adalah menggiatkan (menyinerigikan) seperangkat tindakan dan instrumen atau aksi berupa penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pelaksanaannya dilakukan secara bersama-sama dengan menjalin koordinasi antarlembaga penyelenggaraan program kesejahteraan sosial keluarga, dan terpusat melalui FCU, serta memiliki tujuan sama menyelenggarakan aktivitas usaha kesejahteraan keluarga plasma.

Penilaian berdasarkan SWOPA: Kekuatan (S), legalitas dan organisasi FCU merupakan kekuatan dalam membangun sinergi peran, dengan telah terbentuknya kelompok kerja (Pokja) yang terdiri dari berbagai kelembagaan yang terdiri dari unsur aparat dan kader pemerintahan Kelurahan Citangkil, PSM, keluarga pionir, pendidik, karang taruna, PKK, dan organisasi keagamaan, kesehatan/bidan, PAUD, serta tokoh masyarakat merupakan kekuatan yang potensial dalam membangun sinergi peran lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial keluarga. Kelemahan (W), FCU terletak pada belum semua anggota paham tentang usaha kesejahteraan keluarga dan tata kelola organisasi, karena belum memiliki pengalaman ataupun mengikuti bimbingan teknis tentang organisasi dan usaha kesejahteraan keluarga. Dimensi sosial masih dimaknai sebagai sebuah upaya bantuan sosial dan materi semata, tanpa melihat lebih jauh substansi hakikat pemberdayaan dan penguatan peran keluarga. Hal tersebut menjadikan belum optimalnya upaya membangun cita-cita mengentaskan keluarga plasma menuju proses perubahan menjadi keluarga pionir.

Peluang (O), dengan adanya sosialisasi dan ujicoba model pemberdayaan kesejahteraan sosial melalui FCU di Kelurahan Citangkil merupakan peluang untuk membangun sinergi lembaga kesejahteraan sosial keluarga, yang diperlukan

dan menjadikan peluang untuk menyolidkan sistem kerjasama dan koordinasi terhadap peran dan tugas masing-masing sesuai dengan proporsionalitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Problem (P), pembentukan FCU sebagai wadah aliansi usaha kesejahteraan sosial keluarga di tingkat desa/kelurahan menuai berbagai isu permasalahan berupa: kegiatan belum didukung data yang valid, lemahnya koordinasi, komitmen dan jejaring kemitraan antarpengelolaan kesejahteraan keluarga; kuantitas dan kualitas keluarga pionir dalam menjalankan fungsi pembinaan keluarga plasma masih terbatas; dan keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki untuk mengadakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.

Aksi (A), yang ditempuh FCU dalam membangun sinergi peran elemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial keluarga, dengan strategi menggunakan kekuatan kepengurusan yang ada dan memanfaatkan peluang atau kesempatan dijadikannya Kelurahan Citangkil sebagai lokasi uji coba dan sosialisasi pemberdayaan FCU digunakan untuk mengatasi kelemahan, dan problem yang dihadapi. Aksi terdiri kegiatan identifikasi/pendataan masalah dengan membangun jalinan koordinasi; menumbuhkan fungsi keluarga pionir melalui peningkatan aktualisasi peran keluarga pionir dan pemberdayaan keluarga plasma dengan meningkatkan kerjasama. Kajian efektifitas aksi dalam membangun sinergi peran elemen lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial keluarga menggunakan tabel analisis kebijakan model Harry Hikmat (2006) dapat dilihat pada tabel 2.

Berdasarkan kriteria efektivitas, ternyata jalinan koordinasi lintas sektor dalam melakukan identifikasi masalah belum maksimal, dalam hal menumbuhkan fungsi keluarga pionir melalui peningkatan aktualisasi peran keluarga pionir juga belum maksimal, efektivitas kerjasama dalam penyelenggaraan pemberdayaan keluarga plasma baru yang dengan lembaga pemerintah, yaitu dengan Dinas Sosial Kota Cilegon, dan Kelurahan Citangkil mengadakan pemberdayaan keluarga fakir miskin melalui kelompok usaha bersama (Kube), jumlah sasaran 8 kelompok x 5 orang = 40 orang (RTS); bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dinas Sosial Kota Cilegon dan BKM Kelurahan Citangkil melakukan pemberdayaan 20 keluarga plasma merehabilitasi menjadi Rutilahu (rumah tinggal layak huni) yang ditempati hingga menjadi layak huni; TKSK bekerja sama dengan LK3 mendampingi, memberi konsultasi dan merujuk penyandang masalah psikologis anak tidak sekolah dengan dinas pendidikan, sedang masalah kesehatan dengan pihak terkait kesehatan sudah tercover dengan program BPJS Kesehatan.

Penilaian Dampak terhadap Penyelenggaraan FCU: Pengukuran terhadap keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui FCU berdampak pada beberapa dimensi. Dimensi yang linier dengan FCU ini adalah pada sosial, ekonomi, psikologi dan lingkungan hidup atau masyarakat setempat dalam lingkungannya. Secara umum pada masing-masing dimensi akan memiliki sisi positif dan negatif terhadap penyelenggaraan FCU. Tabel 3 berikut gambaran mengenai dampak penyelenggara kesejahteraan

Tabel 2
Efektifitas Membangun Sinergi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Keluarga

Kriteria	Aksi		
	Melakukan identifikasi masalah dengan membangun jalinan koordinasi	Menumbuhkan fungsi keluarga pionir melalui peningkatan aktualisasi peran keluarga pionir	Pemberdayaan keluarga plasma dengan meningkatkan kerjasama
Efektivitas	Koordinasi lintas sektor	Menumbuhkan fungsi keluarga pionir melalui peningkatan aktualisasi peran keluarga pionir	Menjalin hubungan efektif dengan lembaga pemerintah

Sumber: Hasil Observasi (2015)

sosial dari proses sinergi peran elemen penyelenggara kesejahteraan sosial keluarga.

Sesuai uraian pada tabel 3 dapat dianalisis, bahwa dengan adanya sinergi peran lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial, ternyata banyak dampak positif daripada negatifnya. Pendapat Covey (2011) mengartikan, sinergi sebagai kombinasi bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar daripada dikerjakan sendiri-sendiri, gabungan beberapa unsur menghasilkan suatu produk yang lebih unggul. Covey menambahkan, sinergi mudah terjadi apabila komponen-komponen yang ada mampu berpikir sinergi, terjadi kesamaan pandang dan saling menghargai. Berdasarkan pendapat Covey dan analisis SWOPA (memahami kekuatan, kelemahan, peluang, problem serta aksi FCU) dalam membangun sinergi peran elemen lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial, alternatif kebijakan yang perlu dimantapkan diseleksi dan dinilai hasil berdasarkan

Urgency, Seriouness, Growth (USG). Hasil seleksi dan penilaian aksi tertera dapat dilihat pada tabel 4.

Pada tabel 4 penilaian aksi kebijakan pembentukan FCU untuk membangun sinergi peran berdasarkan USG, diketahui ranking prioritas program (upaya) pemantapan sinergi peran lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial keluarga melalui, memantapkan jalinan koordinasi dalam identifikasi masalah, memantapkan kerjasama dalam melakukan pemberdayaan keluarga plasma dan memantapkan peningkatan aktualisasi peran keluarga pionir. Berdasarkan aspek teori, sinergi peran lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial yang dibangun oleh FCU akan memantapkan koordinasi, kerjasama dan aktualisasi peran sehingga menghasilkan capaian aktivitas tujuan pembentukan FCU yang cukup baik dibanding jika tidak dilakukan sinergi. Secara empirik terlihat tumbuhnya keluarga pionir yang berdampak positif dalam mendampingi

Tabel 3
Dampak Sosial Sinergi Peran Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Keluarga dalam FCU

No	Parameter	Dampak	
		Positif	Negatif
1	Ekonomi	Keluarga plasma yang tergabung dalam kelompok usaha Kube fakir miskin (40 orang) dimungkinkan memiliki sumber pendapatan ekonomi keluarga	Ada kecenderungan timbulnya kecemburuan masyarakat yang belum tertangani program Kube
2	Sosial	Tumbuh kerjasama	Terdapat kecenderungan ketergantungan pada bantuan
3	Psikologi	Tumbuh kemandirian usaha	Belum diketahui
4	Lingkungan hidup	Program rehabilitasi rumah tidak layak huni yang ditangani secara terpadu menjadikan 20 rumah dan lingkungan menjadi baik atau layak huni	Belum diketahui

Sumber: Hasil Wawancara (2015)

Tabel 4
Penilaian Aksi Kebijakan Pembentukan FCU Berdasarkan USG

Alternatif Kebijakan	U	S	G	Jumlah Nilai	Rata-Rata
Perlu memantapkan jalinan koordinasi dalam identifikasi/pendataan masalah	4	4	4	12	1
Perlu memantapkan peningkatan aktualisasi peran keluarga pionir	4	3	3	10	3
Perlu memantapkan kerjasama dalam melakukan pemberdayaan	4	3	4	11	2

Keterangan: 1=kurang baik; 2=sedang; 3 = cukup baik; 4= baik

keluarga plasma, walaupun belum maksimal mampu berupaya mengatasi problem dan tantangan serta mendayagunakan kekuatan dan peluang FCU dalam membangun kesejahteraan sosial keluarga plasma di Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon.

D. Penutup

Kesimpulan: sinergi peran lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial masih terbatas pada bentuk pembagian peran sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pada aspek kekuatan berupa dukungan kelompok kerja yang tergabung dalam FCU yang terdiri atas lembaga lokal dan formal memperkuat daya juang FCU pada level kelembagaan. Pada aspek peluang masih dimungkinkan kegiatan ujicoba dan sosialisasi program FCU, sehingga memperbesar peran dari masing lembaga sosial yang ada untuk bersinergi dan berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kelemahan yang dimiliki FCU terdapat pada masih lemahnya fungsi koordinasi dan pembagian peran kerja, sehingga kurang terdapat sinergi dalam implementasinya, terutama pada penjangkaran keluarga plasma yang perlu diberdayakan oleh keluarga pionir. Pada level aksi, elemen lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial melalui ujicoba dan sosialisasi program FCU dapat berperan dan dijadikan kerangka acuan untuk membangun aliansi taktis dari berbagai elemen lembaga yang ada dalam membagi peran dan bekerjasama secara maksimal. Beberapa program aksi telah dapat dilakukan oleh pengurus FCU Bina Bahagia, dan memberi dampak ekonomi, sosial, psikologi dan lingkungan.

Implikasi Model dan Rekomendasi: Menurut Deardoff dan Williams (2006), bahwa untuk mendapatkan sinergi diperlukan penguatan, yaitu proses interaksi dua atau lebih agen yang menghasilkan pengaruh gabungan lebih besar dibandingkan dilakukan secara individu. Covey (2011) mengemukakan, bahwa gabungan beberapa unsur menghasilkan suatu produk yang lebih unggul, apabila elemen-elemen saling bersinergi. Berdasarkan fakta empirik hasil

penelitian melalui analisis SWOPA menggambarkan, bahwa FCU Bina Bahagia di Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon melalui aksinya membangun sinergi peran penyelenggara kesejahteraan sosial keluarga dapat menghasilkan dampak positif berupa keluarga plasma yang tergabung dalam kelompok Kube fakir miskin dimungkinkan memiliki sumber pendapatan ekonomi, tumbuh kerjasama, kemandirian usaha, dan dengan adanya program rehabilitasi rumah tidak layak huni yang dibangun secara terpadu menjadi rumah tinggal layak huni (Rutilahu). Proses yang ditempuh FCU dengan membangun kekuatan interaksi pengurus, lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial keluarga, memanfaatkan kerjasama mengatasi problem lemahnya koordinasi, serta melakukan optimalisasi proses perubahan keluarga plasma menjadi keluarga pionir. Penelitian ini meneguhkan pendapat Deardoff (2006) dan Covey (2011), bahwa dengan sinergi peran penyelenggara kesejahteraan sosial dapat dihasilkan keluaran (produk) yang lebih baik dalam bentuk: tumbuh peran lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial dalam mewujudkan program FCU, sehingga lembaga yang tergabung dalam FCU perlu meningkatkan peranannya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sinergi peran tersebut perlu ditumbuhkembangkan dalam lingkup kesejahteraan keluarga. Dari hasil analisis yang dilakukan, elemen penyelenggara kesejahteraan sosial keluarga baik pemerintah maupun masyarakat perlu meningkatkan koordinasi, kerjasama dan kemitraan secara terpadu, guna meningkatkan kesejahteraan sosial keluarga plasma.

Sinergi peran lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial FCU di Kelurahan Citangkil sudah dapat berjalan cukup baik, yang masih perlu penyempurnaan adalah pendataan dan pemetaan masalah yang dihadapi keluarga plasma. Peran sinergi lembaga perlu ditingkatkan dengan melakukan pemantapan kerjasama dalam pemberdayaan keluarga plasma, sehingga tumbuh keterlibatannya dalam pembangunan masyarakat, sehingga tumbuh sinergi peran keluarga pionir sebagai advokator. Peran setidaknya

mampu memberikan advokasi sosial bagi keluarga plasma, dan secara langsung menunjukkan bahwa program FCU telah bersentuhan dengan kehidupan praktis keluarga plasma.

Wujud sinergi peran penyelenggara kesejahteraan sosial bagi keluarga plasma tersebut perlu mengedepankan pendataan dan pemetaan masalah sosial yang dihadapi keluarga plasma, yaitu dengan menjalin komunikasi dan koordinasi. Aktualisasi peran keluarga pionir sangat diperlukan untuk mendukung keluarga plasma dalam menyelami kehidupan bermasyarakat, sehingga mampu mengimbangi dinamika sosial masyarakat. Peran lembaga penyelenggara kesejahteraan keluarga dinilai cukup baik, tetapi fungsi dan peran keluarga pionir di masyarakat perlu dimaksimalkan, karena lemahnya koordinasi keluarga pionir dengan pemerintah Kota Cilegon, Kecamatan Citangkil, maupun di lingkungan Kelurahan Citangkil dengan segenap perangkatnya.

Berdasarkan hasil analisis sinergi peran lembaga penyelenggara kesejahteraan keluarga, direkomendasikan tiga agenda aksi. Pertama, perlunya jalinan koordinasi dalam melakukan pendataan masalah. Kedua memantapkan kerjasama dalam melakukan pemberdayaan. Ketiga memantapkan aktualisasi peran keluarga pionir. Sesuai tiga rekomendasi dimaksud perlu tindak lanjut pemangku kepentingan, yaitu Kementerian Sosial, melalui Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat, agar hasil ujicoba aktualisasi FCU yang menunjukkan hasil cukup baik dalam melakukan pemberdayaan keluarga plasma, masih dipandang perlu dilakukan replikasi model ke beberapa daerah perkotaan dan perdesaan di Indonesia.

Pustaka Acuan

- Abu, Ahmadi. (1982). *Psikologi Sosial*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Arikunto Suharsimi. (2000). *Manajemen Penelitian*. Rineka Cipta Jakarta.
- Barbara, Koezeir. (1995). *Fundamental of Nursing*. Philadelphia Addison Wesley publishing Division. <https://www.scribd.com>.
- Covey, S.R. (2011). *The 7 Habits of Highly Effective People*. Review. Free Press
- Dale S. Deardorff DM dan Greg Williams. (2006). *Synergy Leadership in Quantum Organizations*. Fesserdorff Consultants.
- Edi Suharto. (2011). *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*. Cetakan ke III, Bandung Alfabeta.
- Harry Hikmat dan Tim Sosial Policy Studies. (2006). *Pedoman Analisis Kebijakan Sosial*. Jakarta: Kementerian Sosial–UI.
- Paul B. Horton dan Chester L. Hunt. (1993). *Sosiologi*. Terjemahan Aminuddin Ram dan Tita Sobari. Jakarta: Erlangga
- Irawan Suhartono. (1995). *Metode Penelitian Sosial, Suatu Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial lainnya*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Kementerian Sosial. (2011). *Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)*. Jakarta: Pusat data dan Informasi Kesejahteraan Sosial.
- _____. (2012). *Pedoman Uji Coba Model Sinergi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Berbasis Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, dan Model Pemberdayaan Keluarga Melalui Family Care Unit (FCU)*. Jakarta. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Direktorat Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial.
- Merton R K. (1968). *Social theory and social structure*. New York: Free Press.
- Nasution. (2006). *Berbagai Pendekatan Dalam Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nusa Putra dan Hendarman. (2012). *Metodologi Penelitian Kebijakan*. Bandung: Remaja Rosdakarta.
- Situmorang H Chazali. (2012). “Kebijakan Sosial Nasional tentang Pekerjaan Sosial: Studi Evaluasi tentang Implementasi Kebijakan Pekerja Sosial Pemerintah Pusat dan Daerah”. Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol II 391-411 2012 Yogyakarta. B2P3KS.
- Thoha, Miftah. (1992). *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Rajawali Pres.

Tindakan Warga Merapi Pascaerupsi Menjaga Daerah Tangkapan Air *Post-disaster Act of Merapi Community to Keep Water Catchment Area*

Napsiah

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Program Studi Sosiologi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
HP. 081369632144. Email: napsiah@uin-suka.ac.id.

Diterima 30 Agustus 2016, diperbaiki 16 September 2016, disetujui 7 Oktober 2016.

Abstract

The spring coming from Mount Merapi is the main source of life for local residents, protecting the environment of Merapi is the main actions performed by the residents who live in the area. This study aims to know what Merapi community action to protect the environment. Data were collected by interviewing selected informants using the purposed sampling method who involved and knew the research topic and issues. There were three groups of informants who have subsequently interviewed by snowball sampling method. Non-participant observation was also conducted to triangulate data obtained from interview. The secondary data (through docementary analysis) was used to strengthen the primary data (interview and observation). The results showed that the action based on local value dialogue and mutual agreement in fact couldn't stop exessive sand mining and exploitation on the slope of Merapi Mountain, it damaged water catchment area. The colective social action called "Bela Lereng Merapi" then done to stop the exessive mining, they overcomesucessfully.

Keywords: *action; colective, citizen, environment.*

Abstrak

Air yang berasal dari Gunung Merapi merupakan sumber penghidupan bagi warga yang bermukim di sekitarnya, menjaga lingkungan tangkapan air Gunung Merapi merupakan tindakan utama. Penelitian ini bertujuan mengetahui tindakan apa yang dilakukan oleh warga Merapi untuk menjaga lingkungan tangkapan air. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, informan dipilih secara *purposed sampling method* yang dianggap mengetahui, terlibat, dan menguasai informasi yang berkaitan dengan topik dan masalah penelitian. Dari tiga kelompok informan yang dipilih, selanjutnya diwawancarai secara *snowball*. Teknik observasi non partisipan juga dilakukan untuk melakukan triangulasi data dari wawancara. Data sekunder (dari telaah dokumen) digunakan untuk memperkuat data yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan nilai (musyawarah) yang dilakukan warga Merapi tidak dapat menghentikan aktivitas penambangan pasir secara berlebihan, sehingga merusak lingkungan tangkapan air. Namun tindakan kolektif yang "Bela Lereng Merapi" menjadi aksi sosial warga Merapi yang mampu menghentikan kerusakan lingkungan.

Kata kunci: *tindakan; kolektif; warga; lingkungan.*

A. Pendahuluan

Kebergantungan warga pada sumber alam pegunungan sangat tinggi, karena pegunungan menyediakan beragam potensi, salah satunya adalah debit air yang tinggi (Carey, 2005) yang dapat dimanfaatkan untuk sumber penghidupan, baik bagi warga yang bermukim di lerengnya gunung maupun yang bermukim jauh dari lereng gunung (Indrayana, 2010), beragam cara dilakukan pemerintah, salah satunya membuat regulasi

tentang pengelolaan alam dan lingkungan, diimplementasikan dalam Undang-undang RI No 23 tahun 1979, pasal 1 ayat 2 yang berbunyi: pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.

Warga juga memiliki cara atau kearifan lokal untuk menjaga lingkungan. Keraf (2006) mengemukakan, kearifan lokal memuat tentang pengetahuan, keyakinan, pemahaman, wawasan, adat kebiasaan, atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan komunitas ekologis. Semua bentuk kearifan lokal dihayati, dipraktikkan, diajarkan, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Kearifan lokal menjadi hal penting untuk menjaga lingkungan sekali pun bersifat tradisional, tetapi berguna untuk konservasi lingkungan (Hamid dan Jahja, 2016; Fischer, 2006). Beberapa studi yang mengupayakan konservasi lingkungan dengan menggunakan kearifan lokal terdapat dalam studi Suhartini (2009) yang mengkaji tentang kearifan lokal untuk mengelola sumber daya alam dan lingkungan. Hal yang sama juga dilakukan oleh Triyoga (2010) yang mengkaji kearifan lokal masyarakat Merapi. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Qodir (2012) mengkaji tentang kearifan lokal masyarakat Merapi.

Berbeda dengan studi-studi di atas, Malik (2012) mengkaji tentang perayaan “maulid hijau” di lereng Gunung Lamongan. Aksi yang dilakukan warga adalah menanam pohon di lingkungan Gunung Lamongan setiap perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Harapan dari tindakan itu agar hutan di sekitar Gunung Lamongan terjaga, karena warga yang bermukim di sekitarnya sangat bergantung dengan sumber daya alam pengunungan. Khasanah dan Marfai (2012) mengkaji tentang kemampuan adaptasi masyarakat pesisir dari banjir dan tsunami.

Sintesis dari penelitian tersebut adalah kearifan lokal yang berisi larangan dan anjuran telah terbukti secara turun menurun menjadi salah satu strategi masyarakat mengadaptasi diri mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, sehingga lingkungan tidak rusak. Apabila terdapat warga yang melanggar, mereka memperoleh sanksi berupa ketidaknyamanan hidup karena dikucilkan oleh masyarakat.

Upaya warga untuk menjaga lingkungan tidak terbatas pada melakukan praktik-praktik yang tertuang di dalam kearifan lokal saja,

tetapi ada cara yang lebih bersifat tegas dengan menggunakan aksi perlawanan pada pihak-pihak yang memanfaatkan sumber daya alam. Hal ini terungkap dalam Gerakan Cipko atau gerakan memeluk pohon. Menurut Tain (1984), gerakan ini dilakukan agar hutan tidak ditebangi karena merupakan sumber air dan penghidupan warga. Aksi lainnya juga dilakukan di Afrika Utara dan Zimbabwe untuk mengakses sumber air keperluan rumah tangga, yang terungkap dalam penelitian Manzungu (2013). Sintesis dari penelitian tersebut, aksi sosial warga dilakukan sebagai bentuk protes warga terhadap pemanfaatan lingkungan dan sumber daya alam yang berlebihan, sehingga dampak dari aktivitas tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan tempat tinggal mereka.

Penelitian tentang aksi sosial warga yang dirujuk di atas berasal dari penelitian asing yang terjadi di luar negeri, sementara penelitian aksi-aksi warga yang bersifat protes dilakukan di dalam negeri masih terbatas, khususnya di lingkungan masyarakat Merapi, suku Jawa yang lebih mengedepankan kearifan lokal untuk menjaga lingkungannya. Kajian ini penting dilakukan agar tindakan warga yang menggunakan aksi sosial dapat dipahami secara komprehensif, tidak dimaknai konflik semata. Menurut Mcdonald (2010), aksi lokal bukan semata-mata konflik, melainkan upaya warga untuk mempertahankan lingkungannya saat pihak lain memanfaatkan potensi alam yang berlebihan, sehingga dapat merusak sumber daya alam lainnya. Menurut Mcdonald, tindakan aksi tersebut dilakukan bukan tanpa proses menuju jalan damai, seperti ada perundingan sebelum dilakukan aksi, melainkan respons dari pemerintah sering tidak berpihak kepada warga, sehingga tindakan aksi menjadi pilihan warga.

Sebelumnya, Weber (1978) menyatakan, tindakan lokal seperti yang diungkap Mcdonal (2010) adalah tindakan rasionalitas karena ada makna di balik tindakan tersebut. Rasional atau irasional sangat bergantung pada yang melakukan tindakan. Weber mengklasifikasikan tindakan rasional ke dalam tindakan instrumen dan

tindakan rasional nilai. Tindakan nilai bersifat abstrak karena berdasarkan nilai yang diyakini, sehingga tindakan dijadikan sarana untuk mencapai tindakan instrumen yang merupakan tindakan konkrit. Weber memandang, nilai agama menjadi spirit pijakan untuk mencapai dasar etos kerja yang tinggi. Menurut Weber, bahwa tindakan rasionalitas nilai dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuannya yakni menjaga lingkungannya, sekalipun tindakan-tindakan tersebut dilakukan dengan menggunakan aksi kolektif.

Aksi kolektif yang dilakukan oleh warga Merapi pascaerupsi adalah upaya untuk membatasi pemanfaatan sumber daya alam berupa pasir, pascaerupsi 2010. Pemanfaatan sumber daya penting dilakukan oleh warga Merapi karena erupsi terakhir mengeluarkan pasir 140.000.000 m³ yang tersebar ke Sungai Gendol, Opak, Kuning, dan di lahan-lahan warga (BPBD Sleman, 2011). Apabila sebaran pasir di lahan-lahan warga yang merupakan tempat tangkapan air dilakukan penggalian pasir dengan menggunakan alat-alat berat, bahkan mencapai kedalaman 25 m, sumber tangkapan air menjadi rusak dan kering, padahal air tersebut adalah sumber penghidupan warga Merapi. Tulisan ini bertujuan mengetahui tindakan-tindakan warga untuk menyelamatkan lingkungan tangkapan air pascaerupsi dari kerusakan yang diakibatkan oleh aktivitas penambangan pasir.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, untuk mengungkap tindakan warga menyelamatkan lingkungan tangkapan air. Pengumpulan data dilakukan dengan: Pertama, wawancara, dengan menggunakan *purposeful sampling method* (metode sampling bertujuan) dengan memilih orang yang dinilai mengetahui, terlibat, dan menguasai informasi yang berkaitan dengan topik dan masalah penelitian (Patton, 1990). Informan dalam penelitian ini adalah mereka yang mengetahui informasi yang dibutuhkan terkait dengan penelitian ini, yang dibedakan dalam tiga kate-

gori: pihak yang memiliki hubungan kedekatan dengan masyarakat, sehingga memiliki informasi mengenai tindakan kolektif lokal yang terjadi. Informan yang termasuk ke dalam kelompok ini meliputi Camat dan sekretaris Kecamatan Pakem dan Turi, Kabupaten Sleman; Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun. Tokoh-tokoh informal, seperti tokoh agama, pemuda, masyarakat. Pihak yang terlibat dalam proses aktivitas penambangan pasir.

Berdasarkan tiga kelompok informan di atas, penentuan jumlah informan dilakukan dengan cara *snowball sampling* (Groenewald, 2004), wawancara dengan informan dihentikan apabila tujuan penelitian telah diperoleh. Kedua, teknik observasi dilakukan secara non partisipan, untuk menggali data yang tidak dapat diungkap pada saat wawancara. Data sekunder juga digunakan untuk melengkapi data yang dibutuhkan, diperoleh dari arsip kantor kecamatan dan kelurahan, catatan pemimpin lokal, penelitian terdahulu, surat kabar, majalah dan beberapa jurnal serta surat kabar lokal.

Pengumpulan data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan yang hasilnya dibuatkan transkrip hasil wawancara, hasil observasi digunakan untuk triangulasi atas hasil wawancara. Data sekunder yang diperoleh dari laporan kelurahan menjadi sumber pendukung untuk memperkuat data primer. Analisis dilakukan dengan teknik kualitatif, mengikuti model yang dikembangkan oleh Huberman dan Miles, 1984 (*dalam* Denzin dan Lincoln, 1994), yang dikenal dengan interaksi. Model ini dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data yang sudah teranalisis, dan penarikan kesimpulan.

C. Tindakan Warga Merapi menjaga Daerah Resapan Air

Kebergantungan Sumber Air Gunung Merapi: Sumber mata air di Gunung Merapi memiliki tiga karakter. Bagian paling atas memiliki 82 titik umbul, bagian tengah memiliki 82 titik umbul, dan bagian bawah memiliki 32 umbul. Dengan tiga karakter sumber mata air tersebut

warga Merapi memiliki sumber cadangan air berlimpah, hingga mencapai 129.000.000 m³ setiap tahunnya (Indrayana, 2011 dikutip Nap-siah, 2015). Sumber mata air Gunung Merapi, dimanfaatkan warga pascaerupsi untuk keperluan sehari-hari, seperti mencuci, mandi, dan minum. Sumber mata air Merapi juga digunakan warga untuk irigasi sawah dan kolam ikan. Sumber mata air tersebut berasal dari Kali Bebeng, dengan debit 1.238 liter per detik; Kali Kuning dan Kali Boyong, dengan debit sekitar 800-1.000 liter per detik. Ketersediaan air pada tiga sungai di lingkungan Merapi, terutama daerah bagian selatan gunung, tidak pernah kekurangan air sekalipun musim kemarau.

Daerah lereng selatan Merapi tidak pernah dilanda banjir karena terdapat sarana dan prasarana yang memadai untuk mengalirkan sumber mata air tersebut, disebabkan kondisi Gunung Merapi secara topografi dengan ketinggian antara 750-1.500 meter di atas permukaan laut derajat kemiringan berkisar antara 120°-300° menjadi daerah tangkapan air. Daerah tersebut merupakan daerah terluas di kawasan hutan Gunung Merapi yang menjadi daerah pelepasan air, kemudian menjadi sumber mata air dengan kedalaman antara 5-10 m, terdapat juga sumber mata air yang berpola radier (menjari) dengan aliran ke arah selatan dan barat.

Masyarakat Yogyakarta dan Jawa Tengah tidak akan kehabisan sumber air bersih, sekalipun pada saat musim kemarau yang panjang, sehingga Gunung Merapi dijuluki “jantung atau nyawa Yogyakarta”. Warga yang bermukim di sekitarnya pascaerupsi berupaya menjaga dengan cara tidak berlebihan mengelola sumber air Gunung Merapi, sebab beragam potensi Merapi yang lain dapat dijadikan sumber penghidupan warga. Berbagai tindakan warga Merapi menjaga daerah tangkapan air pascaerupsi seperti, tidak menebang pohon, tidak mencari rumput di tempat-tempat yang dianggap terlarang oleh warga Merapi. Mereka juga tidak mengotori air sungai di lingkungan Merapi. Bentuk larangan tersebut telah lama disepakati oleh warga Merapi, bahkan telah menjadi kearifan lokal. Pelanggar akan

mendapat sanksi sosial berupa pengucilan, sehingga pelanggar tidak tenang hidupnya. Sistem nilai yang dianut warga Merapi, yaitu menjaga kehormatan dengan alam telah menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan, sehingga apabila ada pihak yang mengelola sumber daya Gunung Merapi secara berlebihan, warga pascaerupsi berupaya untuk menyelamatkan lingkungannya, sekalipun dengan menggunakan aksi-aksi sebagai bentuk penolakan.

Aksi Kolektif “Bela Lereng Merapi”: Kerusakan lingkungan tangkapan air pascaerupsi adalah isu yang dibawa oleh aksi kolektif warga Merapi, karena ada aktivitas penambangan pasir yang menggunakan alat berat yang mencapai kedalaman 25 m di lingkungan tangkapan air. Akibat aktivitas penambangan pasir tersebut, air sumur warga pascaerupsi berkurang. Meskipun belum terjadi kelangkaan air bersih, tetapi warga mengantisipasi sejak dini terhadap kelangkaan air bersih, sebab sebelumnya warga belum pernah mengalami kekurangan air seperti yang dialami mereka saat ada penambangan pasir pascaerupsi di lingkungan tangkapan air. Warga berupaya mengantisipasi kerusakan lingkungan tangkapan air bersih pascaerupsi dengan menggunakan tindakan lokal, baik yang dilakukan secara mandiri maupun kolektif. Uraian berikut menggambarkan tindakan kolektif warga Merapi pada pascaerupsi yang dimanifestasikan dalam bentuk aksi-aksi menentang penambangan pasir yang menggunakan alat berat.

Sejak pagi hari jalan pertigaan Candi Desa Purwobinangun dipadati oleh warga yang jumlahnya kurang lebih 300 orang. Mereka terdiri dari laki-laki dan perempuan, baik muda maupun tua, berasal dari tiga desa yang berada di sekitar Gunung Merapi, Desa Purwobinangun, Girkerta dan Wonokerto. Dengan menggunakan ikat kepala bertulisan “Bela Lereng Merapi” mereka menyampaikan sikap penolakan terhadap penambangan pasir yang menggunakan alat berat, melalui orasi yang dipimpin oleh seorang ketua. Aksi kolektif lokal tersebut tampaknya berhasil menghentikan aktivitas penambangan pasir dengan menggunakan alat berat. Satu demi

satu alat angkut pasir berupa truk pasir turun tanpa membawa pasir di dalam truk mereka, alat berat juga diturunkan dari lereng Merapi, aksi berlangsung sampai malam dini hari hari karena alat-alat berat tidak mudah diturunkan.

Aksi kolektif warga Merapi berlangsung sampai semua alat berat diturunkan (jumlahnya 19 buah), mereka menunggu di pertigaan Jalan Candi, walaupun berlangsung sampai larut malam, tetapi tidak terjadi aksi kekerasan antara warga dengan penambang pasir. Aksi kolektif warga Merapi tidak saja disampaikan melalui orasi, tetapi juga disampaikan melalui spanduk. Awalnya spanduk tersebut dipegang oleh anggota, tetapi kemudian di pasang di jalan-jalan sekitar jalan Candi. Tulisan-tulisan di spanduk tersebut berisi penolakan yang keras terhadap penambangan pasir yang menggunakan alat berat. Aksi kolektif warga Merapi juga dilakukan dengan cara memblokir Jalan Candi, yang merupakan jalan satu-satunya menghubungkan ke arena pertambangan pasir. Jalan di tutup dengan pohon kelapa yang mereka dapatkan di sekitar Jalan Candi.

Jalan yang semula telah berlubang karena dilalui truk pengangkut pasir, semakin diperdalam bahkan ditumpuki daun-daun serta pohon-pohon, sehingga tidak bisa dilalui oleh truk-truk pengangkut pasir. Aksi berlangsung selama tiga hari, setiap dan sore hari, warga mengantarkan anak sekolah menggunakan sepeda motor melewati jalan yang diblokir oleh warga. Kondisi Jalan Candi kemudian tidak tampak kendaraan berlalu lalang, aktivitas warga tidak berjalan seperti biasanya, tidak ada mediasi antara warga dengan aparat. Warga benar-benar tidak mau diajak untuk musyawarah mufakat karena merasa aparat tidak merespons persoalan mereka. Warga merasa selalu dijanjikan tetapi tidak pernah ditindaklanjuti oleh pihak-pihak berwenang. Meskipun tidak ada mediasi, tetapi sekitar 100 m dari aksi kolektif warga Merapi tampak aparat keamanan melakukan penjagaan ketat.

Setelah dipastikan alat berat sudah turun dan alat pengangkut pasir tidak ada lagi, aksi kolektif dihentikan. Jalan dibuka kembali dan pohon-

pohon yang digunakan untuk memblokir jalan disingkirkan, tetapi warga yang bermukim di sekitar Jalan Candi tetap waspada. Mereka masih berjaga-jaga di lingkungan tempat tinggal dan di sekitar arena pertambangan untuk mengantisipasi muncul hal-hal yang tidak diinginkan setelah aksi kolektif lokal. Meskipun penambangan pasir telah dihentikan, tetapi warga masih merasa bahwa debit air sumur tetap berkurang, terlebih lagi saat musim kemarau, tetapi bagi warga yang kekurangan air sumur akan kembali normal apabila tidak ada penambangan pasir yang menggunakan alat-alat berat di lingkungan tangkapan air.

Melapor pada Aparat setempat: Tindakan warga Merapi membentuk aksi-aksi kolektif tersebut merupakan akumulasi dari tindakan warga yang telah berupaya melakukan tindakan musyawarah dan mufakat dengan aparat setempat. Mereka sudah berulang kali menyampaikan permohonan kepada aparat dan pemerintah setempat agar ada aturan penambangan pasir yang tidak berlebihan, tetapi pengaduan tersebut di-respons saja tanpa ada tindakan lanjut. Tindakan menghubungi aparat setempat yang dilakukan oleh warga Merapi melalui perwakilan. Kepala desa dan jajarannya mendatangi aparat setempat untuk meminta pertimbangan agar ada regulasi yang tegas terkait dengan adanya penambangan pasir. Hal ini dilakukan mengingat bahwa warga Merapi mengkhawatirkan kondisi lingkungan mereka yang setiap hari menjadi arena penambangan pasir.

Apabila penambangan pasir pascaerupsi dilakukan dengan menggunakan alat tradisional warga tidak keberatan, tetapi melihat kondisi pasir yang ada di arena penambangan pasir tidak mungkin pasir dapat ditambang dengan menggunakan alat tradisional. Kondisi tidak berhenti di situ saja, penambang pasir membeli lahan warga untuk dijadikan arena penambangan pasir, sehingga membuat warga Merapi semakin bergejolak, mengingat kondisi air berkurang dan penambangan pasir dilakukan di tempat pengendapan air dari Gunung Merapi. Warga menyampaikan kembali ke aparat keamanan

dan pihak pemerintah untuk mencari penyelesaian atas permasalahan yang dihadapi, tetapi tampaknya laporan tersebut tidak direspons oleh pemerintah dan penambangan tetap menggunakan alat-alat berat di daerah penambangan yang berada di sekitar pemukiman warga. Truk-truk yang mengangkut pasir beroperasi (sekitar 450 truk) setiap hari melintas di jalan-jalan dekat permukiman warga, mengakibatkan jalan-jalan rusak parah dan udara kotor karena berdebu.

Tindakan Warga Merapi menjaga Lingkungan: Kebergantungan warga terhadap sumber alam khususnya Gunung Merapi pascaerupsi sangat tinggi, karena menyediakan sumber air bersih kehidupan warga yang bermukim di sekitarnya. Apabila sumber alam tersebut dirusak oleh pihak-pihak lain dengan cara berlebihan, berbagai tindakan reaktif pascaerupsi dilakukan warga Merapi untuk mempertahankan kelestarian lingkungan. Warga mengutamakan kearifan lokal untuk mengelola potensi Merapi. Menurut Fisher (2006) kearifan lokal tersebut dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, meskipun kearifan lokal warga Merapi tidak dipraktikkan dengan aktivitas-aktivitas ritual, tetapi kearifan lokal yang mereka jalankan lebih mengedepankan perilaku untuk menjaga lingkungan, seperti tidak memanfaatkan potensi Merapi pascaerupsi secara berlebihan yang pada akhirnya akan merusak kelestarian lingkungan. Perilaku tersebut disosialisasikan, bahkan dijalankan secara turun temurun.

Apabila pengelolaan sumber daya Gunung Merapi sudah melampaui kebiasaan sehari-hari, warga mengedepankan nilai yang mereka anut, yaitu mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat, salah satu kearifan lokal warga Merapi yang digunakan untuk mencari solusi yang tepat, baik dari mereka selaku warga yang terdampak korban penambangan pasir pascaerupsi dan penambang pasir. Upaya itu dilakukan dengan cara melaporkan persoalan mereka kepada pihak-pihak yang berwenang. Dalam konteks ini, menurut Manzungu, et al (2013) adalah tindakan evaluatif, tindakan yang mengedepankan nilai diyakini oleh warga sebagai cara untuk menyelesaikan persoalan

lingkungan dibantu oleh pihak-pihak keamanan ataupun pihak-pihak lain yang berwenang.

Berbeda dengan Manzungu, et al (2013), Weber (1978) menyatakan, tindakan yang dilakukan oleh warga Merapi dengan cara menghubungi aparat keamanan dan pihak-pihak yang berwenang adalah tindakan nilai, tetapi menurut Weber tindakan nilai seringkali abstrak karena tidak secara tegas menunjukkan hasil yang maksimal. Apabila merujuk pada Weber, tindakan warga Merapi yang mengedepankan nilai musyawarah untuk mencapai mufakat tidak memperoleh hasil yang maksimal untuk menghentikan penambangan pasir yang merusak lingkungan mereka.

Tindakan aksi “Bela Lereng Merapi” pascaerupsi menjadi pilihan warga untuk menyelamatkan lingkungan. Menurut Jain (1984), aksi-aksi lokal tidak semata-mata dimaknai konflik, karena aksi lokal tersebut menjadi cara rasional yang dilakukan oleh warga. Merujuk pada Weber (1978), tindakan rasional adalah tindakan yang penuh arti karena dilakukan untuk mencapai tujuan, tindakan aksi yang dilakukan oleh warga Merapi tidak lain adalah mempertahankan sumber tangkapan air yang menjadi sumber kehidupan mereka pascaerupsi. Tindakan dengan menggunakan aksi lokal juga sudah lama dilakukan oleh warga India yang terkenal dengan “Gerakan Cipko”. Gerakan ini dilakukan untuk menolak penebangan pohon, karena pohon sumber air bagi warga. Hal yang sama menurut Manzungu, et.al (2013) aksi lokal yang terjadi di Afrika utara dan Zimbabwe adalah cara warga untuk dapat mengakses air. Tidak berbeda dengan aksi-aksi yang dilakukan oleh warga India dan Zimbabwe, aksi kolektif lokal yang dilakukan oleh warga Merapi yang diberi nama aksi “Bela Lereng Merapi”, bertujuan untuk menyelamatkan tangkapan air pascaerupsi.

Tindakan aksi kolektif warga Merapi dilakukan setelah beberapa tindakan yang mengedepankan nilai dilakukan, tetapi tidak menyelesaikan persoalan yang dihadapi, sehingga tindakan aksi kolektif lokal dilakukan sebagai cara untuk menghentikan penambangan pasir

dengan menggunakan alat berat. Tindakan aksi warga Merapi menurut Weber (1978) adalah tindakan yang rasional, karena tindakan tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan, walaupun menggunakan aksi-aksi pemblokiran jalan yang berpotensi menimbulkan konflik sosial antarwarga dengan pemerintah setempat, tetapi tindakan tersebut menjadi cara warga untuk menghentikan penambang pasir pascaerupsi.

Mengacu pendapat Weber tentang tipologi rasionalitas tindakan sosial yang menyatakan bahwa rasionalitas nilai yang bersifat abstrak menjadi sarana untuk mencapai rasionalitas tujuan, tampaknya tidak demikian halnya dengan tindakan warga Merapi dalam menjaga lingkungan tangkapan air. Warga Merapi menganggap tindakan nilai bukan menjadi cara menjaga lingkungan, tetapi justru tindakan aksi yang dijadikan cara untuk mencapai tujuan, karena dengan melakukan aksi-aksi pemblokiran jalan penambangan pasir yang merusak lingkungan tangkapan air menggunakan alat-alat berat, dapat dihentikan.

D. Penutup

Kesimpulan: Kebergantungan warga Merapi terhadap sumber daya alam gunung sangat tinggi, karena berbagai potensi gunung, seperti air merupakan sumber penghidupan warga yang bermukim di sekitarnya pascaerupsi. Warga Merapi melakukan berbagai tindakan untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan pascaerupsi akibat pengelolaan sumber daya gunung secara berlebihan, yang potensial merusak lingkungan tangkapan air, dengan menggunakan aksi-aksi untuk menolak pihak penambang pasir yang mengelola sumber daya alam pegunungan secara berlebihan. Tindakan kolektif dilakukan mengingat tindakan dengan cara mengedepankan nilai, ternyata tidak mampu menghentikan aktivitas pengelolaan sumber daya alam Gunung Merapi pascaerupsi secara berlebihan. Tindakan kolektif dengan cara menggunakan aksi-aksi semata-mata menjadi upaya warga untuk menjaga lingkungan, bukan membangun konflik sosial

terhadap pihak lain khususnya penambang pasir yang menggunakan alat berat.

Daftar Pustaka

- Carey, N.S. (2005). *Understanding the Physical Behavior of Volcanoes* dalam Mart, Joan and Gerald G.J. Ernst (ed). *Volcanoes and the Environment*. Cambridge University Press.
- Fischer, M. (2006). *Powerful Knowledge Applications in a Cultural Context* dalam Allan Bicker, Paul Sillitoe and Johan Pottier (ed). *Development and Lokal Knowledge New Approaches to Issues in Natural Resources Management*. Conservation and Agriculture, Routledge.
- Groenewald, T. (2004). *A Phenomenological Research Design Illustrated*. *International Journal Of Qualitative Methods*, 3 (10) .
- Hamid, R.A and Jahja, S.R. (2016). *Developing Environmental Educational Model Based on Lokal Wisdom*. *Komunitas International Journal of Indonesian Society and Culture*, 8 (1).
- Huberman, M.A. dan M.M. Miles. (1984). *Data Management and Analysis Methods*. dalam Denzin, K.N dan Y.S. Lincoln (ed). *Handbook Of Qualitative Research*. London: Sage Publication.
- Indrayana, H. 2010. *Mencermati sumber daya air pascaerupsi Merapi 2010*. Unpublication.
- Jain, S. (1984). *Women and People's Ecological Movement: A Case Study of Women's Role in the Chipco Movement in Uttar Pradesh*. *Economic & Political Weekly*. 19 (4).
- Kerap, S. (2006). *Etika Lingkungan*. Jakarta: Kompas.
- Khasanah dan Marfai, M.A. (2012). *Kerawanan dan Kemampuan Adaptasi Masyarakat Pesisir terhadap Bahaya Banjir Genangan dan Tsunami. Integrasi Kajian Kebencanaan dan Sosial Budaya*. Dalam Indiyanto, A & Kuswanjono, A (ed). *Konstruksi Masyarakat Tangguh Bencana*. Bandung: Mizan dan Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.
- Malik, A. (2012). *Perayaan Maulid Hijau di Lereng Gunung Lamongan*. Dalam Indiyanto,

- A dan Kuswanjono, A (ed). *Kajian Agama, Budaya dan Agama*. Bandung: Mizan dan Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.
- Manzungu, E., L. et. al. (2013). *Emerging Forms of Social Action in Urban Domestic Water Supply in South Africa and Zimbabwe*. Journal of Sustainable Developing . 6 (3).
- McDonald, K. (2010). *From Solidarity to Fluidity: Social Movement Beyond 'Collective identity' the Case of Globalization Conflict*. Journal Social Movement Studies. 2:109.
- Napsiah, (2015). *Rasionalitas Warga di Daerah Rawan Bencana Merapi* Yogyakarta. Disertasi: Unpad.
- Patton, M.Q. (2009). *Metode Evaluasi Kualitatif*. Diterjemahkan oleh Budi Puspo Priyadi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Qodir, Z. (2012). *Bencana Merapi dan Mitos di Masyarakat. Kasus Masyarakat Glagah Harjo dan Kinahrejo*. Dalam Hasse, J, Ferry Muhamadsyah Siregar, Pradiastuti P (Editor). *Merapi dalam Kajian Multidisipliner*. Yogyakarta: Pascasarjana UGM.
- Suhartini. (2009). *Kearifan Lokal Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan*. Prosiding Nasional Penelitian, Pendidikan dan Penerapan, Fakultas MIPA. Yogyakarta: UNY.
- Triyogo, L. S. (2009). *Merapi dan Orang Jawa: Persepsi dan kepercayaan*. Jakarta: Grasindo.
- Weber, M. (1978). *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. Edited by Guenther Rot and Clans Wittich. Berkeley and Los Angeles, California: University of California Press.
- BNBPD Sleman, 2010. *Erupsi Gunung Merapi*.
- Undang-undang No 23 Tahun 1979 tentang *Pengelolaan Alam dan Lingkungan*.

Sikap Keluarga terhadap Ibu atau Istri sebagai Wanita Karir *Family Attitude toward Their Mother or Wife as Career Women*

Ikawati

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS).

Jl Kesejahteraan Sosial No 1 Sonosewu, Yogyakarta. Telpon 0274-377265. HP. 087839561959.

Email: ikawati.susaty@yahoo.com. Diterima 30 Maret 2016, diperbaiki 21 September 2016, disetujui 5 Oktober 2016.

Abstract

The research is to reveal family attitude toward their mother or wife as career women for their family welfare. Research location determined purposively in Yogyakarta Special Territory. Subjects researched determined purposively, 30 respondents. Research object was family attitude toward their mother or wife as career women. Data were gathered through questionnaires distribution that were answered by respondents, data analysis through product moment technique. The result showed that $r=0,381$ with $p=0,036$ ($p<0,05$), so it can be concluded that there was positive and significant correlation (with the degree of significance 5 percent) between family attitude and mother or wife as career women. That means the higher family attitude score toward mother or wife as career women the higher career establishment for family welfare. Determining coefficient 0,145 can be explained, that family attitude toward mother or wife as career women, 14,5 percent, while the rest of 85,5 percent caused by another variabel was not included in this research. It recommended to the Ministry of social Affairs, through the Directorate of Family empowerment, on its policy to enhance family welfare can be done through educating career women.

Keywords: *family attitude; career women; family welfare*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui sikap keluarga terhadap ibu atau istri sebagai wanita karir untuk kesejahteraan keluarganya. Lokasi penelitian ditentukan secara *purposive* di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penentuan subyek yang diteliti secara *purposive*, 30 responden. Objek penelitian adalah sikap keluarga terhadap ibu atau istri sebagai wanita karir. Teknik pengumpulan data distribusi kuesioner yang dijawab responden, analisis data digunakan teknik *product moment*. Hasil penelitian menunjukkan $r=0,381$ dengan $p=0,036$ ($p<0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa ada korelasi positif yang signifikan (taraf signifikan 5 persen) antara sikap keluarga terhadap ibu atau istri sebagai wanita karir. Artinya, semakin tinggi skor sikap keluarga terhadap ibu atau istri sebagai wanita karir, semakin tinggi skor kemampuan karir untuk kesejahteraan keluarga. Koefisien determinasi sebesar 0,145 dapat dijelaskan, bahwa variabel sikap keluarga terhadap ibu atau istri sebagai wanita karir sebesar 14,5 persen, sedangkan 85,5 persen disebabkan oleh variabel lain yang tidak dilibatkan dalam penelitian ini. Direkomendasikan kepada Kementerian Sosial, khususnya Direktorat Pemberdayaan Keluarga, dalam mengembangkan kebijakan peningkatan kesejahteraan keluarga dapat dilakukan melalui pembinaan wanita karir.

Kata kunci: *sikap keluarga; wanita karir; kesejahteraan keluarga*

A. Pendahuluan

Mengikuti terwujudnya cita-cita Kartini, yaitu emansipasi wanita sehingga banyak ibu-ibu yang bekerja di luar rumah. Kaum ibu sedikit demi sedikit memperoleh haknya. Perubahan tersebut dapat menyebabkan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan keluarga dan mempengaruhi secara mendasar, baik status wanita di rumah, hubungan suami dan istri, maupun hubungan orangtua dan anak, hubungan dengan

sanak famili menjadi berkurang baik dalam frekuensi maupun kualitas. Menurut Wicler (Alimatus Sahrah, 1996), bahwa wanita sejak kecil sudah dipersiapkan untuk berperan sebagai ibu, dan seorang anak pria memang dididik untuk pekerjaan, sehingga faktor karir terasa lebih ditekankan pada kehidupan pria daripada wanita. Kerja karir adalah kerja yang berjenjang, sebagai orang yang bekerja mempunyai kemungkinan untuk mencapai jenjang yang

lebih tinggi (Martaniah, 1988). Rendahnya tingkat partisipasi wanita dalam bidang pekerjaan menurut Yuwana (2012), disebabkan motivasi kerja wanita sering diwarnai oleh faktor sosial budaya yang membentuk sikap tertentu dalam bekerja, ada anggapan bahwa wanita lebih baik melakukan tugasnya sebagai ibu rumah tangga, serta kurangnya kesediaan masyarakat mengakui dan menghargai kemampuan wanita dalam pekerjaannya.

Dalam masyarakat Indonesia, pria diharapkan lebih berperan sebagai kepala keluarga dan dituntut untuk bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan keluarga, sedangkan wanita lebih diharapkan berperan sebagai seorang istri dan ibu mengasuh anak di rumah. Dibandingkan dengan pria, wanita yang bekerja lebih banyak mengalami konflik peran antara berkarir dan ibu rumah tangga, meskipun ibu yang berperan wanita karir telah diakui sebagai mitra kaum pria dalam berbagai aktivitas kehidupan, tidak terkecuali dalam berkarir mencari nafkah di sektor publik, tetapi kenyataannya mereka masih mengalami berbagai faktor penghambat dalam meniti jenjang karir yang lebih tinggi. Penghambat tersebut antara lain adanya persepsi di kalangan masyarakat bahwa biang keladi dari setiap keretakan keluarga dan ketidakharmonisan suami dan anak adalah ibu bekerja di luar rumah (Robinson dalam Totok, 2011), karena tidak semua wanita karir mampu melakukan pembagian waktu antara keluarga dan karir.

Kenyataan tersebut di atas tidak menyurutkan mereka untuk bekerja, mengingat jumlah wanita bekerja di luar rumah semakin meningkat, menurut Yuwana (2012), kehadiran wanita dalam dunia kerja sebagai suatu prestasi untuk lebih meningkatkan pembangunan dirasakan sudah sangat mendesak. Ibu yang bekerja akan berpengaruh terhadap pengasuhan anak, seperti anak diasuh oleh orang lain, mobilitas sosial dan pekerjaan juga meningkat, lambang status menjadi penting daripada kehidupan keluarga sendiri. Menurut Hardjito (1979), seorang ibu mempunyai peran yang besar dalam keluarga, merupakan pemelihara rumah tangga, sebagai

pengasuh dan pendidik anak-anaknya. Meskipun wanita telah dapat menikmati sebagian haknya yang sebelumnya didominasi oleh kaum pria. Akan tetapi bukan berarti bahwa mereka sudah tidak memiliki masalah lagi, bagi yang sudah menikah tentunya dihadapkan pada suatu dilema, antara memilih karir sebagai tujuan hidup dan menjadi ibu rumah tangga yang selalu siap untuk mengasuh anak dan melayani kebutuhan suami. Mereka juga mempunyai perasaan bersalah dan khawatir, karena dengan keterlibatannya dalam dunia kerja menyebabkan waktu untuk mengurus suami dan anak menjadi berkurang.

Kesempatan kaum wanita untuk dapat mengembangkan potensi diri dan berperan aktif dalam kehidupan sosial dan masyarakat semakin terbuka, akibat dari perkembangan tersebut muncul istilah wanita karir. Menurut Masdani (1981), wanita karir adalah wanita yang bekerja dengan menghayati dan menerima bahwa pekerjaannya merupakan jalan untuk mengembangkan kemampuan diri. Menurut Hartati (1984), yang dimaksud wanita karir mempunyai empat ciri khas yaitu pendidikannya khusus, suatu panggilan, dilakukan seumur hidup dengan jenjang kenaikan, dan pekerjaan *full-time*. Dalam kaitan dengan dunia kerja, karir adalah serangkaian kehidupan kerja yang terintegrasi dengan sikap dan motif individu yang terlibat dalam peran-peran kerja (Beach, 1980).

Menurut Sungkono (1989), karir sebagai suatu jabatan atau profesi yang terlatih, yang dimiliki individu dalam perjalanan kehidupan kerja seseorang. Menurut Super (Sungkono, 1989), bahwa ada tiga sub tahap pementapan karir seseorang, pertama sub tahap percobaan (usia 25-35 tahun), dalam tahapan ini seseorang mulai menentukan bidang kerja yang dipilih sesuai kemampuan, harapan atau bakatnya. Kedua, sub tahap stabilisasi (usia 30-40 tahun), dalam tahap ini seseorang telah dapat merencanakan dan menetapkan karirnya melalui promosi, perubahan pekerjaan, dan aktivitas pendidikan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Ketiga, sub tahap krisis (30-44 tahun), dalam tahapan ini

seseorang sering melakukan penilaian kembali terhadap kemajuan yang telah dicapai.

Apabila disimpulkan pengertian wanita karir dari berbagai pendapat, wanita karir adalah mereka yang bekerja dan menghayati serta menerima pekerjaannya sebagai suatu jalan untuk mengaktualisasi dan mengembangkan diri. Tidak semua wanita bekerja adalah wanita karir, karena wanita karir bekerja tidak semata-mata keuntungan materi, tetapi mempunyai ciri khas profesionalisme dan idealisme. Tanda-tanda yang paling menentukan adalah adanya ambisi untuk maju dalam pekerjaan dengan peningkatan jenjang yang ada dan keinginan melakukan pekerjaan seumur hidup dengan bekerja *full-time*. Pemantapan karir seseorang menurut Oneil dkk. (dalam Sungkono, 1989), dapat dipengaruhi antara lain faktor keluarga, masyarakat, sosio-ekonomi, situasi, individu, dan emosi-psikososial. Salah satu faktor tersebut adalah faktor keluarga seperti dukungan pasangan dan anggota keluarga yang sangat berperan terhadap perjalanan karir seseorang.

Karir yang melekat pada wanita sebagai istri kadang-kadang berakibat kurangnya perhatian terhadap anak dan suami. Keterlibatan wanita sebagai istri dalam dunia kerja sesuai dengan latar belakang pendidikan tentu tidak semulus yang diharapkan, karena mempunyai keterbatasan baik sebagai istri, ibu rumahtangga, maupun anggota masyarakat, masing-masing peran tersebut mempunyai kewajiban dan tanggung jawab sendiri-sendiri. Oleh karena itu, wanita sebagai istri yang bekerja mempunyai kesulitan dan masalah yang kompleks seperti pengasuhan anak, kesulitan ekonomi, krisis perkawinan, pekerjaan, dan kegiatan sosial yang harus dilakukan.

Dilema atau konflik yang dihadapi kaum wanita yang bekerja menjadi suatu pembicaraan yang menarik, yang menyangkut peran ganda wanita di satu sisi menginginkan keluarga bahagia, sisi lain tuntutan untuk berkarir dan mencapai prestasi setinggi mungkin. Dalam kehidupan manusia sikap memiliki arti yang cukup penting, karena sikap yang sudah terbentuk pada

diri seseorang mempengaruhi perilaku dalam menghadapi sesuatu objek tertentu yang dihadapi dalam interaksi sosial. Menurut penelitian Djamaludin Ancok (1986), dalam kehidupan perkawinan, seorang suami yang mempunyai pandangan positif terhadap wanita karir, kemungkinan juga bersikap positif terhadap istrinya yang juga bekerja, dan selalu memberi dorongan serta bantuan kepada istrinya untuk dapat mencapai kesuksesan karir.

Menurut Krech, Crutchfield dan Ballachey (1982), komponen sikap dapat ditinjau dari tiga aspek, pertama kognitif komponen sikap yang terbentuk dari pengetahuan dan kepercayaan yang dimiliki individu mengenai suatu objek. Kedua, aspek afektif komponen sikap merupakan emosi-emosi yang berkaitan dengan suatu objek, yang menjadi dasar timbulnya rasa suka atau tidak terhadap suatu objek. Ketiga, aspek konatif yaitu komponen sikap yang berkaitan dengan kesiapan tingkah laku seseorang untuk merespons sesuatu di dalam konteks sosial tertentu sehingga mendorong individu untuk bertindak ataupun bertingkah laku.

Berangkat dari kondisi wanita yang diuraikan di atas, penelitian sikap keluarga terhadap wanita karir sebagai ibu atau istri dengan kemapanan karir untuk kesejahteraan keluarga dilakukan. Rumusan masalah yang diajukan adalah bagaimanakah sikap keluarga terhadap wanita karir sebagai ibu atau istri dengan kemapanan karir untuk kesejahteraan keluarganya?

B. Penggunaan Metode Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta, penentuan subyek yang diteliti secara *purposive* 30 responden, dengan pertimbangan suami yang mempunyai istri bekerja sebagai PNS, yang istrinya mempunyai kedudukan, golongan, dan gaji di instansinya lebih tinggi dari suami dan sudah mempunyai anak. Variabel dalam penelitian ini ada dua, variabel bebas "x" yaitu sikap keluarga terhadap wanita karir sebagai ibu atau istri dan variabel terikat "y" yaitu kemapanan karir untuk kesejahteraan keluarga. Definisi operasional dalam penelitian ini untuk

variabel “x” (sikap keluarga terhadap wanita karir sebagai ibu atau istri) yang ditinjau dari beberapa aspek yaitu: (1) kognitif (2) afektif (3) konatif. Variabel “y” (kemampuan karir untuk kesejahteraan keluarga) dilihat dari tujuan dan pandangan karir yang ditempuh, keseimbangan aktivitas kerja dan waktu luang, keseimbangan hubungan sosial dan keluarga, faktor individual dan persepsi terhadap sikap suami dan keluarga. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah distribusi kuesioner, sedangkan objek penelitian adalah sikap keluarga terhadap ibu atau istri sebagai wanita karir untuk kesejahteraan keluarganya. Analisis data digunakan teknik *product moment*, untuk memudahkan penghitungan, digunakan bantuan program *product moment* dari SPS Sutrisnohadi (2000).

C. Sikap Keluarga terhadap Ibu atau Istri sebagai Wanita Karir

Analisis statistik dengan menggunakan teknik korelasi *product moment* menunjukkan, bahwa antara sikap keluarga terhadap wanita karir sebagai ibu atau istri dengan kemampuan karir untuk kesejahteraan keluarga berkorelasi sebesar $r = 0,381$ dengan $p = 0,036$ ($p < 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa ada korelasi positif yang signifikan (taraf signifikan 5 persen) antara sikap keluarga terhadap wanita karir sebagai ibu atau istri kemampuan karir untuk kesejahteraan keluarga. Artinya, semakin tinggi *score* sikap keluarga terhadap wanita karir sebagai ibu atau istri, semakin tinggi *score* kemampuan karir untuk kesejahteraan keluarganya.

Koefisien determinasi (r kuadrat) dari hubungan antara “x” (sikap keluarga terhadap wanita karir sebagai ibu atau istri) dan kemampuan karir untuk kesejahteraan keluarga “y” sebesar 0,145. Total varians dalam variabel kemampuan karir untuk kesejahteraan keluarga yang dapat dijelaskan dalam variabel sikap keluarga terhadap wanita karir sebagai ibu atau istri sebesar 14,5 persen sedangkan total varians yang lain sebesar 85,5 persen disebabkan oleh variabel lain yang tidak dilibatkan dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil analisis data penelitian, dapat disimpulkan bahwa sikap keluarga yang baik terhadap wanita karir sebagai ibu atau istri dalam hal ini mempunyai *score* yang tinggi, maka semakin baik kemampuan karir untuk kesejahteraan keluarga (*score* variabel ini juga tinggi), hasil analisis tersebut dapat didukung data di lapangan sebagai berikut.

1. Untuk variabel “x”, yaitu sikap keluarga terhadap wanita karir sebagai ibu atau istri, ditinjau dari aspek kognitif dapat dijelaskan oleh 30 responden dengan distribusi kuesioner sebagai berikut. (a) Tidak sesuai dengan sikap yang menyatakan, bahwa ibu/istri yang baik siap untuk melayani kebutuhan suami, ada 10 orang atau 33,33 persen (b) Tidak sesuai dengan sikap yang menyatakan, bahwa tugas utama ibu/istri tinggal di rumah melayani kebutuhan suami dan anak, ada 11 orang atau 36,67 persen (c) Tidak sesuai dengan sikap yang menyatakan, bahwa semenjak istri bekerja, merasa tidak berfungsi ada 12 orang atau 40 persen (d) Kurang sesuai dengan sikap yang menyatakan, bahwa harga diri saya jatuh ketika istri ikut bekerja, ada 30 orang atau 100 persen (e) Tidak sesuai dengan sikap yang menyatakan, bahwa harga diri pria akan runtuh bila gaji istri lebih tinggi, ada 8 orang atau 26,67 persen (f) Sangat sesuai sampai dengan sesuai dengan sikap yang menyatakan, bahwa “tidak perlu rendah diri apabila istri mempunyai kedudukan yang lebih tinggi, ada 30 orang (100 persen).

Data yang ditemukan di lapangan di atas dapat dimaknai, bahwa sikap keluarga terhadap wanita karir sebagai ibu atau istri ditinjau dari aspek kognitif positif, terlihat dari besarnya persentase antara 26,67 s.d. 100 terhadap sikap tersebut, seperti adanya sikap yang kurang sesuai tentang ibu/istri yang baik harus siap untuk melayani kebutuhan suami; adanya sikap kurang sesuai, apabila tugas utama ibu/istri tinggal di rumah melayani kebutuhan suami dan anak; adanya sikap kurang sesuai apabila istri bekerja

merasa tidak berfungsi dan harga diri jatuh ketika istri ikut kerja. Sikap yang tidak sesuai tentang harga diri pria akan runtuh apabila gaji istri lebih tinggi dan ada sikap sangat sesuai sampai dengan sesuai tentang tidak perlu rendah diri apabila istri mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Data yang ditemukan di atas diperkuat dengan pendapat Nani Suwondo (2011), bahwa tugas wanita yang telah berkeluarga hanya dibatasi mengurus rumah tangga dan mengasuh keluarga, bisa menyebabkan wanita menjadi jenuh kerutinan hidup yang dijalani, karena pada kenyataan tidak semua wanita hidup bahagia dalam lingkungan rumah tangga. Namun bukan berarti bahwa pekerjaan rumah tangga tersebut merupakan suatu pekerjaan yang harus disesalkan, karena justru peran wanita diharapkan agar dapat mengarahkan dan membina hubungan keluarga secara intim. Hardjito (1979) menjelaskan, bahwa seorang ibu mempunyai peran yang besar dalam keluarga, merupakan pemelihara rumah tangga, sebagai pengasuh dan pendidik anak-anaknya.

Hoffman dan Hoffman (dalam Sukadji 2011) menyebutkan, banyak dampak positif wanita karir atau ibu bekerja salah satunya ibu yang bekerja bisa meningkatkan standar kehidupan keluarga dan menambah penghasilan suami. Dalam kaitannya dengan temuan data di lapangan, ternyata responden merasakan ada dukungan yang positif sikap keluarga ditinjau dari aspek kognitif apabila ibu atau istri bekerja. Apabila dikaitkan dengan kesejahteraan keluarga, dukungan positif ini akan mendukung kemapanan karir istri/ibu, akibatnya keluarga akan merasa aman, terlindungi, tidak tertekan dalam menjalankan karir yang dijalani, akhirnya ada peningkatan pendapatan dari sisi ibu/istri yang dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

2. Sikap keluarga terhadap wanita karir sebagai ibu atau istri yang berorientasi aspek afektif, menunjukkan, bahwa 30 responden dengan distribusi kuisioner sebagai berikut: (a) San-

gat sesuai sampai dengan sesuai dengan sikap yang menyatakan, bahwa saya bangga ibu/istri sukses di dalam bekerja, ada 30 orang atau 100 persen (b) Tidak sesuai dengan sikap yang menyatakan, bahwa pandangan negatif masyarakat terhadap wanita bekerja, 20 orang atau 66,67 persen (c) Tidak sesuai dengan sikap yang menyatakan, bahwa pada umumnya suami/keluarga tidak senang apabila ibu/istri mandiri, 24 orang atau 80 persen (d) Sangat sesuai sampai dengan sesuai dengan sikap yang menyatakan, bahwa keberhasilan ibu/istri adalah keberhasilan keluarga, 30 orang atau 100 persen (e) Sangat sesuai dengan sikap yang menyatakan, bahwa ibu/istri saya adalah segalanya-galanya bagi keluarga, 30 orang (100 persen).

Data di atas dapat dimaknai, bahwa sikap keluarga terhadap wanita karir sebagai ibu atau istri yang ditinjau dari aspek afektif positif, terlihat dari persentase antara 66,67 s.d. 100 terhadap sikap tersebut. Data tersebut dapat dilihat adanya sikap yang sangat sesuai sampai dengan sesuai tentang bangga ibu atau istri sukses dalam bekerja; adanya sikap sangat sesuai sampai dengan sesuai tentang ibu atau istri adalah segala-galanya bagi keluarga; adanya sikap sangat sesuai sampai dengan sesuai tentang keberhasilan ibu atau istri adalah keberhasilan keluarga; adanya sikap tidak sesuai tentang pandangan negatif masyarakat terhadap wanita bekerja dan adanya sikap tentang pada umumnya suami atau keluarga tidak senang, bila ibu atau istri mandiri.

Data yang ditemukan di lapangan tersebut didukung oleh hasil penelitian Hoffman (dalam Sukadji, 2011) menemukan, bahwa ibu yang bersikap positif terhadap pekerjaan lebih afektif terhadap anak, lebih sedikit menggunakan paksaan, lebih simpatik pada perilaku anak, kurang memusuhi anak, lebih banyak membebaskan anak membantu pekerjaan rumah tangga. Cara-cara ibu yang memperlakukan anaknya itu memberi andil besar dalam pembentukan suasana kelu-

arga. Dalam keharmonisan keluarga dituntut adanya penyesuaian diri terhadap pasangannya, menurut Hann dan Stinnet (Bernadus Wibisono, 1992) antara lain adanya empati, kejujuran, ketertarikan perhatian, penghargaan dan mampu menyatakan diri secara spontan kepada pasangannya. Yustinus (1987) mengemukakan, bahwa bahwa intensitas komunikasi yang lancar akan meningkatkan kualitas hubungan interpersonal terutama suami-istri. Data tersebut apabila dikaitkan dengan kesejahteraan keluarga, hubungan penuh afektif antara pasangan dan anggota keluarga, seperti adanya pengertian, empati, komunikasi yang baik dan hubungan interpersonal (keharmonisan) dalam suatu keluarga yang baik, akan mendukung seorang wanita yang bekerja menjadi mapan dalam karir, sehingga ada ketenangan dalam melaksanakan karir dengan baik, akhirnya produktivitas kerja meningkat sekaligus kesejahteraan keluarganya.

3. Sikap keluarga terhadap wanita karir sebagai ibu atau istri yang berorientasi aspek konatif dapat dilihat dalam distribusi kuisioner yang menunjukkan, oleh 30 responden (a) Tidak sesuai dengan sikap yang menyatakan, bahwa ibu/istri saya terlalu sibuk dengan pekerjaannya ada 16 orang atau 53,33 persen (b) Sangat sesuai sampai dengan sesuai dengan sikap yang menyatakan, bahwa keluarga yang tidak menginginkan ibu/istrinya bekerja adalah egois, ada 30 orang atau 100 persen (c) Sangat sesuai sampai dengan sesuai dengan sikap yang menyatakan, bahwa setuju dengan adanya persamaan hak dan kewajiban antara wanita dan pria, ada 30 orang atau 100 persen (d) Sangat sesuai sampai dengan sesuai dengan sikap yang menyatakan, bahwa kedudukan saya tidak akan terancam dengan bekerjanya ibu/istri, ada 30 atau 100 persen (e) Tidak sesuai dengan sikap yang menyatakan, bahwa karena kesibukan ibu/istri jarang berkumpul dengan keluarga, ada 17 orang (56,67 persen) ada sebanyak 13 orang atau 43,33 persen (f) Sesuai dengan sikap yang

menyatakan, bahwa pembangunan akan meningkat dengan keterlibatan wanita dalam dunia kerja, ada 23 orang (76,67 persen).

Data yang ditemukan di lapangan dapat dimaknai bahwa sikap keluarga terhadap wanita karir sebagai ibu atau istri yang ditinjau dari aspek konatif positif terlihat dari persentase antara 43,33 s.d. 100 terhadap sikap tersebut. Data tersebut dapat dilihat adanya sikap yang tidak sesuai tentang ibu atau istri terlalu sibuk dengan pekerjaannya; adanya sikap sangat sesuai sampai dengan sesuai tentang keluarga yang tidak menginginkan ibu atau istrinya bekerja adalah egois; adanya sikap sangat sesuai sampai dengan sesuai tentang setuju dengan adanya persamaan hak dan kewajiban antara wanita dan pria; adanya sikap sangat sesuai sampai dengan sesuai tentang kedudukan tidak akan terancam dengan bekerjanya ibu atau istri; adanya sikap tidak sesuai tentang kesibukan ibu atau istri, menyebabkan jarang berkumpul dengan keluarga dan adanya sikap sesuai tentang pembangunan akan meningkat dengan keterlibatan wanita dalam dunia kerja.

Hasil tersebut didukung hasil penelitian Simanjuntak (1989), yang menemukan banyak sarjana wanita yang telah berkeluarga memilih untuk tidak bekerja demi urusan rumah tangga, menurut beliau dari seluruh penduduk Indonesia ada 0,2 persen ilmuwan wanita belum semua memiliki berperan ganda yaitu sebagai ibu rumah tangga dan wanita karya. Kondisi ini dapat terjadi menurut Sadli (1991), karena masih terdapatnya nilai sosial budaya yang kurang mendukung kemajuan dan kesempatan wanita untuk berperan ganda, maka sikap masyarakat masih menganggap pilihan ini merupakan suatu penyimpangan. Akibatnya wanita dapat lebih memilih untuk menghindari sukses karena adanya tekanan sosial yang cenderung mengharuskan wanita ke arah menghindari dari pada dapat meraih sukses. Menurut Sekaran (1986), nilai sosial budaya yang kurang mendukung ini akan mempengaruhi

kemajuan karir yang dimilikinya. Data di atas bila dikaitkan dengan kesejahteraan keluarga, maka dapat dijelaskan bahwa dukungan keluarga yang positif terhadap aspek konatif seperti adanya pembagian waktu wanita karir dengan keluarganya, sehingga ada keseimbangan antara pekerjaan dan tugas-tugas yang harus dilakukan dirumah. Kondisi menjadikan keluarga semakin menghargai peran ibu/istri yang bekerja, penghargaan ini menjadikan seorang istri/ibu yang bekerja menjadi mapan karirnya, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan keluarganya.

4. Kemapanan karir ibu atau istri dapat dilihat dalam aspek tujuan dan pandangan terhadap karir yang ditempuh dapat dilihat di lapangan dengan distribusi kuisioner oleh 30 responden (a) Sangat sesuai sampai dengan sesuai dengan sikap yang menyatakan, bahwa banyak mendapat kesempatan mengikuti training utk pengembangan diri, ada 28 orang atau 93,33 persen (b) Kurang sesuai dengan sikap yang menyatakan, bahwa sangat sulit mengambil cuti di perusahaan, ada 18 orang atau 60 persen (c) Kurang sesuai dengan sikap yang menyatakan, bahwa pada umumnya orang menjadi sombong setelah mencapai kesuksesan, ada 24 orang atau 80 persen (d) Sesuai dengan sikap yang menyatakan, bahwa banyak orang menganggap saya adalah orang yang dinamis ada 26 orang atau 53,33 persen (e) Kurang sesuai dengan sikap yang menyatakan, bahwa semenjak ibu/istri bekerja, masalah dalam keluarga tidak dapat diatasi, ada 30 orang atau 100 persen (f) Sesuai dengan sikap yang menyatakan, bahwa keluarga mendukung bila saya harus kerja lembur, ada sebanyak 24 orang (80 persen).

Data di atas dapat dimaknai bahwa kemampuan karir ibu atau istri untuk kesejahteraan keluarga ditinjau dari aspek tujuan dan pandangan terhadap karir yang ditempuh dalam penelitian ini ditemukan positif terlihat dalam persentase sebesar 53,33-100 terhadap sikap tersebut. Di lapangan terlihat seperti

adanya sikap sangat sesuai sampai dengan sesuai tentang banyak mendapat kesempatan mengikuti training untuk pengembangan diri; adanya sikap kurang sesuai tentang sangat sulit mengambil cuti di perusahaan; adanya sikap kurang sesuai tentang pada umumnya orang menjadi sombong setelah mencapai kesuksesan; adanya sikap sesuai tentang banyak orang menganggap saya adalah orang yang dinamis; adanya sikap kurang sesuai tentang semenjak ibu atau istri bekerja masalah dalam keluarga tidak dapat diatasi dan adanya sikap sesuai tentang keluarga mendukung bila saya harus kerja lembur. Data yang ditemukan di atas diperkuat dengan pendapat Bimo Walgito (1984), seseorang bersikap terhadap sesuatu objek dikarenakan untuk mencapai penyesuaian artinya seseorang akan bersikap positif apabila dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan akan bersikap negatif bila objek yang tidak memuaskan.

Gerungan (1978), bahwa peranan sikap dalam kehidupan adalah besar, sebab apabila telah terbentuk dalam diri manusia, maka sikap itu akan menentukan cara-cara tingkah laku terhadap objek atau bertindak secara khas terhadap objeknya. Menurut Hall (1983), seseorang bersikap positif atau negatif terhadap sesuatu objek hanya berdasarkan dari cerita orang lain yang dihormati atau dipercaya. Kemapanan karir seseorang akan dapat berkembang salah satunya apabila ada dukungan positif dari keluarganya, menurut Trilaksmi dkk (2011), bahwa keluarga sebagai penentu dalam keberhasilan pembinaan anak, pemecahan masalah dalam keluarga dan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.

5. Kemapanan karir ibu atau istri dapat dilihat dalam aspek keseimbangan aktivitas kerja dan waktu luang dapat dilihat di lapangan dengan distribusi kuisioner oleh 30 responden (a) Sesuai dengan sikap yang menyatakan, bahwa saya menyempatkan diri untuk berkegiatan sosial di lingkungan, ada 27 orang atau 90 persen (b) Kurang sesuai den-

gan sikap yang menyatakan, bahwa jarang mendiskusikan rencana dan tujuan masa depan dengan suami/keluarga, ada 25 orang atau 83,33 persen (c) Kurang sesuai dengan sikap yang menyatakan, bahwa keluarga kurang memahami diri saya ada 30 orang atau 100 persen (d) Sangat sesuai sampai sesuai dengan sikap yang menyatakan, bahwa saya menerima masukan dari mana saja untuk peningkatan kemampuan, ada 30 orang atau 100 persen (e) Sesuai dengan sikap yang menyatakan, bahwa rekreasi dengan keluarga merupakan kebutuhan yang penting bagi keluarga saya, ada 25 orang atau 83,33 persen (f) Sangat sesuai sampai sesuai dengan sikap yang menyatakan, bahwa gaji yang saya terima cukup memuaskan, ada 30 orang 100 persen.

Data di atas dapat dimaknai bahwa kemampuan karir ibu atau istri ditinjau dari aspek keseimbangan aktivitas kerja dan waktu luang dalam penelitian ini ditemukan positif terlihat dalam persentase sebesar 83,33-100 terhadap sikap tersebut. Data yang mendukung di lapangan antara lain adanya sikap sesuai tentang saya menyempatkan diri untuk berkegiatan sosial di lingkungan; adanya sikap kurang sesuai tentang jarang mendiskusikan rencana dan tujuan masa depan dengan suami atau keluarga; adanya sikap kurang sesuai tentang keluarga kurang memahami diri saya; adanya sikap sangat sesuai sampai dengan sesuai tentang saya menerima masukan dari mana saja untuk peningkatan kemampuan saya, adanya sikap sesuai tentang rekreasi dengan keluarga merupakan kebutuhan yang penting bagi keluarga saya dan adanya sikap sesuai tentang gaji yang saya terima cukup memuaskan.

Data yang ditemukan tersebut diperkuat oleh Hall (1983), bahwa kriteria yang biasa dimiliki individu untuk dapat mencapai kepuasan dan kesuksesan karir yang diinginkan anatara lain individu mencoba untuk membatasi perkembangan karirnya dan individu berusaha untuk mencari keseimbangan antara

kerja, organisasi, keluarga, teman-teman dan rekreasi. Menurut Beach (1980), individu akan merasa sukses di dalam karirnya apabila mendapatkan gaji yang layak, memiliki status kerja yang tinggi, mendapatkan posisi dan tanggung jawab yang lebih tinggi dan mempunyai pengaruh dan wibawa. Apabila dikaitkan dengan kesejahteraan keluarga maka kemapanan karir seseorang akan baik apabila ada dukungan positif dari keluarga. Dukungan yang positif ini akan dapat memotivasi seseorang dalam menjalani karirnya, semakin kecil dukungan dari keluarga, maka semakin kecil motivasi seseorang dalam mencapai tujuan, dan sebaliknya, apabila semakin besar dukungan positif dari keluarga, maka semakin besar motivasi seseorang dalam mencapai tujuan yang dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya (Trilaksmi, dkk. 2011).

6. Kemapanan karir ibu atau istri dapat dilihat dalam aspek faktor individu dapat dilihat di lapangan dengan distribusi kuisioner oleh 30 responden (a) Sesuai dengan sikap yang menyatakan, bahwa saya selalu serius dalam bekerja untuk target karir saya, ada 25 orang atau 83,33 persen (b) Sesuai dengan sikap yang menyatakan, bahwa saya cukup mampu menghadapi kesukaran, 25 orang atau 83,33 persen (c) Sangat sesuai sampai sesuai dengan sikap yang menyatakan, bahwa kehidupan dalam keluarga saya terasa menyenangkan, ada 30 orang atau 100 persen (d) Kurang sesuai dengan sikap yang menyatakan, bahwa jarang membicarakan masalah terhadap suami/keluarga, 30 orang atau 100 persen (e) Sangat sesuai sampai sesuai dengan sikap yang menyatakan, bahwa "teman-teman kerja menunjukkan simpati terhadap kerja saya," 30 orang atau 100 persen (f) Sangat sesuai sampai sesuai dengan sikap yang menyatakan bahwa kehidupan saya jalani dengan suami dan anak terasa menyenangkan, 30 orang (100 persen).

Data di atas dapat dimaknai, bahwa kemampuan karir ibu atau istri ditinjau dari aspek

faktor individu dalam penelitian ini ditemukan cukup baik terlihat dalam persentase sebesar 83,33-100 terhadap sikap tersebut. Di lapangan dapat dilihat dalam adanya sikap sesuai tentang saya selalu serius dalam bekerja untuk target karir saya; adanya sikap sesuai tentang saya cukup mampu menghadapi kesukaran yang ada; adanya sikap sangat sesuai sampai dengan sesuai tentang kehidupan dalam keluarga saya terasa menyenangkan; adanya sikap kurang sesuai tentang jarang membicarakan masalah terhadap suami atau keluarga; adanya sikap sangat sesuai sampai dengan sesuai tentang teman-teman kerja menunjukkan simpati terhadap kerja saya dan adanya sikap sangat sesuai sampai dengan sesuai tentang kehidupan saya jalani dengan suami dan anak menyenangkan.

Data yang ditemukan tersebut diperkuat oleh hasil penelitian Sekaran (1986), menemukan bahwa salah satu faktor utama yang mempengaruhi kemantapan karir wanita yang berkarir ganda yaitu pertama kepribadian yang meliputi kebutuhan individu (berprestasi, berafiliasi dan kebutuhan mandiri), kemampuan individu (percaya diri), perasaan berharga atau dihargai oleh orang lain, adanya keseimbangan antara kesuksesan dalam dunia kerja dan kebahagiaan rumah tangganya, dan konsep diri dan identitas diri yaitu adanya perlakuan dan persamaan derajat antara wanita dan pria. Dukungan yang positif dari keluarga akan dapat memberikan suatu penghargaan bagi seseorang dalam berkarir. Dalam teori Maslow, ada lima tingkatan kebutuhan dasar antara lain kebutuhan fisiologis, rasa aman, rasa cinta, penghargaan dan aktualisasi diri yaitu pengakuan akan potensi yang ada dalam dirinya (Trilaksmi, 2011). Penghargaan, pengakuan akan potensi yang dimiliki ibu/istri yang berkarir dari keluarganya akan memberi kemapanan pada karirnya, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

7. Kemapanan karir ibu atau istri dapat dilihat dalam aspek persepsi istri terhadap sikap suami, di lapangan dengan distribusi kuisioner oleh 30 responden (a) Kurang sesuai dengan sikap yang menyatakan, bahwa saya tidak maksimal dalam pekerjaan karena selalu memikirkan suami dan anak dirumah, ada 30 orang atau 100 persen (b) Kurang sesuai dengan sikap yang menyatakan, bahwa sering ragu-ragu dalam menentukan segala tindakan, ada 25 orang atau 83,33 persen (c) Kurang sesuai dengan sikap yang menyatakan, bahwa sering berbeda pendapat dengan suami/keluarga, ada sebanyak 22 orang atau 73,33 persen (d) Kurang sesuai dengan sikap yang menyatakan, bahwa karir saya adalah yang terpenting, ada 25 orang atau 83,33 persen (e) Sesuai dengan sikap yang menyatakan, bahwa saya banyak mendapatkan kesempatan penghargaan positif terhadap hasil kerja, ada 22 orang (73,33 persen). Data di atas dapat dimaknai bahwa kemampuan karir ibu atau istri ditinjau dari aspek persepsi istri terhadap sikap suami dalam penelitian ini ditemukan positif terlihat dalam presentase sebesar 73,33 -100 terhadap sikap tersebut. Di lapangan dapat dilihat seperti adanya sikap kurang sesuai tentang saya tidak maksimal dalam pekerjaan, karena selalu memikirkan suami dan anak dirumah; adanya sikap kurang sesuai tentang sering ragu-ragu dalam menentukan segala tindakan; adanya sikap kurang sesuai tentang sering berbeda pendapat dengan suami atau keluarga; adanya sikap kurang sesuai tentang karir saya adalah yang terpenting dan adanya sikap sesuai tentang saya banyak mendapatkan kesempatan penghargaan yang positif terhadap hasil kerja. Data yang ditemukan di atas diperkuat hasil penelitian Behrmen (1982) menemukan, bahwa bagi para wanita karir yang telah berkeluarga, adanya dorongan dan sikap suami merupakan faktor penentu bagi dirinya untuk mencapai kesuksesan/kemantapan karir. Semakin positif sikap suami terhadap karir istri, artinya dalam kehidupan

sehari-hari suami banyak memberi perhatian dan dorongan yang baik terhadap istrinya di dalam menempuh karir, maka semakin positif pula sikap istri terhadap karir yang ditempuh. Sebaliknya jika suami negatif, maka sikap istri terhadap karir juga menjadi negatif. Hasil survei Burke dan Weir (dalam Staines, Pottick dan Fudge, 1986), yang dilakukan terhadap 189 pria yang bekerja secara profesional menemukan, suami yang istrinya bekerja ternyata memiliki kepuasan kerja yang lebih rendah apabila dibandingkan dengan suami yang istrinya tidak bekerja.

D. Penutup

Kesimpulan: Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan $r = 0,381$ dengan $p = 0,036$ ($p < 0,05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa ada korelasi positif yang signifikan (taraf signifikan 5 persen) antara sikap keluarga terhadap wanita karir sebagai ibu atau istri dengan kemapanan karir untuk kesejahteraan keluarga. Artinya, semakin tinggi *score* sikap keluarga terhadap wanita karir sebagai ibu atau istri, maka semakin tinggi *score* kemapanan karir untuk kesejahteraan keluarga. Koefisien determinasi sebesar 0,145 yang dapat dijelaskan bahwa variabel sikap keluarga terhadap wanita karir sebagai ibu atau istri menyumbangkan sebesar 14,5 persen sedangkan sebesar 85,5 persen disebabkan oleh variabel lain yang tidak dilibatkan dalam penelitian ini. Dukungan keluarga dalam penelitian ini, terlihat dari sikap keluarga terhadap istri atau ibunya yang berperan ganda yaitu terlibat dalam dunia kerja sangat positif, sehingga sebagai ibu atau istri yang bekerja sangat terbantu dalam kemapanan karirnya, yang semua berdampak pada peningkatan kesejahteraan keluarga.

Rekomendasi: Berdasarkan kesimpulan di atas direkomendasikan kepada Kementerian Sosial, khususnya Direktorat Pemberdayaan Keluarga khususnya wanita yang berperan ganda dalam mengembangkan kebijakan peningkatan kesejahteraan keluarga, perlu menyosialisasikan pada keluarga yang ibu/istrinya berkarir ganda

perlu adanya dukungan dari keluarga melalui keterbukaan antara pasangan dan anggota keluarga lain komunikasi secara rutin dan terus menerus mengenai masalah-masalah yang ada dalam keluarganya, serta selalu bersikap dan berpikir positif kepada pasangannya yang bekerja, agar tidak terjadi konflik sehingga dapat saling menyesuaikan untuk mencapai kesuksesan dalam kemantapan karir di masa mendatang dan kesejahteraan keluarganya .

Pustaka Acuan

- Alimatus Sahroh. (1996). *Takut Sukses Wanita Karier*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Beach, D.S. (1980). *Personal : The Management of People at Work* . New York: Mac Millan Publishing.
- Bernadus Wibisono. (1992). *Hubungan antara Intensitas Komunikasi dengan Tingkat Penyesuaian Diri dalam Perkawinan Pada Pasangan Katholik*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM.
- Bimo Walgito. (1984). *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM.
- Hall, E. (1983). *Psychology Today*. Newyork: Random House.
- Hardjito, (1979). *Peran Wanita Karier dalam Masa Pembangunan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hartati. (1984). *Hubungan antara Perilaku Pria dalam Masa Klimak Terima dengan Wanita Karier sebagai Istri*. Jakarta: Kesehatan Jiwa Dharmawangsa.
- Djamaludin Ancok. (1986). *Wanita Karier*. Yogyakarta: Primagama.
- Krech,D., Crutchfield,R,S. and Ballachey, E.L. (1982). *Individual In Society*. Mc Graw-Hill International Book Company.
- Mar'at. (1981). *Sikap Manusia, Perubahan Serta Pengukurannya*. Bandung: Ghalia Indonesia.
- Martaniah. (1988). *Wanita Karier dan Pendamping Suami*. Yogyakarta: Dharma Wanita UGM.
- Masdani, (1983). *Psikologi Perkawinan dan Pendidikan di dalam Keluarga*. Media Hospitalia Nomor 70.
- Nani Suwondo.(2010). *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Totok Mardikanto. (2011). *Wanita*. Surakarta: Tri Tunggal Tata Fajar.
- Sadli, S. (1991). *Mempersiapkan Wanita Dewasa Muda Menjelang Abad XI*. Makalah Seminar Nasional Wanita. Bogor : Pusat Antar Universitas-Universitas Terbuka.
- Sekaran, U. (1986). *Dual Career Families*. California: Jossey-Bass. Publisher.

- Simanjuntak, D.J. (1989). *Wanita dan Karya*. Jakarta: Makalah Seminar Nasional II Wanita Indonesia, Fakta dan Citra.
- Staines, G.L., Pottick, K.J., & Fudge, D.A. (1986). *Wives Employment and Husbands Attitude Toward Work and Life*. Journal of Applied Psychology. Vol 71. No 1.
- Sukadji, S.(2011). *Keluarga dan Keberhasilan Pendidikan*. Jakarta: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.
- Sungkono Adi Wikarto. (1989). *Hubungan Antara Sikap Suami terhadap Karir Istri dengan Kemantapan Karir yang Dicapai Istri dalam Kehidupan Keluarga yang Berkarir Ganda*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM.
- Suratiah, K. (1991). *Wanita dan Penyimpangan*. Jawa Pos. 20 April 1992.
- Trilaksmi Udiati,dkk.(2011). *Pemberdayaan Keluarga Miskin Potensial dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga*. Yogyakarta: B2P3KS Press.
- Yuwono.S. (2012). *Pokok-Pokok Kebijakan Ketengakerjaan Khususnya Wanita*. Jakarta: Program Pengembangan Karier Wanita: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial.

Pemberdayaan dan Pengembangan Potensi Lansia menghadapi Masa Pensiun

Empowerment and Development of Elderly Potential Facing Retirement Period

Tomy Hendrawanto

Yayasan Silaturrahim Pecinta Anak (SPA) Indonesia.

Jl. Affandi Pelemkecut CT X/14 Depok Sleman, Yogyakarta 55281.

Telpon (0274) 584186, HP. 85225951270. Email: yayasanspai@gmail.com.

Diterima 26 Agustus 2016, diperbaiki 8 September 2016, disetujui 23 September 2016.

Abstract

There are many things that must be prepared for the elderly when facing retirement, so that they can live healthy, active and independent. This paper aims to explore and describe the empowerment and development of elderly potential, they should be able to determine the career options after entering retirement. The article uses a qualitative approach writing, data are analysed through descriptive technique. This paper is based on the discovery of a problematic condition associated with the elderly and retired, the empowerment and development of elderly potential facing retirement. The purpose of this study was to identify the factors that cause variety of problems that arise in order to provide practical solutions. The result is that there are three things for the elderly to the empowerment and development their potential career. First, to continue his career in accordance with the career of origin, same institution and place or in different place but same plane. Second, continue his career outside the home career path with self-employed and services. Third, enjoying retirement by increasing the worship, close to the family, do their hobby and socializing. It can be concluded that the empowerment and development potential of the elderly is an effort to learn about and appreciate the process of life long career when facing retirement.

Keywords: *empowerment; development; elderly; retirement*

Abstrak

Ada banyak hal yang harus dipersiapkan bagi lansia ketika menghadapi masa pensiun, agar para lansia dapat hidup sehat, aktif dan mandiri. Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan mendeskripsikan pemberdayaan dan pengembangan potensi lansia. Lansia harus dapat menentukan pilihan karir yang akan digeluti setelah memasuki masa pensiun. Penulisan artikel ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif. Fokus dalam kajian ini berdasarkan pada ditemukannya suatu kondisi problematik terkait dengan lansia dan pensiun, pemberdayaan dan pengembangan potensi lansia ketika menghadapi masa pensiun. Tujuan kajian ini untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan berbagai permasalahan yang muncul untuk kemudian memberikan solusi praktis terkait permasalahan tersebut. Hasil kajian adalah ada tiga hal yang dapat direncanakan bagi lansia untuk pemberdayaan dan pengembangan potensi dalam karir. Pertama, melanjutkan karir sesuai dengan karir asal, yakni di lembaga yang sama serta di tempat yang sama atau di tempat yang berbeda pada bidang yang sama. Kedua, melanjutkan karir di luar jalur karir asal dengan bentuk wiraswasta dan jasa. Ketiga, menikmati masa pensiun dengan meningkatkan ibadah, dekat dengan keluarga, menjalankan kegemaran dan bersosialisasi. Kesimpulan, bahwa pemberdayaan dan pengembangan potensi lansia merupakan usaha untuk mempelajari dan menghargai proses panjang kehidupan karir lansia ketika menghadapi masa pensiun.

Kata kunci: *pemberdayaan; pengembangan; lansia; masa pensiun*

A. Pendahuluan

Menurut data Kementerian Kesehatan pada tahun 2012, Indonesia termasuk negara Asia ketiga dengan jumlah absolut populasi di atas 60

tahun, terbesar setelah Cina (200 juta), India (100 juta) dan menyusul Indonesia (25 juta), bahkan diperkirakan Indonesia akan mencapai 100 juta lanjut usia (lansia) dalam tahun 2050, salah satu

faktor penyebab adalah meningkatnya harapan hidup masyarakat Indonesia. Individu yang termasuk dalam kategori lansia adalah pekerja atau non pekerja yang sudah tidak mampu bekerja lagi seperti biasanya atau sudah berakhir masa karirnya. Jika mengacu pada pasal 40 ayat 4 Undang-undang Nomor 4 tahun 2005 tentang guru dan dosen, seorang guru atau dosen pensiun di usia 60 tahun karena sudah memasuki fase lanjut usia. Di usia tersebut dapat ditetapkan sebagai individu lansia secara umum, baik secara institusional maupun konstitusional.

Pertumbuhan lansia yang pesat juga terkait dengan ledakan pertumbuhan jumlah pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2025 dengan jumlah menyentuh angka 2,5 juta jiwa, dengan tanggungan pembiayaan pada APBN mencapai 175 triliun. Lansia di Indonesia tetap harus didorong potensinya, sehingga dapat hidup sehat, aktif dan mandiri. Hal dapat mengubah paradigma yang menyatakan, bahwa lansia “telah habis dan tidak berguna” menjadi sosok lansia yang memiliki potensi dan dapat dikembangkan sebagai aset pembangunan, serta berkontribusi bagi pembangunan bangsa melalui pemikiran dan karya-karyanya (Sri Sultan Hamengku Buwono X: 2013, 6-7).

Lansia sama sekali tidak terbatas dalam mengembangkan pribadi dan karirnya, karena penuaan dan kondisi fisik yang menurun sejatinya bukan merupakan hambatan yang berarti bagi seorang lansia untuk dapat mengaktualisasikan diri pada tarap tertinggi dalam kehidupannya. Beberapa tokoh besar dunia justru tenar ketika memasuki usia lanjut, di antaranya Ronald Reagan, menjadi presiden Amerika Serikat ketika berusia 70 tahun. Mahatma Gandhi, mencapai puncak popularitasnya ketika berusia 75 tahun. Bunda Teresa, terus bekerja untuk amal (sosial) sampai meninggal di usia 87 tahun (Eric B. Shiraev dan David A. Levy, 2012). Di Indonesia sendiri, sosok yang tetap bersinar dalam usia lanjut pascapensiun adalah seperti presiden ketiga Republik Indonesia B.J Habibie yang berusia 79

tahun, setelah sekian tahun bergelut dalam dunia teknik penerbangan dan perkeretaapian, kemudian menjadi birokrat (Wakil Presiden dan Presiden RI), lalu sebagai guru bangsa dan inspirator bagi banyak generasi muda. Hal ini menegaskan bahwa pada diri lansia, istilah pensiun menjadi semacam pemberhentian sementara, kemudian dilanjutkan sebuah langkah besar, bahkan dengan hasil yang lebih besar di masa akhir kehidupan mereka.

Untuk mewujudkan hal tersebut, di negara maju bursa karir bagi lansia menunjukkan perkembangan yang jauh lebih baik, jika dibandingkan dengan kondisi di negara berkembang seperti di Indonesia. Di Jepang misalnya, lansia yang pensiun dari kerjanya menjadi rebutan perusahaan dan instansi swasta, karena pengalaman yang dimiliki oleh mereka sangat bermanfaat untuk meningkatkan produktivitas serta operasionalisasi dalam manajemen perusahaan (Tarmizi Yusuf, 2009: 6). Siti Partini Suardiman (2011: 278) menyatakan, bahwa hal tersebut tentu saja memberikan sinyalemen yang baik dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan bagi lansia di kemudian hari, sehingga ketakutan akan keberlangsungan kehidupan yang baik (sejahtera) tidak akan menjadi hantu yang menakutkan, baik dalam hal materi maupun immaterial, karena peluang karir masih terbuka bagi mereka di masa mendatang (saat pensiun tiba). Hal ini menegaskan bahwa pemberdayaan dan pengembangan potensi lansia menjadi sebuah langkah pasti ketika menghadapi masa pensiun, yakni menuju *successfull aging*. Tujuan dari kajian ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan berbagai permasalahan yang muncul untuk kemudian memberi solusi praktis atas suatu permasalahan. Justifikasi yang dimunculkan dalam kajian berdasarkan pertimbangan, bahwa dalam kasus tersebut memungkinkan seseorang membongkar atau mengungkapnya (Tohirin, 2013: 22), terkait dengan pemberdayaan dan pengembangan potensi lansia ketika menghadapi masa pensiun.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Tulisan ini adalah kajian dari berbagai pustaka yang bersifat kualitatif, memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh materi kajian, membatasi kegiatannya hanya pada kajian bahan koleksi perpustakaan tanpa riset lapangan. Teknik kualitatif adalah suatu proses pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia (J.W. Creswell: 1998, 15). Tujuan utama kajian kualitatif adalah untuk memahami (*to understand*) fenomena dengan lebih menitikberatkan pada gambaran yang lengkap tentang yang dikaji daripada merincinya menjadi variabel-variabel yang saling terkait, memperoleh pemahaman mendalam tentang fenomena yang dikaji (Agus Salim, 2001: 11).

Analisis data yang digunakan *deskriptif* (Jacob Vredenberg: 1986, 34). Pergerakannya tidak hanya sebatas pengumpulan dan penyusunan data, tetapi mencakup analisis dan interpretasi tentang data tersebut, yang secara fundamental dapat diungkapkan bahwa sebuah deskripsi adalah representasi objektif terhadap fenomena yang dikaji (Winarno Surachmad, 1970: 133). Moleong (2002, 3) menyatakan, bahwa penelitian kualitatif merupakan tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial (*social science*) yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasan sendiri dan berkenaan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya. Fokus kajian ini berdasarkan pada ditemukannya suatu kondisi problematik terkait dengan lansia dan karir.

C. Pemberdayaan dan Pengembangan Potensi Lansia Menjelang Pensiun

Perubahan terjadi dalam konstelasi kehidupan lansia ketika berada dalam masa pensiun, di antaranya berisi hambatan dan tantangan, begitu juga dengan peluangnya. Hambatan jelas terbayang bagi setiap lansia, tidak hanya mereka yang akan memasuki masa pensiun, tetapi juga mereka yang tengah berada dalam puncak karirnya. Misalnya, kondisi fisik yang mulai melemah, sakit-sakitan dan memiliki tingkat

ketergantungan yang tinggi pada orang lain (keluarga dan kerabat), bertolak belakang dengan kondisi ketika di usia muda, masa awal memulai karir. Pada konsisi ini lansia berusaha mempertahankan kehidupan (*defensive strategy*).

Kehilangan peran yang dulu menjadi bagian dari dirinya, juga menjadi hambatan dan tantangan lansia di masa pensiun. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor keahlian yang telah usang dan kurang adaptif dengan perkembangan zaman, minimnya ruang kepercayaan dan peluang di negara-negara berkembang terhadap potensi dan kapabilitas lansia. Tantangan selanjutnya adalah hilangnya penyangga ekonomi (*financial*) yang menjadi sumber utama penghidupan, ditandai dengan tidak diperolehnya penghasilan (gaji) secara rutin seperti pada masa karirnya (Siti Partini Suardiman, 2011: 138-139).

Setelah melihat realitas dari hambatan dan tantangan tersebut, tidak berarti bahwa para lansia tidak memiliki peluang pemberdayaan dan pengembangan yang memungkinkan untuk berdikari, karena seperti individu lain potensi seseorang tidak berhenti pada satu dimensi masalah saja, tetapi berlanjut pada dimensi lain sebagai peluang. Menurut Tarmizi Yusuf (2009: 2-5), ada beberapa peluang dan modal yang sangat berguna bagi seorang lansia, di antaranya memiliki waktu yang luang, terbebas dari beban kerja, memiliki banyak kolega dan relasi, dan kaya pengalaman dan kebijaksanaan.

Pekerja yang lebih tua cenderung lebih bisa diandalkan, hati-hati, bertanggung jawab, dan lebih disiplin dengan waktu dan materi, dibanding dengan pekerja yang masih muda. Meskipun pekerja yang lebih muda cenderung lebih baik dalam tugas-tugas yang menuntut respons yang cepat, pekerja yang lebih tua cenderung lebih mampu dalam tugas yang mementingkan ketepatan, irama tetap dan penilaian yang dewasa (Diane E. Papalia, et. al., 2009: 415). Modal dan peluang tersebut yang kemudian menjadi investasi individu lansia untuk dapat mengembangkan potensi yang berguna bagi kehidupan memasuki masa pensiun, sehingga dapat menjalani hidup dengan harmonis dan terhindar dari

persoalan pelik dalam masa akhir kehidupan karirnya.

Menurut Haryono Suyono (Yayasan Damandiri-Jakarta), bahwa penanganan dalam bentuk pemberdayaan terhadap lansia atau calon pensiunan seyogyanya dimulai sejak dini, yakni pada kisaran usia 50 tahun, dikarenakan pada tahap ini merupakan puncak produktivitas karir dan sekaligus merupakan tanda akhir dari perjalanan karir. Bentuk pelatihan atau *coaching* yang dapat diberikan bagi lansia dalam menghadapi masa pensiun, seperti di dalam program yang dilaksanakan oleh Pos Gorontologi (Porsegi) yang keberadaannya dapat di akses sampai ke lapisan terbawah lingkungan masyarakat (desa). Melalui program ini diharapkan lansia dapat berbaaur dengan masyarakat di luar lingkungan kerjanya.

Lembaga-lembaga pemerintah seperti Kementerian Sosial, Bappenas dapat melakukan inventarisir lansia profesional yang kemudian dapat diarahkan menjadi tenaga pengajar (misalnya menjadi dosen tamu di perguruan tinggi), sehingga ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh pensiunan dapat diwariskan pada generasi muda. Program kegiatan pemberdayaan lansia di lapangan dapat menjadi suatu kegiatan stimulasi otak yang menyenangkan dan menjadikan lansia lebih berperan aktif dan produktif, bukan hanya sekedar menghambat proses kemunduran otak, melainkan juga dapat meningkatkan kualitas hidup lansia dan orang di sekitarnya.

Secara garis besar, berbasis pada kepentingan kegiatan stimulasi otak lansia di komunitas, menurut Kementerian Kesehatan (2012), terbagi dalam tiga kegiatan utama, seperti aktivitas fisik, stimulasi mental, dan aktivitas sosial. Aspek kegiatan spiritual juga merupakan hal penting yang dapat menstimulasi otak lansia, tetapi kegiatan spiritual dapat menjadi bagian aktivitas sosial dan stimulasi mental. Dalam proses stimulasi otak terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan, yakni menghormati, melibatkan, memilih, menyenangkan, dan memberi pujian.

Proses penuaan tidak dapat dihentikan, tetapi dapat diperlambat. Berdasarkan bukti ilmiah,

kegiatan stimulasi otak yang bermanfaat, seperti aktivitas fisik, stimulasi mental, dan aktivitas sosial dapat meningkatkan kualitas hidup lansia dibandingkan secara tersendiri. Peranan fasilitator sangat besar pada kelangsungan kegiatan kelompok lansia di komunitas, sehingga perlu dilakukan pelatihan fasilitator agar dapat berkomunikasi dengan lansia secara efektif dan berjalan dengan langgeng.

Menurut Robert Nathan dan Linda Hill (2012: 35) Individu yang berusia lanjut (lansia) harus dapat menentukan pilihan terhadap kemungkinan karir yang akan digeluti setelah memasuki masa pensiun. Hal ini dapat dilakukan dengan mengacu pada *career path* (jalur karir) yang tersedia. Karir bagi lansia mempertegas perkembangan kekinian bahwa meningkatnya harapan hidup serta tersedianya kebijakan karir yang “ramah karyawan lanjut usia”, sehingga sebuah perencanaan penting dilakukan oleh baik individu (lansia) maupun oleh lembaga serta dunia pendidikan. Menurut Siti Partini Suardiman, di antara pilihan yang dapat ditentukan dalam perencanaan karir bagi lansia untuk pemberdayaan dan pengembangan potensi lansia, secara umum adalah sebagai berikut.

Perencanaan Karir Berkelanjutan: Salah satu fakta bahwa proses perencanaan karir merupakan hal yang penting adalah bahwa di Amerika Serikat dan di berbagai negara di dunia terdapat banyak individu (lansia) yang tetap berkeinginan untuk melanjutkan karir (pekerjaannya), meskipun telah memasuki masa pensiun (Siti Partini Suardiman: 2011, 145). Kebanyakan individu yang sangat mencintai pekerjaannya, pensiunan bukan berarti mematikan harapan untuk dapat terus berkarir. Misalnya harapan untuk berkarir ditempat yang sama dan pada bidang yang sama merupakan hal lumrah bagi lansia. Kemauan lansia untuk pensiun pada kenyataannya lebih besar ketika bekerja pada kualitas yang rendah. Karyawan dengan tingkat pekerjaan dan pendidikan yang lebih tinggi menemukan bahwa pekerjaannya lebih menarik dan menjadi lebih merasa terikat dengan hal itu, dan sedikit tidak tertarik untuk pensiun walaupun

sikap mereka terhadap pensiun mungkin lebih baik. Semakin positif sikap seseorang terhadap pekerjaan, semakin negatif sikapnya terhadap pensiun, apalagi jika pekerjaan tersebut sangat penting dalam kehidupan seseorang (Yeniar Indriana, 2012: 41).

Loyalitas yang tinggi terhadap instansi merupakan sebuah alasan lebih meyakinkan seseorang untuk terus bertahan pada suatu instansi. Alasan yang cenderung bersifat prinsipil dan idealis membuat lansia semakin kuat bertahan sekalipun mereka hanya memperoleh sebagian kecil dari hak yang mereka peroleh (ketika sebelum pensiun), karena yang menjadi pertimbangan adalah berkaitan dengan kebermaknaan hidup (*meaningfull life*) seperti penganut *idealism spiritualisme* (Komaruddin Hidayat, 2013: 165-166).

Pada pilihan perencanaan karir, lansia dapat meneruskan sesuai dengan jalur karir yang ada dan telah digeluti. Kecenderungan ini sangat mungkin terjadi apabila individu memang merasa nyaman untuk terus beraktivitas dan mengabdikan diri di tempat dan bidang yang sama, selagi individu tersebut masih dibutuhkan oleh lembaga yang bersangkutan. Keputusan untuk meneruskan karir pada lembaga atau jalur yang sama, sepantasnya memang menjadi keinginan banyak orang yang memasuki masa pensiun, karena tidak membutuhkan perjuangan yang besar dan tidak berakibat pada terjadinya kegoncangan sebagai reaksi terhadap proses adaptasi seperti mereka yang memilih di luar jalur utamanya.

Lansia juga harus dapat menerima apabila ternyata di dalamnya terdapat suatu bentuk rasionalisasi kebijakan yang diberlakukan terhadap diri lansia terkait dengan beban kerja, penghasilan, dan tunjangan. Hal ini tentu saja merupakan hak *prerogative* dari lembaga yang bersangkutan, jika memilih karir yang sama, tetapi ditempat yang berbeda. Pilihan ini biasanya dilakukan oleh lansia yang setelah pensiun kemudian terus melanjutkan aktivitas sejenis, tetapi *setting* lingkungan berbeda, lansia seperti ini cenderung berencana untuk tetap melakukan kegiatan sejenis tetapi dalam situasi yang baru. Hal ini

tentu saja berdampak positif karena individu dapat memaksimalkan pengalamannya untuk memungkinkan memperoleh produktivitas jauh lebih baik daripada kehidupan karirnya dahulu (Muhammad Surya, 2013: 391). individu (lansia) tidak terlalu kehilangan keseimbangan setelah berhenti dari pekerjaan terdahulu, tetapi justru dapat mengakselerasikan dirinya secara maksimal pada perannya kemudian.

Berkarir di Luar Lembaga Asal: Muhammad Surya juga menyatakan, bahwa pilihan perencanaan karir jenis memungkinkan individu setelah memasuki lansia dapat memulai kegiatan atau usaha yang baru berbeda dengan pola (karir) sebelum pensiun. Pilihan ini memungkinkan lansia dapat memaksimalkan semangat berwiraswasta dan daya adaptasi terhadap sebuah dunia karir baru. Tarmizi Yusuf memberi pandangan, bahwa sebagai usaha untuk kembali membangun karir yang baru, diperlukan usaha yang serius dan tekun untuk mempelajari keahlian baru yang disesuaikan dengan bakat, minat, peluang, dan perkembangan kemudian. Dalam usaha untuk menyongsong karir baru, individu (lansia) perlu menyadari perubahan yang dialami setelah pensiun tiba, di antaranya keharusan individu untuk belajar kembali terkait dengan jenis bidang usaha yang hendak digeluti, penguasaan keterampilan berkomunikasi, manajemen keuangan, perkembangan teknologi dan penampilan.

Keinginan lansia untuk tetap bekerja juga sangat terkait dengan semangat kemandirian yang dilandasi oleh keinginan untuk tidak memiliki ketergantungan, termasuk ketergantungan penghidupan kepada kerabat (anak atau pasangan). Hal ini dikarenakan bahwa dalam kultur masyarakat Timur, kebergantungan lansia terhadap anak dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup, baik materi maupun non-materi didasari oleh rasa tanggung jawab yang besar di miliki oleh anak, bukan berdasarkan atas kesukarelaan yang berkembang di masyarakat barat (Eric B. Shiraev dan David A. Levy, 2012). Hal yang patut diperhatikan dalam usaha memulai sebuah karir baru adalah dengan kemampuan khusus atau bakat terpendam yang dimiliki oleh in-

dividu, tetapi tidak sempat tersalurkan karena waktu dan tenaga yang dimiliki tersita untuk menjalani karir utamanya, kemudian di bangkitkan dan dikembangkan di masa pensiun.

Menikmati Waktu Luang di Masa Pensiun: Keputusan lansia untuk menikmati masa pensiun jelas merupakan sebuah pilihan yang beralasan, karena situasi ini dapat menikmati hobi, kebebasan melakukan kesibukan lain, kehidupan lebih santai, jauh dari tekanan dan kewajiban yang berhubungan dengan pekerjaan, tidak ada lagi jam bangun pagi dan jadwal harian yang harus diikuti (Yeniar Indriana: 2012, 42). Menikmati masa pensiun dengan banyak waktu luang bukan merupakan sebuah kerugian, didasari oleh keyakinan bahwa banyak orang yang memiliki kesuksesan besar dalam kehidupan berawal dari tersedianya waktu untuk berkotemplasi di tengah kehidupan santai, rileks dan meditatif.

Apabila dirumuskan perihal kegiatan menikmati masa pensiun, dapat digolongkan kepada: Keinginan untuk lebih dekat dengan Tuhan (beribadah). Seperti terlibat dalam kepengurusan rumah ibadah (masjid/gereja), menjadi da'i atau penginjil, dan menjalani serangkaian ritual ibadah rutin seperti shalat, mengaji, dan dzikir bagi yang beragama Islam. Lebih dekat dengan keluarga (anak-cucu), secara emosional keluarga memiliki daya gravitasi paling besar dalam kehidupan lansia. Buktinya, karir seseorang dapat terbangun dengan kokoh dan otentik apabila di dalamnya terdapat dukungan soliditas keluarga yang baik, serta terbina dengan kualitas cinta dan kasih sayang di dalamnya. Menikmati kegemaran (hobi) yang mungkin tidak dapat disalurkan secara maksimal ketika masih aktif bekerja (Komarudin Hidayat, 2013).

Lansia yang memasuki masa pensiun dan memiliki waktu luang, akan merasa jenuh apabila tidak diimbangi dengan aktivitas fisik, salah satunya adalah dengan menyalurkan kepada serangkaian kegemarannya, mencakup berbagai bidang, seperti olahraga, seni dan organisasi. Olahraga yang dilakukan tentu saja disesuaikan dengan kondisi fisik yang telah memasuki usia

tua (lansia). Persoalan seni merupakan sebuah ekspresi emosi yang terkait dengan kepuasan dan kesenangan pribadi terhadap nilai estetika dan budaya. Kegiatan organisasi mencakup wilayah luas dalam pergaulan individu, seperti keikutsertaan dalam organisasi sosial, agama, budaya, dan politik (Tarmizi Yusuf, 2009: 109-118).

D. Penutup

Berdasarkan hasil penulisan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa lansia dapat merencanakan karirnya demi pemberdayaan dan pengembangan potensinya. Tiga hal perencanaan karir bagi lansia ketika menghadapi masa pensiun. Pertama, merencanakan karir sesuai dengan jalur karir awal, baik pada bidang dan tempat yang sama atau perencanaan karir pada bidang yang sama tetapi pada tempat yang berbeda. Pada bidang yang sama dan tempat yang sama, perencanaan karir ini sepenuhnya tidak memiliki perubahan dari karir yang dijalani saat setelah pensiun. Lansia, sejatinya tidak ada kata pensiun dalam kehidupan pengabdian di dunia kerja. Di bidang yang sama tetapi tempat yang berbeda, justru hal ini juga terwujud pada keinginan individu untuk keluar dari struktur kelembagaan yang menaungi karirnya selama aktif bekerja dan kemudian memutuskan untuk menjalani kehidupan karir di lembaga lain secara mandiri.

Kedua, merencanakan karir di luar karir awal. Keputusan ini sepenuhnya melepaskan diri dari keterikatan karir awal dan melepaskan diri dari struktur kelembagaan, baik secara terpaksa oleh aturan maupun keinginan pribadi. Keinginan lansia adalah untuk merefleksikan sebuah semangat kemandirian dan kegigihan dalam karir akhirnya, sehingga secara tidak langsung membantah *ageism* yang kerap disematkan pada pribadi lansia yang tidak terikat karir dan jabatan secara institusional. Ketiga, merencanakan karir dengan hanya menikmati masa pensiun, merupakan pemilihan terhadap serangkaian kegiatan yang bersifat *non-materiil*, misalnya beribadah yang dianggap menjadi pilihan yang terbaik bagi lansia untuk menikmati masa tuanya, beribadah

secara personal seperti mendekatkan diri kepada tuhan, dan beribadah secara sosial seperti mengabdikan diri kepada masyarakat.

Memasuki masa pensiun juga ada yang memilih untuk mendekatkan diri dengan keluarga, menghabiskan waktu bersama anak-cucu dalam lingkungan keluarga menjadi keputusan untuk menikmati masa tuanya, atau menjalankan kegemarannya sebagai sarana penyaluran hobi yang terpendam atau belum sempat secara *intens* dilakukan ketika masih aktif bekerja, tetapi terdapat juga kegemaran yang awalnya hanya sebatas hobi, tapi akhirnya menjadi sarana bersosial bahkan menjadi bisnis. Perencanaan karir demi pemberdayaan dan pengembangan potensi lansia menjadi usaha untuk mempelajari dan menghargai proses panjang kehidupan karir individu lansia dan harus disiapkan masa tuanya dengan lebih baik.

Pustaka Acuan

- Buwono, Sri Sultan Hemangku X (2013). *Penduduk Lanjut Usia Sebagai Aset, Bukan Beban*, dalam Survey Meter, *Memanusiakan Lanjut Usia: Penuaan Penduduk dan Pembangunan Indonesia*, Yogyakarta: Surveymeter, 2013
- Creswell, J.W. (1998). *Qualitatif Inquiry and Research Design*, California: Sage Publications.
- Hidayat, Komaruddin (2013). *Life's Journey; Hidup Produktif dan Bermakna*, Bandung: Noura Books.
- Indriana, Yeniar (2012), *Gerontologi & Progeria*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kementerian Kesehatan (2013), *Gambaran Kesehatan Lanjut Usia di Indonesia*, Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan, semester I 2013. Jakarta: Kementerian Kesehatan.
- Moleong, Lexy J. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nathan, Robert dan Linda Hill (2012). *Career Counselling; Konseling Karier*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Papalia, Diane E. et. al. (2009). *Human Development (Perkembangan Manusia)*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Salim, Agus. (2001). *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial: Dari Denzim Guba dan Penerapannya*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Shiraev, Eric B. dan David A. Levy (2012). *Psikologi Limas Kultural*, terj. Tri Wibowo B.S, Jakarta: Kenca.
- Suardiman, Siti Partini, (2011). *Psikologi Lanjut Usia*, Yogyakarta: UGM Press.
- Surachmad, Winarno, *Dasar dan Teknk Research: Pengantar Metodologi Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1970
- Surya, Muhammad, (2013). *Psikologi Guru: Konsep dan Aplikasi dari Guru untuk Guru*, Bandung: Alfabeta.
- Suyono, Haryono, (2011). *Pemberdayaan Menyongsong Peran*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Tohirin, (2013). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-undang Nomor 4 tahun 2005, tentang Jabatan Guru dan Dosen.
- Vredenberg, Jacob (1986). *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia.
- Yusuf, Tarmizi (2009). *Mencegah Post Power Syndrome Pasca Pensiun*, Jakarta: Salemba Empat.

Komunitas Miskin dengan Usia Harapan Hidup Panjang

Poor Community with Long Life Expectancy

Gunanto Surjono

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Jl Kesejahteraan Sosial No 1, Yogyakarta.

Telpun (0274) 377265. HP +628156851144. E-mail: <suryogunanto@gmail.com.>

Diterima 11 Juli 2016, diperbaiki 11 Agustus 2016, disetujui 27 September 2016.

Abstract

Living on a remote island usually associated in general with poverty, far from food adequacy, limited health service, low life resources diversification, and poor mobile facility to go out of their island. But people from Giliyang Island, Sumenep Regency, Madura, East Java Province, show themselves different from general association. They, who have been living through generations and relatively poor, have high life expectancy, far longer from national life expectancy level. Through interview with several public and non-formal figures, field observation, and documentary analysis, found that elderly people looked more dominant in number than other age groups, yet they lived in fresh and healthy condition. More insight on the island and its people revealed that oxygen deposit and its explosion on the island were very high (highest in the world), bringing the air clean and fresh, inhaled everyday and for a long time by the locals inhabiting the island, made the people avoid from disease caused by polluted air, looking fresh, healthy, and long life.

Keywords: *poverty; oxygen; long life expectancy*

Abstrak

Hidup di pulau terpencil dengan fasilitas terbatas secara umum mengasosiasikan pada masyarakatnya yang miskin, jauh dari ketercukupan makan, minimnya layanan kesehatan, rendahnya diversifikasi sumber penghidupan, dan terbatasnya sarana mobilitas untuk lepas dari keterpencilannya. Namun masyarakat Pulau Giliyang, Kabupaten Sumenep, Madura, Provinsi Jawa Timur, membuktikan lain. Mereka yang sudah hidup secara turun temurun dan relatif miskin tersebut memiliki usia harapan hidup tinggi, jauh melebihi usia harapan hidup rata-rata nasional. Melalui pendekatan wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat setempat (formal dan informal), observasi lapangan, dan telaah dokumen, ditemukan jumlah penduduk usia lanjut sangat dominan, bahkan mereka hidup dalam kondisi tubuh bugar, tidak terkesan penyakit. Hasil penelusuran lebih jauh tentang pulau dan masyarakat menemukan, bahwa kandungan oksigen yang tinggi dan kadar pancarannya yang tinggi ternyata membuat kondisi udara bersih dan segar, yang dihirup setiap hari oleh penduduk yang tinggal di pulau tersebut, sehingga terhindar dari gangguan penyakit akibat udara polutif, yang membawa konsekuensi pada tubuh bugar, sehat, dan umur panjang.

Kata kunci: kemiskinan; oksigen; harapan hidup tinggi

A. Pendahuluan

Kemiskinan, biasanya identik dengan usia harapan hidup yang rendah. PBB, memasukkan usia harapan hidup rendah sebagai salah satu dari tiga indikator utama dalam mengukur kualitas hidup suatu bangsa. Dua indikator lainnya adalah kematian bayi lahir dan angka melek huruf (*literacy*). Argumentasi PBB dalam memasukkan usia harapan hidup tinggi, jelas bahwa apabila suatu bangsa memiliki masalah kemiskinan, usia harapan hidupnya akan pendek karena hari-hari

kehidupannya diisi dengan kekurangan kebutuhan hidup dasar (makan, minum, lingkungan hidup sehat) sehingga rentan terhadap berbagai penyakit yang tidak dapat membawa suatu bangsa ke umur panjang.

Dalam kehidupan generasi berikutnya, suatu bangsa yang miskin akan melahirkan generasi yang miskin pula, bahkan dimungkinkan begitu lahir kemudian mati, kalau pun hidup ketahanan raganya juga rapuh, tidak mampu mengikuti pendidikan yang memadai akibat keterbatasan biaya,

sehingga mengalami tingkat melek huruf yang rendah (*low literacy*). Kelompok miskin dengan kualitas hidup rendah tersebut kebanyakan bertempat tinggal di daerah dan pulau terpencil dengan sumberdaya alam terbatas (*tandus*), di kota dengan tingkat kepadatan penduduk (*density*) tinggi dan lingkungan kumuh, sehingga siklus miskin, sakit-sakitan, melek huruf rendah, dan umur pendek menjadi aksioma linear suatu bangsa dengan kualitas hidup rendah.

Namun ada pepatah, tidak ada suatu aksioma tanpa perkecualian, *there is no axiom without exception*, aksioma tersebut di Indonesia mendapati perkecualiannya. Di tengah pemikiran asosiatif bahwa suatu masyarakat yang tinggal di daerah dan pulau terpencil, di permukiman kumuh pasti kehidupannya selalu miskin, terdapat komunitas yang hidup di pulau terpencil dengan kondisi kehidupan yang relatif miskin pula, tetapi justru usia harapan mereka panjang, bahkan kelompok usia lanjut di atas 80 tahun mendominasi (23,5 persen) distribusi usia penduduk masyarakat dengan perkecualian tersebut, kalau penduduk lanjut usianya dihitung mulai 60 tahun, jumlah lanjut usia melebihi 50 persen dari keseluruhan distribusi usia penduduknya. Komunitas yang dimaksud adalah penduduk Pulau Giliyang, Kabupaten Sumenep, Madura, Provinsi Jawa Timur, yang secara umum miskin tetapi memiliki usia harapan hidup tinggi jauh melebihi usia harapan hidup nasional (69 tahun). Bertitik tolak dari kondisi kehidupan masyarakat Giliyang tersebut yang mendorong dilakukannya penelitian ini, guna menjawab faktor yang dapat membawa masyarakat Pulau Giliyang ke umur panjang.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, untuk menggambarkan kondisi realitas kehidupan umur panjang berdasarkan pemaknaan, perasaan, yang dialami masyarakat sebagai subjek yang diteliti (*emique*, Budi Harsono, 2002: 17), dalam konteks penelitian ini adalah masyarakat Pulau Giliyang, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep, Madura, Provinsi Jawa Timur. Pengumpulan

data dilakukan melalui teknik wawancara dengan beberapa informan, dilengkapi dengan triangulasi data yang diperoleh melalui observasi di lokasi penelitian dan telaah dokumen, sebagai triangulasi metode (Robert Stake, 1995: 112) dalam mengungkap kondisi masyarakat miskin di Pulau Giliyang tetapi memiliki usia harapan hidup panjang. Observasi secara menyeluruh dimungkinkan karena Pulau Giliyang relatif kecil, yang dapat diobservasi keliling selama dua jam dengan menggunakan sepeda motor.

Pendataan dari hasil wawancara dan observasi ditriangulasikan dengan data yang diperoleh dari hasil telaah dokumen dari administrasi pemerintah setempat, terutama dari aspek distribusi penduduk, matapencaharian, peralihan hak atas tanah, penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS), dan penerimaan bantuan sosial bagi sebagian penduduk Pulau Giliyang. Analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif kualitatif, dengan menginterpretasikan sedekat mungkin kondisi kehidupan penduduk Pulau Giliyang sesuai dengan realitas pengalaman dan pemakaian, yang dirasakan tentang kemiskinan dan usia harapan hidup panjang menurut pandangan pihak luar.

C. Masyarakat Miskin dan Usia Harapan Hidup Panjang

Deskripsi Wilayah: Pulau Giliyang berada di tengah hamparan lautan luas timur Pulau Madura, dapat ditempuh selama satu jam dengan menggunakan transportasi umum satu-satunya (perahu) dari Pelabuhan Dungkek, Kabupaten Sumenep, sebagai kabupaten yang menaungi secara administratif pemerintahan desa Pulau Giliyang. Kondisi tanah pertanian Pulau Giliyang relatif tandus, hanya 16,5 persen dari tanah keseluruhan pulau yang dapat ditanami padi, karena minimnya sumber air tawar yang menjadi tulang punggung usaha pertanian. Di Pulau Giliyang sumber air tawar tidak dapat memancar menjadi sungai seperti sumber air di daerah lain, sehingga penduduk harus merekayasa sumber air tawar statis untuk dapat digunakan sebagai

penghidup tanaman padi. Usaha pertanian lain, seperti jagung, kedelai, dan tembakau dapat dilakukan oleh kebanyakan petani di Pulau Giliyang, karena hanya menggunakan air tawar yang terbatas dan sistem tadah hujan.

Dari hasil observasi keliling Pulau Giliyang, yang hanya memakan waktu 30-40 menit, kenyataan udara pulau sangat segar meskipun di tengah hamparan laut luas Selat Madura, sehingga dijuluki “Pulau Oksigen”, “Pulau Tanpa Polusi”, “Pulau Lansia”, dan “Pulau Awet Muda” (Alfri, 2016: 7). Menurut hasil penelitian LAPAN (2006) dan badan Lingkungan Hidup, BLH Kabupaten Sumenep (2015), kandungan oksigen di Pulau Giliyang 21 persen, 3.3 sampai 4.8 di atas kandungan oksigen rata-rata di daerah lain, yang 19 persen. Batas ambang kandungan oksigen dalam udara yang dihirup orang dalam keseharian adalah 15 persen, sedang kandungan oksigen di Pulau Giliyang 21 persen, yang memiliki daya pancar (LEL) aktif 0.5 persen, lebih aktif memancar dibandingkan dengan kandungan oksigen di daerah lain yang rata-rata hanya 0,07 persen, sehingga kandungan oksigen di Pulau Giliyang jauh lebih memberi kesegaran nafas dan kesehatan orang yang menghirupnya, terutama penduduk yang lama bermukim di pulau tersebut.

Dari kajian daerah-daerah di dunia yang memiliki kandungan oksigen tertinggi, Pulau Giliyang memiliki kandungan oksigen tertinggi di dunia setelah Bosnia Herzegovina (23 persen). Pulau Giliyang memiliki luas keseluruhan 9.15 kilometer, dari Kabupaten Sumenep, Madura, dapat ditempuh melalui satu-satunya pelabuhan resmi, Dungkek, selama satu jam dengan biaya transpor Rp 15.000,-. Penerangan listrik umum digerakkan dengan tenaga surya, untuk menghambat polusi udara. Dari keseluruhan pulau, baru Desa Banraas dan Bancamara yang dihuni penduduk, masing-masing 4.200 orang dan 3.860 orang. Pulau Giliyang dapat dinikmati dengan ojek keliling berbiaya Rp 35.000,- per orang, atau dengan perahu mengelilingi pulau dengan biaya Rp 200.000,- untuk 10 orang. Fasilitas penginapan hanya rumah-rumah penduduk,

minum dengan air kemasan karena di Pulau Giliyang sangat minim air segar dari mata air. Sumber air hanya terdapat di ceruk-ceruk gua, sehingga tidak layak untuk diminum karena tidak mengalir dan memancar (Anton Prasetyo, 2016: 11).

Kondisi Penduduk: Dari hasil observasi, apabila mengamati sosok-sosok penduduk, mereka memang banyak yang berusia lanjut dan berpenampilan segar meskipun usianya di atas 80 tahun. Kelompok usia lanjut terlihat mendominasi keberadaan penduduk di Pulau Giliyang. Hasil dari telah dokumen setempat, monografi desa (2015), dapat diketahui distribusi penduduk dapat dideskripsikan dalam tabel 1 kelompok usia sebagai berikut.

Tabel 1
Distribusi Usia Penduduk Giliyang

No	Kelompok Usia	F	%
1	< 20	1.894	23.50
2	21-40	1.135	14.00
3	41-60	1.330	16.50
4	61-80	2.378	29.50
5	81<	1.323	16.50
Jumlah		8.060	100.00

Sumber: Monografi Desa (2015)

Menurut penuturan Rofiq (54), pamong desa setempat, dominannya penduduk usia lanjut dan masih segar bugar dikarenakan memang usia rata-rata harapan hidup warga Giliyang tinggi (umur panjang), untuk menemui warga yang berusia di atas 100 tahun sangat mudah dan dalam kondisi rata-rata yang belum renta. Dominannya penduduk usia tua juga disebabkan penduduk usia produktif kebanyakan pergi mencari nafkah di luar Pulau Giliyang, kebanyakan ke Pulau Jawa. Penduduk Pulau Giliyang biasanya pergi ke luar pulau untuk kemudian kembali ke daerah asal menikmati hasil kerja dan usaha, serta sisa hidup yang pada kenyataannya di Pulau Giliyang lebih nyaman dan segar, meskipun faktor kesegaran tersebut semula (sebelum penelitian LAPAN dan BLH) tidak diketahui penduduk setempat, yang mereka tahu bahwa tinggal di

daerah asal, Pulau Giliyang terasa lebih sejuk, nyaman, tentram, dan damai meskipun berada di tengah-tengah hamparan lautan luas yang biasanya panas. Orang-orang lanjut usia di Pulau Giliyang yang tinggal menikmati hasil kerja dan usaha di daerah asal, menurut konsep Rowe dan Khan (2007: 302) sebagai hidup di usia lanjut dengan berhasil, tinggal ketika menikmati hari-hari lanjut usia mereka tentu akan membutuhkan perhatian dari keluarga, atau masyarakat lingkungan yang menjadi pemerhati masalah sosial di sekitarnya (Greene, Roberta, 2006: 151).

Pola penduduk Giliyang usia produktif pergi mencari nafkah ke daerah lain untuk kemudian kembali ke daerah asal memang sama dengan pola kepergian penduduk Madura ke daerah lain untuk bekerja dan berusaha, mereka tidak merantau apalagi tercerabut dari struktur keluarga di daerah asal, mereka hanya melanglang ke daerah lain untuk kerja dan usaha (Wiyata, 2015: 221) bukan merantau, dan sering kembali bersilaturahmi paling tidak pada hari raya Ramadhan dan lebaran haji. Hubungan keluarga tetap terjalin secara intens melalui kunjungan fisik ke kampung halaman dan komunikasi dengan menggunakan telpon selular, sehingga kondisi perkembangan keluarga dapat dikontrol setiap waktu, tidak seperti analisis Koning (2004: 354) yang menyatakan bahwa ada perubahan struktur keluarga ketika ditinggal pergi merantau oleh salah satu anggota keluarganya. Dari hasil kajian terhadap penduduk di Pulau Giliyang, perubahan fungsi dan struktur keluarga tersebut tidak terjadi, jalinan dan fungsi keluarga tetap utuh menurut peran masing-masing seperti sediakala.

Menurut keterangan Junaedi (56), Informan-2, kecenderungan penduduk Giliyang pergi mencari nafkah ke luar pulau tersebut disebabkan ketersediaan pekerjaan di Pulau Giliyang sangat terbatas. Tabel 2 berikut merupakan representasi suasana pekerjaan yang dapat dilakukan di Giliyang.

Tabel 2
Pekerjaan Penduduk

No	Jenis Pekerjaan	F	%
1	Nelayan juragan	37	4.40
2	Pengolahan ikan	98	11.65
3	Nelayan mandiri	79	9.39
4	Usaha tambak	13	1.55
5	Buruh nelayan	224	26.63
6	Buruh olah ikan	73	8.68
7	Petani	115	13.67
8	Buruh tani	88	10.46
9	Pedagang	49	5.83
10	Kerja serabutan	45	5.36
11	Perajin kulit kerang	20	2.38
Jumlah		841	100.00

Sumber: Monografi Desa (2015)

Dari rasio angkatan kerja dibandingkan dengan jumlah pendudu (841:8060) apabila tidak ada asistensi uang masuk ke Giliyang berasal dari anggota keluarga yang bekerja di luar pulau, komposisi penduduk dalam tabel 2 di atas termasuk rentan kemiskinan, karena satu penduduk produktif menanggung 9-10 anggota keluarga, yang dalam standar umum ideal 1:3. Dari hasil observasi secara umum terhadap kondisi kehidupan penduduk Giliyang memang tampak, bahwa kebanyakan keluarga sangat berhemat dalam hal makan. Pepatah setempat mengatakan “*tak atanak tak anase, tak adagang tak adaging*”, yang bermakna tidak makan nasi apabila tidak bertani, tidak makan daging apabila tidak berdagang, sehingga membawa kebiasaan penduduk Giliyang untuk makan secukupnya, tidak berlimpah meskipun mampu melakukan (Gumarang, 2004: 54). Dari hasil pengamatan di Desa Banraas dan Bancamara, ciri khas yang hampir dilakukan setiap keluarga dengan berbagai profesi kerja dan usaha adalah berternak sapi sebagai tabungan apabila sewaktu-waktu membutuhkan keuangan besar, seperti hajatan, sakit, dan membangun rumah tinggal.

Perkembangan Sosial Kependudukan: sejak tersebar informasi bahwa di Pulau Giliyang terdapat kandungan oksigen yang paling tinggi di dunia, banyak penduduk luar pulau, bahkan luar Madura yang berinvestasi tanah di

Giliyang. Gerak peralihan hak atas tanah mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, karena setiap jengkal tanah kemudian menjadi primadona untuk dimiliki orang-orang yang mampu, terutama penduduk yang berasal dari daerah lain. Pola kerja dan usaha penduduk Giliyang yang selalu kembali ke tempat asal, ditambah minat penduduk dari luar yang ingin memiliki tanah di Pulau Giliyang, membuat harga tanah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga tanah di pusat kota-kota Madura (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep). Tabel 3 berikut merupakan manifestasi tingginya minat penduduk luar Giliyang untuk memiliki tanah beroksigen tinggi, dilihat dari gerak peralihan hak atas tanah yang dimiliki penduduk asli ke pendatang dari luar pulau.

Tabel 3
Peralihan Hak Tanah ke Penduduk Pendatang

No	Tahun	Luas Pelepasan Hak
1	2011	1.75 hektar
2	2012	2.15 hektar
3	2013	3.35 hektar
4	2014	4.23 hektar
5	2015	4.90 hektar
Jumlah		16.38 hektar

Sumber: Monografi Desa (2015)

Menurut Kholil (50), informan-3, yang bekerja sebagai pamong desa, pemerintah desa setempat telah mencegah terjadinya peralihan hak ke penduduk pendatang, dikhawatirkan mereka akan membangun usaha yang mengancam kelestarian lingkungan Pulau Giliyang, dengan memperkenalkan berbagai usaha yang berkaitan dengan pemanfaatan potensi lingkungan, sehingga penduduk setempat tidak cenderung mengalihkan tanah kepada penduduk luar. Penduduk pendatang yang terlanjur bermukim di Giliyang, diberi aturan setempat untuk tidak membangun usaha menggunakan mesin yang mengeluarkan emisi karbon dioksida sebagai pencemar lingkungan dan pengancam eksistensi tingginya O² di Giliyang. Kebijakan pemerintah setempat tersebut berhasil membatasi usaha baru

yang dilakukan pendatang hanya terbatas pada pengolahan ikan, usaha pertanian tembakau, jagung, kedelai, dan kacang tanah.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS): Masyarakat Pulau Giliyang memiliki juga sebagian warganya yang dikategorikan sebagai PMKS, tetapi pada praktek kesehariannya dapat diatasi dengan kearifan lokal sendiri, tanpa asistensi pemerintah pun PMKS dapat disikapi oleh keluarga, saudara, dan masyarakat lingkungan tanpa keterlantaran. Jangkauan geografis yang sulit menyebabkan masyarakat Giliyang mendapat sedikit limpahan dana asistensi sosial dari pemerintah. Tabel 4 berikut merupakan gambaran PMKS di Pulau Giliyang dan besarnya bantuan sosial yang diperoleh penerima manfaat.

Tabel 4
Penyandang PMKS di Pulau Giliyang

No	PMKS	f	%	Bantuan Sosial
1	Tunanetra	2	1.52	10.500.000,-
2	WRSE	37	12.88	298.324.234,-
3	Keluarga miskin	62	24.24	185.000.000,-
4	Lanjut usia	76	57.58	182.000.000,-
5	Tunadaksa	5	3.78	24.600.000,-
Jumlah		132	100.00	700.424.234,-

Sumber: Monografi Desa (2015)

Program bantuan sosial tersebut diimplementasikan ke penerima manfaat dengan pendampingan pegiat sosial yang ada di Pulau Giliyang, jauhnya lokasi penerima manfaat dengan pusat pelayanan (terletak di kota Sumenep Pulau Madura), membawa konsekuensi peran pendamping sebagai penjemput dan penyampai dana bantuan sosial, menjadi sangat penting. Dalam memanfaatkan dana bantuan sosial, realitasnya PMKS penerima manfaat dibimbing oleh pendamping sosial yang berasal dari potensi dan sumber kesejahteraan sosial dalam kelembagaan menurut fungsi masing-masing.

Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang berbentuk kelembagaan di Pulau Giliyang berupa: Karang Taruna (dua organisasi dengan anggota 58 orang); Tenaga Kesejahteraan

Sosial Masyarakat (TKSM) tujuh orang; Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) 27 orang. Namun lebih dari sosok-sosok formal tersebut, menurut Rosinah (44), aktivis sosial, sebagai informan-4, sikap antarwarga masyarakat pada umumnya yang masih menjunjung tinggi gotong royong, tolong menolong, kepedulian terhadap sesama warga, sebenarnya sudah dapat mengatasi PMKS yang ada di Pulau Giliyang, sehingga tidak mengalami keterlantaran akibat tidak ada orang yang peduli terhadap eksistensi PMKS.

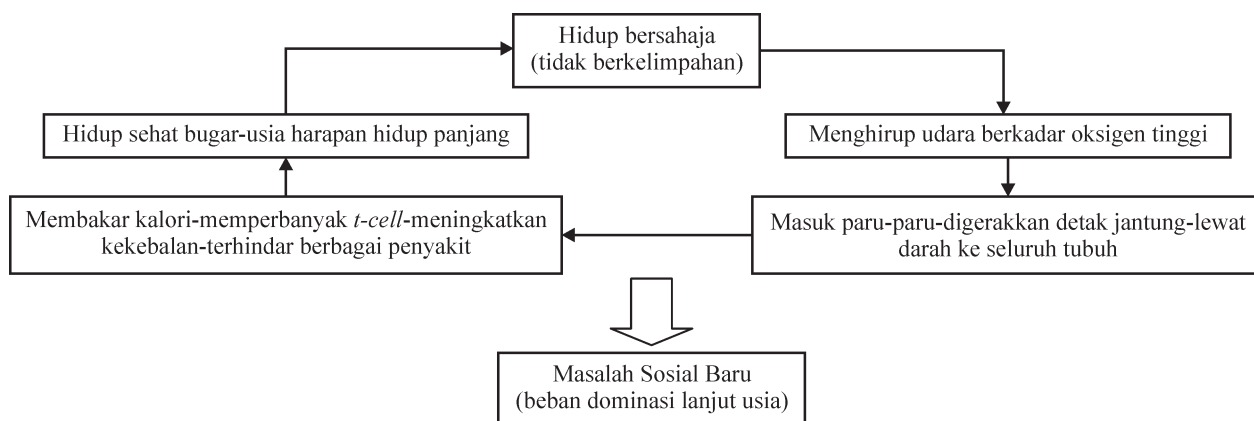
Kemiskinan dan Angka Harapan Hidup Tinggi: Meskipun dari hasil pengamatan kehidupan masyarakat Giliyang pada umumnya miskin, dalam arti tidak menunjukkan pola makan yang berkelimpahan, kepemilikan harta benda dan perabotan juga terbatas, pelayanan kesehatan terbatas, tetapi fakta menunjukkan angka harapan hidup masyarakat Giliyang tinggi, mengacu pada tabel 1 di muka, kelompok usia di atas 81 tahun 16.5 persen, jauh melebihi jumlah usia lanjut rata-rata nasional, 11.34 persen (Rendy Dalimunthe, 2016: 7), bahkan apabila kelompok lanjut usia dihitung mulai usia 60, jumlah lanjut usia di Pulau Giliyang mencapai 46 persen.

Johnson (2002: 44), seorang ahli kesehatan lingkungan menyatakan, bahwa udara bersih dengan kadar polutan kurang dari satu persen dapat membuat orang terhindar dari penyakit paru-paru, hipertensi, obesitas, jantung, gangguan sistem saraf pusat, kanker meskipun orang tersebut sudah berada di usia lanjut dan orang tersebut dalam kondisi miskin. Kemiskinan moderat yang telah terbiasa dijalani oleh masyarakat, menurut

Thorsheim (2009: 17) tidak mengurangi secara signifikan usia seseorang, tetapi justru polusi lingkungan udara mengurangi secara signifikan usia seseorang, karena setiap waktu udara yang terpolusi terhirup, dan akibat menghirup udara terpolusi terus menerus menimbulkan penyakit komplikatif yang merusak organ utama manusia (jantung, hati, paru-paru, ginjal), meskipun masyarakat tersebut berada dalam kelimpahan makan dan harta.

Udara segar bebas polusi ternyata mengkondisikan komunitas masyarakat Giliyang yang bugar dan berusia panjang, meskipun kehidupan mereka pada umumnya relatif miskin. Lundin (2004: 51) mengemukakan, udara segar terhirup paru-paru, dari pori paru-paru masuk ke aliran darah didorong oleh detak jantung, darah segar yang terisi oksigen kemudian menyebar ke seluruh tubuh manusia, menimbulkan kebugaran, peningkatan kekebalan, membakar kalori secara tuntas, memperbanyak *t-cell*, sehingga apabila berlangsung lama orang yang mengalami akan terjaga kesehatannya, berumur panjang, dan tampak bugar sepanjang masa karena terbebas dari berbagai penyakit akibat udara polutif.

Mengacu pada teori tentang hubungan antara kadar oksigen yang dihirup manusia dan kesehatan (Johnson, 2002; Lundin, 2004; Thorsheim, 2009; Edward, 2016), proses kebugaran penduduk Pulau Giliyang, walaupun mereka hidup dalam kondisi miskin (makan tidak berlebihan) dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut.



Siklus kehidupan masyarakat Pulau Giliyang tersebut apabila dideskripsikan bermakna: Mereka hidup bersahaja, makan tidak berkelimpahan (secukupnya), yang tersedia hanya bahan makanan setempat, sayur mayur dan ikan laut. Konsumsi bahan makan tersebut menghindarkan orang dari kemungkinan penyakit *stroke* atau diabetes akibat kebanyakan kolesterol, obesitas, asam urat, karena tidak makan berlemak (daging hewan berkaki empat), ditambah dengan asupan udara segar karena berkadar oksigen tinggi, sehingga menyegarkan paru-paru, diisap oleh darah dan dialirkan dengan detak jantung ke seluruh tubuh orang yang menghirupnya secara terus menerus (Givrilov, 2006: 111). Darah dengan kandungan oksigen tinggi dengan mudah membakar kalori di tubuh, memperbanyak t-sell yang meningkatkan kekebalan tubuh, menjaga kelancaran sistem saraf pusat, membuat tubuh sehat dan wajah bugar meskipun di usia yang lanjut, sehingga mencapai umur panjang di atas 80 tahun (Edward, 2016: 9).

Beban Dominasi Lanjut Usia (*Aging Domination Problem*): Salah satu dari tiga indikator kualitas hidup manusia yang menjadi pegangan PBB, yaitu usia harapan hidup panjang (*long life expectancy*) dari hasil observasi kependudukan dan data monografi desa di Pulau Giliyang menunjukkan, dominannya eksistensi penduduk usia lanjut (46: 20,5) secara statistik menjadi masalah beban kependudukan karena 20,5 persen penduduk usia produktif harus menanggung 46 persen lanjut usia. Namun komposisi kependudukan tersebut, menurut Sholeh (51), pengusaha pengolahan ikan laut yang menjadi infoman-5, sebenarnya secara riil dapat dikurangi oleh keberadaan penduduk yang berusaha dan bekerja di luar Pulau Giliyang, yang selalu membawa uang pulang setiap bulan Ramadhan dan Besar (Pulang Haji), bahkan banyak lanjut usia di Pulau Giliyang yang tinggal menikmati hasil kerja dan usaha sehingga kelompok ini tidak membebani anggota keluarga.

Menurut Dalimunthe (2016: 17), beban lanjut usia yang harus disangga masyarakat dapat diatasi dengan *connected care program online*

(layanan lansia berjaringan), dengan membangkitkan peran aktif lanjut usia bersama pendampingan sosial untuk membuat data base tentang identitas lansia yang ada, ditambah dengan riwayat kesehatan dan laporan rutin perkembangan kondisi kesehatan masing-masing lanjut usia, sehingga sewaktu-waktu dapat dipantau kesehatannya tanpa harus bertemu secara fisik dengan pelayan kesehatan, terutama untuk lanjut usia yang berada di daerah terpencil seperti Pulau Giliyang. Program “layanan lanjut usia berjaringan” akan memberi peran lebih aktif pendamping sosial dalam melayani lanjut usia yang membutuhkan. Di negara-negara maju, “layanan lanjut usia berjaringan” dikomunikasikan secara *on-line*, antara pelayan dan yang dilayani tidak bertatap muka tetapi dimonitor secara intens melalui internet, dengan mediasi pendamping sosial. Lanjut usia baru benar-benar bertatap muka ketika perkembangan kesehatannya membutuhkan perawatan intensif (Ritter, 2016: 417), yang di negara maju tidak hanya mencakup bantuan sosial dalam bentuk uang bulanan tetapi mencakup kebutuhan pelayanan kesehatan, kasih sayang dan kepedulian keluarga dan masyarakat lingkungan, komunikasi dan bergaul dalam suatu forum kemasyarakatan, dan konsultasi permasalahan kehidupan keseharian apabila diperlukan (Lowy, 2009: 114).

D. Penutup

Kesimpulan: Udara yang segar dan bersih dengan kandungan oksigen tinggi, tanpa polusi, ternyata dapat membebaskan masyarakat di Pulau Giliyang hidup panjang dan tetap bugar, meskipun mereka hidup dalam kondisi relatif miskin. Udara segar bebas polusi ternyata lebih penting daripada kelimpahan pangan yang justru ekksesnya membawa gangguan penyakit jantung, obesitas, paru-paru, gangguan sistem saraf pusat, kanker, dan darah tinggi. Makan sekedar cukup ternyata juga menghindarkan warga Giliyang dari ekkses kebanyakan makan (obesitas) yang tidak baik bagi kesehatan, kondisi lingkungan yang melimpah hanya dalam hal sayur dan ikan juga memberi keuntungan warga

Giliyang tidak terkena *stroke*, kolesterol, asam urat yang diakibatkan banyak makan daging berkaki empat.

Udara yang terasa segar meskipun Pulau Giliyang berada di tengah hamparan lautan luas, juga disebabkan oleh kandungan oksigen dan tingkat pancarannya yang tinggi, sehingga memberi kesegaran dan kebugaran pada penduduk setempat, meskipun berusia lanjut. Namun tingginya usia harapan hidup penduduk Pulau Giliyang, dengan jumlah lansia yang lebih dominan (50 persen) dibandingkan usia produktif, membawa konsekuensi penduduk usia produktif harus menanggung lansia yang jumlahnya lebih besar, terjadi beban penduduk akibat eksistensi lansia (*Aging Problem*).

Rekomendasi: Udara segar bebas polusi perlu digunakan sebagai perluasan tolok ukur indikator kesejahteraan sosial di samping kecukupan pangan, sandang, layanan kesehatan, dan perumahan. Oleh karena polusi udara sangat berkaitan dengan perilaku masyarakat, disarankan agar setiap kebijakan pembinaan sosial masyarakat, yang dilakukan oleh Kementerian Sosial, melalui bimbingan dan penyuluhan, selalu diselipkan misi pelestarian lingkungan sebagai penyempurnaan pembangunan kesejahteraan sosial. Konsekuensi dominannya jumlah lansia di Pulau Giliyang akibat penduduknya yang dapat mencapai usia panjang, sehingga menimbulkan permasalahan kesejahteraan sosial baru, yang dalam konteks masyarakat Pulau Giliyang, berbentuk “beban lansia” dapat diatasi dengan program lanjut usia berjaringan, yang dapat menembus halangan keterpencilan geografis. Kementerian Sosial perlu membuka jaringan *on-line* di daerah-daerah terpencil untuk mempermudah dan memperluas jangkauan layanan sosial ke seluruh pelosok Indonesia, dalam bentuk tidak bertatap muka secara fisik tetapi dalam bentuk “bertatap maya”. Pelayanan secara fisik pada lanjut usia yang membutuhkan baru dilakukan

ketika analisis laporan jaringan menghasilkan kesimpulan bahwa lanjut usia dimaksud benar-benar harus dikunjungi secara fisik.

Pustaka Acuan

- Alfri (2016). *Giliyang: Pulau di Madura Bikin Orang Umur Panjang*. Sumenep: Travellingyuk. Com.
- Anton Prasetyo (2016). *Pulau Giliyang: Kadar Oksigen Tertinggi*. Sumenep: Kabarmadura07. Com.
- Budi Harsono (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Edward (2016). *Excessively Oxygen Consumption and the Consequences of Health*. London: Jurnal of Basic Health, Vol. 7, No 12.
- Gavrilov, L.A. (2016). *Reliability Theory of Aging and Longevity*. San Diego: Academic Press.
- Hartono (2016). *Menjelajah Pulau Giliyang*. Sumenep: Portal Madura. Com.
- Johnson, Albert A. (2002). *How Cells Obtain Energy from Food*. New York: Garland Science.
- Koning, Juliette (2004). *Generation of Change: Migration, Family Life, and Identity Formation in Javanese Life during the New Order*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Lowy, Louis (2009). *Social Work with Aging*. San Fransico: Harper and Row.
- Lundin, Stacy (2004). *Oxygen: Element Information, Property, and Uses*. New York: Jurnal of Basic Health. No 12, volume XIV.
- Mohamad Gumarang (2004). *Madura Barat dan Madura Timur: Perbedaan Struktur Sosial*. Makassar: Yapensi.
- Rendy Dalimuthe (2016). *Connected Care and Aging Population*. Jakarta: Jakarta Post.
- Ritter, Elizabeth (2016). *Program Serving Older Adult*. Connecticut: GAPS Network.
- Green, Roberta (2006). *Care Giving and Caresharing: A Life Course Perspective*. Washington: NASW Press.
- Rowe, J and R. Kahn (2007). *Human Aging: Usual and Successful*. New York: Jurnal of Aging Science. Vol. 97, No. 346.
- Stake, Robert (1995). *The art of Case Study Research*. New Delhi: Sage Publication.
- Thorsheim, Peter (2009). *Health Impact of Air Pollution*. London: Health Respiratory Jurnal. No 3 Volume IV.
- Wiyata, A. Latief (2008). *Kajian Antropologi mengenai Budaya Madura*. Surabaya: Madura Explore.

Korban Kekerasan Seksual Sedarah terhadap Anak *Victim of Sameblood Sexual Violence toward Children*

Soetji Andari

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS), Kementerian Sosial R.I.
Jl. Kesejahteraan Sosial no.1 Nitipuran, Yogyakarta. Telpn (0274) 377265. E-mail: <soetjiandari@gmail.com>.
Diterima 2 Juni 2016, diperbaiki 27 September 2016, disetujui 17 Oktober 2016>

Abstract

Incest is one type of sexual disorders, the sameblood relationship for example brother and sister, father and daughter, mother and son, or uncle and nephew. Socially, sexual intercourse happen due to the rooms in the house that did not allow parents, children, or brothers and sisters living separately as socially functioning. The research was done through qualitative-descriptive method to determine people's knowledge about sexual violence. It found that victims and perpetrators relations in Batam can be concluded that the forms of violences moslyt related to sexual violence. The act of sexual abuse manifested in sexual harassment, rape, and exploitation. Perpetrators are related by the biologically same blood, as father or stepfather, uncle, and grandfather. The violences mostly took place in the most privat space, homes mostly in the slums, and isolated areas.

Key word: *victim violence; incest; woman and children*

Abstrak

Hubungan sedarah merupakan salah satu jenis kelainan seksual, yaitu melakukan hubungan suami istri dengan saudara sedarahnya, misalnya ayah dan anak, ibu dan anak, ataupun paman dan keponakan. Secara sosial, hubungan hubungan seksual sedarah dapat disebabkan antara lain: ruangan dalam rumah yang tidak memungkinkan orangtua, anak, atau sesama saudara terpisah, sesuai peruntukan rumah. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif untuk mengetahui pengetahuan masyarakat tentang kekerasan seksual sedarah. Hasil penelitian disimpulkan bahwa bentuk kekerasan yang terjadi pada hubungan sedarah hampir seluruhnya berkaitan dengan kekerasan seksual. Tindakan penganiayaan seksual berupa pelecehan seksual, perkosaan, dan eksploitasi. Pelakunya bisa ayah kandung maupun ayah tiri, paman, dan kakek kandung. Lokasi kejadian hubungan seksual sedarah paling banyak adalah di ruang domestik, rumah tempat tinggal daerah kumuh, dan tempat tinggal yang terisolir.

Kata kunci: *korban; kekerasan seksual sedarah; perempuan dan anak*

A. Pendahuluan

Tindak kekerasan seksual di Indonesia sudah dalam kondisi darurat, kekerasan selalu berkaitan dengan pelaku korban dan seringkali yang menjadi korban adalah anak-anak. Menurut WHO, kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan sekelompok orang atau masyarakat mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak (WHO, 2016). Hasil survei Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) bersama Kementerian Sosial dan BPS pada 2013, menunjukkan sekitar 30 persen anak berusia

13-17 tahun setidaknya mengalami satu jenis kekerasan baik itu fisik, seksual, maupun psikis. Kelompok usia 18-24 tahun, diketahui 50 persen atau satu dari dua laki-laki, mengalami salah satu kekerasan, pada perempuan 16,40 persen atau satu dari enam orang mengalami hal sama. Kekerasan seksual pada anak terutama berkaitan dengan pornografi dan pencabulan pada anak, menduduki angka tertinggi dari berbagai bentuk kekerasan. Bentuk-bentuk keke- rasan terhadap anak biasanya dilakukan perorangan, dengan menggunakan fisik (kekerasan seksual), verbal (termasuk menghina), dan psikologis (pelecehan), oleh seseorang dalam lingkungannya.

Tindakan pelecehan seksual sedarah terhadap anak dapat dilakukan oleh orang dekat di ranah domestik yang memiliki hubungan darah, baik yang bersifat ringan (misalnya secara verbal, bentakan, hardikan dengan kata-kata kasar dan menyakitkan) maupun yang berat (seperti pelecehan seksual dan perkosaan) merupakan tindakan menyerang dan merugikan. Tindak kekerasan seksual terhadap anak terdapat unsur-unsur yang meliputi: perbuatan yang berhubungan dengan seksual; pelakunya laki-laki dan korban perempuan; wujud perbuatan berupa fisik dan nonfisik; tidak ada kesukarelaan.

Terry E. Lawson (2007), psikiater internasional yang merumuskan definisi tentang *child abuse*, menyebut empat macam abuse, *emotional*, *verbal*, *physical*, dan *sexual*. Kekerasan secara fisik (*physical abuse*), terjadi ketika pengasuh atau pelindung anak memukul anak, ketika anak tersebut sebenarnya memerlukan perhatian. Pukulan diingat anak jika kekerasan fisik berlangsung dalam periode tertentu, dan melukai bagian tubuh anak. Kekerasan emosional (*emotional abuse*) terjadi ketika pengasuh atau pelindung anak, setelah mengetahui anaknya meminta perhatian, mengabaikan anak tersebut, kemudian membiarkan anak lapar karena orang tua terlalu sibuk atau tidak ingin diganggu, boleh jadi mengabaikan kebutuhan anak untuk dipeluk atau dilindungi. Orang tua yang secara emosional berlaku keji pada anaknya akan terus-menerus melakukan hal sama sepanjang kehidupan anak tersebut (Taganing, 2008).

Kekerasan secara verbal (*verbal abuse*) biasanya berupa pola komunikasi yang berisi penghinaan, ataupun kata-kata yang melecehkan anak. Pelaku biasanya melakukan tindak *mental abuse*, menyalahkan, melabeli, atau juga mengkambinghitamkan anak. Kekerasan seksual (*sexual abuse*) meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang, yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut (Hadiati, 2006). Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan berupa perlakuan yang penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau

tindakan, yang dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar, trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak anak.

Hubungan sedarah merupakan kasus domestik, hubungan seksual yang terjadi antara anggota keluarga atau dengan seseorang yang dianggap keluarga dan dilakukan oleh laki-laki atau perempuan, korbannya laki-laki atau perempuan, merupakan kasus yang seringkali hanya dilaporkan apabila dalam keadaan terpaksa, baik oleh korban maupun keluarganya. Hubungan sedarah juga merupakan salah satu jenis kelainan seksual, yaitu melakukan hubungan suami istri dengan saudara sedarahnya, misalnya ayah dan anak, ibu dan anak, ataupun paman dan keponakan. Korban hubungan sedarah banyak terjadi pada anak perempuan akibat hubungan seksual, kejadiannya seringkali disertai ancaman, pemaksaan serta kekerasan, dan perkosaan (Adicahya, Akmal, 2014)

Dampak kekerasan mengakibatkan korban merasa rendah diri, tidak berharga, benci kepada pelaku baik perempuan maupun laki-laki, keceasan dan tidak merasa aman berada di rumah serta trauma yang berkepanjangan. Hubungan sedarah terjadi akibat pelampiasan nafsu seksual yang sasarannya adalah anggota keluarganya sendiri. Hubungan sedarah sebenarnya merupakan tanda atau gejala dari adanya suatu masalah dalam kehidupan rumah tangga, dapat disebut sebagai akibat dari keadaan dalam rumah tangga itu sendiri, juga karena adanya dorongan seksual yang sangat kuat dan tidak tertahankan lagi sehingga akal sehat pelaku menjadi gelap, tidak bisa memandang lagi orang di hadapannya. Apabila terjadi, merugikan baik bagi pelaku sendiri maupun orang yang menjadi korban. Di berbagai masyarakat di dunia, larangan hubungan sedarah dalam kenyataan tergantung dari tradisi budaya, kadangkala larangan lebih berciri adat kebiasaan daripada norma hukum (Nurjaya, 2011).

B. Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara purposif, di Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dengan pertimbangan kasus kekerasan seksual sedarah terhadap anak banyak terjadi. Objek penelitian ini adalah kasus kekerasan akibat hubungan sedarah. Beberapa informan yaitu orang-orang, baik lembaga pemerintah maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menangani dan melakukan pendampingan terhadap tindak kekerasan seksual yang terjadi pada keluarga, terutama perempuan dan anak. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, untuk mengetahui permasalahan kekerasan seksual sedarah, yang menjadi korban adalah anak. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, baik dengan korban maupun pendamping anak korban tindak kekerasan seksual sedarah.

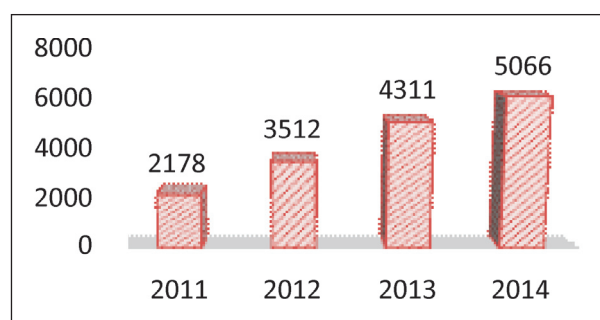
Creswell (2008), menggambarkan proses penentuan metode yang dipergunakan berdasarkan masalah yang hendak dijawab atau dimengerti. Proses penelitian melibatkan pertanyaan yang terus berkembang untuk membuat gambaran secara holistik, menganalisis dan menginterpretasi data, serta melaporkan pandangan informan secara rinci pada situasi kompleks yang terjadi (Sugiyono, 2011). Studi kasus, sebagai metode pendekatan dalam penelitian ini, merupakan salah satu metode dari pendekatan kualitatif (Somantri, 2005), peneliti melakukan pengumpulan data secara mendalam dari waktu ke waktu dengan melibatkan berbagai sumber informasi dan mendeskripsikan kasus secara rinci.

C. Korban Kekerasan Seksual Sedarah terhadap Anak dan Perempuan

Hubungan sedarah merupakan salah satu bentuk penyimpangan seksual yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu dalam keluarga. Penyimpangan terjadi karena berbagai faktor penyebab, sehingga hubungan ini sangat

mengganggu kehidupan bersama. Hubungan sedarah, hubungan seksual yang terjadi pada pasangan yang memiliki hubungan darah, telah terjadi sejak zaman dahulu, tetapi masyarakat pada umumnya masih menganggap pengungkapan hal ini tabu. Dalam kasus kekerasan seksual sedarah seringkali pelakunya adalah orang yang dekat dengan kehidupan sehari-harinya, sebelumnya telah dikenal oleh korban, bahkan mungkin sangat dekat sekali atau bisa jadi pelaku adalah salah satu dari anggota keluarganya juga.

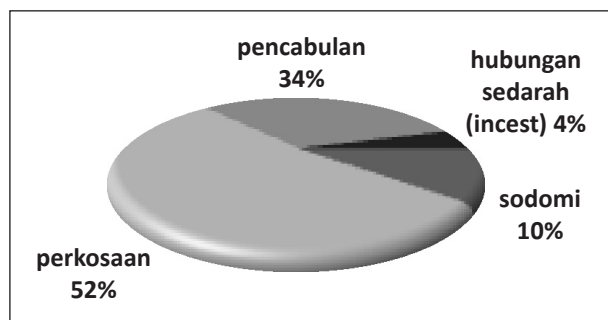
Grafik 1
Kasus Kekerasan terhadap Anak di Indonesia



Sumber: KPAI 2015

Data yang tercatat oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), tindak kekerasan terhadap anak meningkat tajam dari tahun ke tahun. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI, 2015), mencatat pada tahun 2014 terjadi 5066 kasus kekerasan anak di Indonesia. Angka ini meningkat signifikan dari tahun 2010 yang hanya 171 kasus. Sementara pada tahun 2011, tercatat sebanyak 2179 kasus, 2012 sebanyak 3512 kasus, 2013 sebanyak 5066 kasus. Sedangkan jenis kekerasan seksual. Jenis-jenis kekerasan seksual yang sering terjadi di Indonesia 2013: sodomi (52 kasus), perkosaan (280 kasus), pencabulan (182 kasus), dan hubungan sedarah (21 kasus). 78,3 persen anak menjadi pelaku kekerasan dan sebagian besar pernah mengalami dan melihat kekerasan sehingga meniru perbuatan tersebut (KPAI, 2015).

Grafik 2
Tindakan Kekerasan Seksual terhadap Anak



Sumber: KPAI 2015

Kekerasan seksual terhadap anak menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada tahun 2013, yang paling banyak dilaporkan adalah berupa perkosaan 52 persen, kemudian pencabulan termasuk pelecehan seksual terhadap anak 34 persen dan yang paling kecil adalah kejahatan seksual sedarah atau incest 4 persen. Incest atau hubungan seksual sedarah termasuk dalam golongan perkosaan. Tindakan perkosaan atau kejahatan seksual ini secara umum dialami oleh perempuan yang masih anak-anak atau remaja sebagai korban.

Kekerasan seksual ini dapat terjadi karena faktor lingkungan dan juga latar belakang psikis dari pelaku di masa lalu sebagai bentuk ketidaksiapan mental, kemudian mempengaruhi perilaku pelaku yang kemudian melakukan kekerasan seksual yang terjadi secara spontan karena adanya rangsangan. Rendahnya laporan kekerasan seksual, *incest*, atau hubungan sedarah bagai fenomena gunung es, karena pada kenyataan di lapangan lebih banyak anak menjadi korban. Banyak anak atau ibu yang enggan melapor jika mereka mengalami kekerasan seksual, karena takut jika pelaku adalah ayah kandung ataupun tiri dipenjara, mereka terlantar karena merupakan tulang punggung keluarga yang mencari nafkah. Korban membutuhkan pendampingan untuk melapor kepada pihak yang berwajib, supaya memberi efek jera pada pelaku, dan korban mendapatkan perlindungan agar tetap dapat menjalankan fungsi sosial. Anak yang hamil karena tindak perkosaan membutuhkan

pendampingan dan apabila masih usia sekolah dapat meneruskan sekolahnya.

Rendahnya data tentang kekerasan seksual karena korban enggan melapor karena berkaitan dengan harga diri keluarga, karena si pelaku adalah orang dekat atau keluarga sendiri sehingga *incest* biasanya terjadi berulang, korban dan pelaku besar kemungkinan sudah sering saling bertemu. Hal tersebut menyebabkan anak sebagai korban penyimpangan seksual menjadi ketakutan, tunduk dan tidak berani berontak karena pelakunya adalah orang dekat yang berada di dalam rumah.

Penyebab penyimpangan seksual sedarah merupakan perilaku menyimpang (tabu) terhadap anak antara lain karena: Pemahaman agama adalah benteng utama yang menjaga pola interaksi antarmanusia, baik hubungan sedarah maupun tidak. Jika keluarga tidak mendapatkan informasi tentang aturan agama, pola interaksi yang dibolehkan, penyimpangan pola interaksi sedarah sangat tinggi. Banyak keluarga beranggapan karena satu keluarga, ayah, ibu, anak, paman, bibi, sepupu- maka boleh buka-bukaan seenaknya. Dalam Islam, sejak kecil anak telah dipisah dari ranjang orangtua, anak laki-laki dan perempuan dipisah, masuk kamar orangtua diatur pada saat-saat tertentu dengan ijin.

Faktor kemiskinan menyebabkan seorang istri dan seluruh anggota keluarga harus membanting tulang untuk menghidupi keluarga. Istri yang bekerja di luar rumah mengalami kelelahan luar biasa sehingga menurunkan pelayanan terhadap suami. Kemiskinan juga menyebabkan fungsi sosial rumah tangga tidak dapat digunakan secara utuh, sebagai contoh satu rumah yang hanya memiliki dua kamar, atau rumah yang hanya di sekat dengan kain seadanya, menyebabkan rawan terjadinya kekerasan seksual sedarah, yang dilakukan oleh ayah dan anggota keluarga lain terhadap anak di bawah umur yang kondisi lemah dan tidak berdaya untuk menolak, karena biasanya pelakunya menyertai berbagai ancaman.

Rendahnya tingkat pendidikan yang jauh dari standar mengakibatkan korban dan keluarga menganggap perilaku *incest* adalah aib keluarga yang sangat pribadi, sehingga banyak yang tidak mau melaporkan ke pihak yang berwajib atau orang lain. Rendahnya pendidikan juga menimbulkan perilaku *incest* semakin marak, kasus *incest* bukan kasus perkosaan biasa. Hal ini menyangkut kepercayaan, kelangsungan sebuah keluarga, masa depan anak dan kondisi psikologi yang terbentuk, sangat disayangkan jika undang-undang memperlakukan pelaku *incest* sama dengan korban perkosaan biasa.

Menurut kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kasus, pasal 285, ancaman kekerasan memaksa bersetubuh atau memperkosa dengan hukuman penjara 12 tahun. Korban hubungan seksual sedarah, seharusnya menganggap rumah sebagai tempat berlindung yang aman bagi seluruh anggota keluarga, tetapi pada kenyataannya justru banyak rumah menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadi tindak kekerasan. Perilaku kekerasan merupakan bentuk tindakan kekerasan yang sudah ada dan terjadi sepanjang umur manusia (Sulaiman Zuhdi Manik, dkk., 2002).

Hubungan sedarah juga merupakan salah satu jenis kelainan seksual, yaitu melakukan hubungan suami istri dengan saudara sedarahnya, misalnya ayah dan anak, ibu dan anak, ataupun paman dan keponakan. Secara sosial, hubungan seksual sedarah dapat disebabkan, antara lain ruangan dalam rumah yang tidak memungkinkan orangtua, anak, atau sesama saudara terpisah, sesuai peruntukan rumah secara sosial. Hubungan seksual sedarah antara orangtua dengan anak kandung ataupun anak tiri dapat terjadi karena kondisi psikososial yang kurang sehat pada individu yang terlibat. Beberapa budaya juga mentoleransi hubungan seksual sedarah untuk kepentingan tertentu, seperti kepentingan politik ataupun pemurnian ras. Kejahatan kekerasan sebagai suatu fenomena yang ada dalam masyarakat merupakan kejahatan tradisional, yang telah ada sejak dulu. Perkembangan ilmu dan teknologi, kejahatan kekerasan semakin

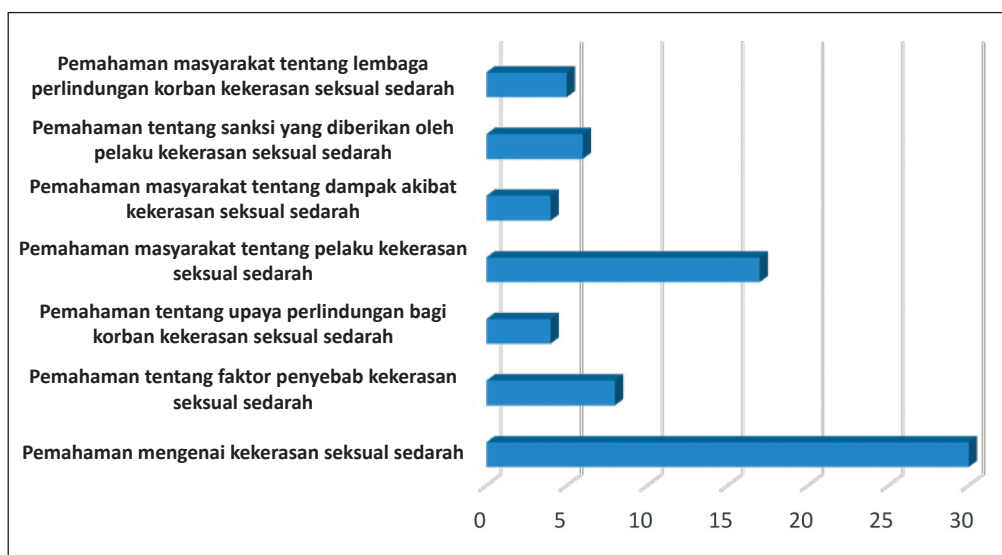
meningkat, baik dalam motif, sifat, bentuk, intensitas, maupun modus operandi.

Hubungan sedarah dikategorikan dalam perbuatan melanggar hukum karena pelaku mendapat sanksi hukum di samping melanggar norma agama dan masyarakat. Pelaku Hubungan sedarah dimasukkan dalam perbuatan kejahatan atau penganiayaan seksual, perilaku seksual yang dilakukan dapat berupa penganiayaan secara fisik ataupun non fisik, oleh orang yang lebih tua atau memiliki kekuasaan yang bertujuan untuk memuaskan hasrat seksual pelakunya.

Pemahaman masyarakat, instansi ataupun lembaga pemerhati masalah kekerasan perempuan dan anak terkait dengan pengertian hubungan seksual sedarah, menunjukkan pemahaman yang beragam dalam mengistilahkan dan mengelompokkan. Semua sependapat bahwa hubungan seksual sedarah merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang dilakukan oleh seseorang yang masih memiliki hubungan darah (ayah, kakak, ibu, adik, paman) terhadap anak, adik atau keponakannya. Kekerasan seksual menyimpang terhadap anak dilakukan oleh seseorang yang memiliki hubungan darah seringkali korban tidak mendapat perlindungan karena berada di area domestik yang tertutup. Beberapa lembaga swadaya masyarakat maupun P2TP2A mengelompokkan kasus kekerasan seksual anak sebagai kasus pemerkosaan, dan pihak kepolisian mengelompokkan sebagai tindakan pencabulan anak di bawah umur.

Perbedaan dalam istilah hubungan seksual sedarah pada prinsipnya semua elemen masyarakat memahami bahwa tindakan tersebut merupakan suatu bentuk kekerasan seksual terhadap anak yang tidak bisa ditolerir, dan merupakan suatu kejahatan seksual yang sangat keji terhadap anak. Kondisi ini disebabkan masyarakat belum mendapatkan informasi yang lengkap tentang kekerasan seksual terhadap anak, informasi tentang lembaga yang melakukan pelayanan terhadap korban, serta budaya masyarakat yang masih memegang teguh bahwa masalah keluarga tabu untuk diungkapkan kepada orang lain, menyebabkan kasus kekerasan hubungan sedarah

Grafik 3
Pemahaman Keluarga Korban tentang Kekerasan Hubungan Seksual Sedarah



Sumber: kompilasi pemahaman kekerasan seksual Primer 2015 (N=95)

masih sedikit yang melaporkan dan tertangani. Grafik 3 di bawah ini merupakan gambaran hubungan seksual sedarah di seluruh daerah penelitian

Pemahaman responden tentang kekerasan hubungan seksual sedarah adalah sebagai berikut: 31 persen responden memahami tentang kekerasan hubungan seksual sedarah, mampu menjelaskan tentang kekerasan hubungan seksual sedarah atau hubungan yang dilakukan oleh saudara sedarah atau melakukan hubungan suami istri dengan saudara sedarahnya, misalnya ayah dan anak, ibu dan anak, paman dan keponakan. Responden mengetahui hubungan hubungan seksual sedarah sebagai hubungan yang dilakukan oleh kerabat, keluarga, bahkan orang tua terhadap korban. Relasi seksual pada hubungan seksual sedarah dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga yang kuat, seperti ayah dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, atau antarsesama saudara kandung.

Pemahaman responden tentang faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan hubungan seksual sedarah, 11 persen yang mampu menjabarkan penyebab terjadinya tindak kekerasan karena rendahnya pendidikan dan ekonomi, fak-

tor lingkungan atau tempat tinggal, faktor penggunaan minuman keras yang mengandung alkohol yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual sedarah. Selain itu video porno dan media massa yang mudah diakses melalui telepon selular, juga faktor kurangnya pemahaman terhadap agama, sebagai unsur-unsur penyebab terjadinya tindak kekerasan hubungan seksual sedarah.

Pemahaman responden tentang upaya perlindungan bagi korban hubungan seksual sedarah hanya 5 persen yang mengetahui perlindungan yang harus diakses ketika terjadi tindak kekerasan. Responden yang mengetahui upaya perlindungan apabila terjadi tindak kekerasan *incest* yaitu polisi di bagian unit pelayanan perempuan dan anak (UPPA) serta dinas pemberdayaan perempuan, upaya perlindungan yaitu lapor ke aparat setempat, dan lapor ke RT dan RW.

Pemahaman responden tentang pelaku hubungan seksual sedarah (37 persen), pelaku adalah saudara sedarah yang melakukan hubungan seksual ataupun melakukan pencabulan terhadap saudara maupun kerabat sedarah. Hal yang paling menyedihkan terjadi perkosaan oleh orang terdekat si korban, yang masih memiliki hubungan darah dengan korban yang seharusnya menjadi pelindung dan pembimbing korban.

Banyak sekali kasus yang terjadi perkosaan ayah terhadap anak yang masih di bawah umur, kakak terhadap adik, bahkan antara ibu dan anak kandungnya sendiri.

Pemahaman responden tentang dampak atau akibat hubungan seksual sedarah, artinya responden mampu memahami dampak dari tindakan tersebut dengan menjelaskan akibat perbuatan sebanyak 5 persen. Dampak dari hubungan hubungan seksual sedarah menyebabkan perempuan korban menderita. Ketergantungan dan ketakutan ancaman dari pelaku membuat perempuan tidak bisa menolak diperkosa oleh ayah, kakek, paman, saudara atau anaknya sendiri. Korban hubungan seksual sedarah sangat sulit keluar dari kekerasan berlapis-lapis, karena sangat tergantung hidupnya pada pelaku dan masih berfikir tidak mau membuka aib laki-laki yang pada dasarnya disayanginya dan seharusnya menjadi pelindungnya, akibatnya korban mengalami trauma seumur hidup dan gangguan kejiwaan.

Pemahaman responden tentang sanksi yang diberikan kepada pelaku hubungan seksual sedarah, 8 persen mengetahui sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku berdasarkan hukum yang berlaku, yaitu maksimal 15 tahun serta sanksi dari masyarakat berupa pengusiran bagi pelaku. Pemahaman masyarakat tentang lembaga perlindungan korban hubungan seksual sedarah, 7 persen responden yang mengetahui lembaga perlindungan dan pendampingan korban, antara lain Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), kepolisian dan mengetahui alamat tempat lembaga pengaduan. Berdasarkan hasil penelitian penyebab berbagai kasus kekerasan hubungan sedarah meliputi:

Kemiskinan mendorong seorang istri dan anggota keluarga terlibat dalam mencari alternatif pekerjaan keluar area domestik, sehingga banyak ibu-ibu menjadi TKI ke luar negeri untuk bekerja membantu menopang ekonomi rumah tangga. Hal tersebut menyebabkan pengawasan di area domestik menjadi terbengkalai dan anak (terutama anak perempuan) tidak punya pendamping dan tempat bertanya yang memberi

kasih sayang seorang ibu. Kemiskinan mendorong kepergian ibu sebagai tenaga kerja wanita menyebabkan anak terlantar tanpa perlindungan sehingga beresiko menjadi korban hubungan seksual sedarah. Dalam situasi sulit mencari pekerjaan, keluarga butuh makan, tidak jarang istri banting tulang bekerja seadanya. Istri yang bekerja diluar negeri dalam waktu lama, membuat sang suami kesepian sehingga anak perempuan menjadi korban hubungan sedarah.

Pengaruh sosial budaya menyebabkan anak harus menurut dan patuh kepada orang tua, apabila tidak mengikuti yang diminta dianggap anak durhaka sehingga apa pun yang dilakukan merupakan keharusan. Anak perempuan menjadi aset atau kepemilikan yang tidak dapat diintervensi siapa pun, menyebabkan anak sangat rentan terhadap kasus hubungan seksual sedarah, anak perempuan dalam kondisi terjepit di area domestik, menjadi figur utama yang mengurus adik-adik dan menggantikan peran sebagai ibu, sehingga tidak jarang menjadi korban kebutuhan seksual bapaknya sebagai kepala keluarga yang ditinggal istri.

Hukuman yang diterima pelaku sering kali tidak maksimal karena menuntut ayah sebagai pelaku kekerasan seksual sedarah akan memutus biaya hidup yang ditanggung oleh ayah yang menjadi tulang punggung keluarga. Sistem hukum masih lemah, lamban dan mahal, sangat sedikit transparansi laporan yang dituduhkan kepada seorang ayah atau keluarga yang menjadi pelaku, sehingga hanya sedikit korban yang mempercayakan kepentingan mereka kepada sistem hukum bersangkutan. Hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual sedarah sulit diungkap, berupaya ditutupi karena dianggap tabu dan memalukan keluarga, akibatnya banyak korban hubungan seksual sedarah yang tidak mau menyelesaikan masalah melalui proses hukum. Hal ini mengakibatkan kasus hubungan seksual sedarah semakin meningkat dan masih terus berlangsung, sanksi terselubung terhadap ibu yang tidak berpartisipasi dalam tuntutan peranan seksual sebagai istri, dan urusan di kepolisian pun harus mengeluarkan pembiayaan.

Peran media massa, baik secara online maupun koran dan majalah fisik, belum memberi perhatian penuh terhadap kasus hubungan seksual sedarah, berita yang memberitakan info kasus penyimpangan seksual dijual murah dan justru dapat diakses oleh semua orang. Mestinya media massa dapat membantu upaya pencegahan kasus penyimpangan seksual, tetapi kenderungan justru memberitakan penyimpangan seksual dengan kurang mendidik dan diulurkan ke berita pornografis sehingga mendorong menguatnya kegiatan kejahatan susila lainnya. Media sosial melalui jaringan internet menjadi salah satu faktor membuka situs pornografi dengan mudah, ketika tidak dibarengi dengan pengetahuan agama yang cukup, pembaca dapat melampiaskan dorongan seksualnya kepada orang yang terdekat.

Bagan
Kekerasan Hubungan Seksual Sedarah
di Batam

Kekerasan	Keterangan
Bentuk	Ancaman verbal (menghina, memfitnah)
	Kekerasan seksual
	Pelecehan seksual
	Ekploitasi ekonomi
	Perkosaan hingga Kehamilan Korban, Sodomi
Lokus (TKP)	Di rumah milik sendiri di lingkungan kumuh
	Di rumah kontrak /bedeng dengan lingkungan kumuh Di rumah yang terisolir tetangga
Pelaku	Ayah kandung
	Kakak kandung
	Ayah tiri
	Paman
Korban	Anak perempuan
	Keponakan perempuan
	Anak tiri
	Saudara dekat
Usia korban	1,8 s.d. 18

Sumber: kompilasi data informan di lapangan

Data hubungan seksual sedarah di Batam dilihat dari bentuk kekerasan, lokus, korban dan pelaku di daerah penelitian dapat disimpulkan, bahwa bentuk kekerasan yang terjadi hampir seluruhnya berkaitan dengan kekerasan seksual.

Tindakan penganiayaan seksual dapat dibagi atas tiga kategori yaitu perkosaan, hubungan seksual sedarah, dan eksploitasi. Pelaku tindak perkosaan dilakukan oleh ayah kandung, ayah tiri, paman, atau kakek kandung. Tempat kejadian paling banyak di ruang domestik, rumah tempat tinggal daerah kumuh, dan tempat tinggal yang terisolir. Perkosaan biasanya terjadi karena pelaku sebelumnya mengancam dengan memperlihatkan kekuatan dan kekuasaan kepada anak, sepupu, atau cucu perempuan agar takut dan menurut.

Pelaku kekerasan seksual sedarah yang disebutkan di atas merupakan tindakan sangat menyimpang dan amoral. Sejumlah kasus dilaporkan, pelaku melakukan berulang kali dan bahkan selama bertahun-tahun tidak dilaporkan oleh keluarga dan kerabat dekat. Korban terbanyak adalah anak perempuan, bahkan korban adalah anak perempuan kakak beradik berusia 16 dan 20 tahun. Mereka menjadi budak seks ayah kandungnya sendiri selama berbulan-bulan, sehingga melahirkan anak. Dampak sosial psikologi yang terjadi pada korban sedarah, mengalami mimpi buruk, ketakutan berlebihan pada orang lain, dan konsentrasi menurun yang akhirnya berdampak pada kesehatan.

Upaya menangani korban kekerasan seksual tak hanya mendapat penanganan medis belaka, tetapi juga mendapat bantuan konsultasi psikologis secara berkala atau intensif (Rumagit, 2013). Pelaku kekerasan seksual pada anak kebanyakan tetap berkeliaran bebas, karena korban dan keluarganya ketakutan atau malu untuk melakukan pengaduan, membuat pelaku justru mengulangi lagi perbuatan yang sama pada anak lain, tidak merasa jera, terutama apabila orang tidak berani melaporkan. Hukuman diterima pelaku apabila terungkap kasusnya, sangat ringan sebab sulit sekali menemukan alat bukti, apalagi kalau kasusnya tidak dilaporkan dan diproses secara hukum, sehingga pelaku tetap bebas tidak terkena sanksi.

Apabila pelaku tertangkap, sanksi hukum dan sosial berupa pengusiran. Menurut KUHP pasal 285 “Barangsiapa dengan kekerasan atau

ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun". Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pelaku perkosaan dapat dihukum paling lama 20 tahun, dan apabila pelaku adalah orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana.

Perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi korban kejahatan dikemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama. Karena berdasarkan fakta yang terungkap pada saat pelaku kejahatan terhadap anak (terutama pelaku kejahatan seksual) diperiksa di persidangan, ternyata sang pelaku pernah mengalami (pelecehan seksual) saat berusia anak, sehingga sang pelaku terobsesi untuk melakukan hal yang sama sebagaimana yang pernah dialami.

Penutup

Kesimpulan: Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak khususnya hubungan seksual sedarah merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensional, upaya penanganan tidak hanya melibatkan korban dan pelaku, tetapi semua unsur di dalam masyarakat, termasuk kebijakan penerapan aturan hukum yang tegas. Kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya hubungan seksual sedarah tidak hanya menyangkut perilaku, tetapi juga nilai yang berkembang di masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh kultur yang sangat

patriarkhis. Penanganan kekerasan hubungan seksual sedarah diperlukan adanya *grand strategy synergism*, menggabungkan kerja delapan kementerian dengan perangkat hukumnya, ditambah budaya masyarakat dalam penanganan hubungan seksual sedarah karena membutuhkan penanganan tepat dan berkelanjutan, baik bagi korban, keluarga, maupun anak hasil hubungan sedarah. Pencegahan darurat hubungan seksual sedarah dengan pendekatan melalui agama menjadi mendesak untuk segera diwujudkan, karena ulama belum memberi banyak perhatian terhadap persoalan kekerasan seksual hubungan sedarah. Penyadaran semua umat beragama agar moralitas tetap terjaga bahwa melakukan tindakan hubungan seksual sedarah merupakan tindakan tidak beradab. Memberikan efek jera terhadap pelaku karena merusak masa depan anak kandungnya sendiri.

Rekomendasi: Kepada pemerintah daerah, upaya penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak seharusnya dalam satu pintu keterpaduan dan sinergi yang simultan antarlembaga pemerintah dan swasta peduli masalah kekerasan perempuan dan anak, agar lebih *concern* terhadap masalah kekerasan seksual sedarah melalui serangkaian kebijakan dan perangkat hukum yang berspektif gender. Sekretariat perlindungan korban tindak kekerasan seharusnya memiliki bank data kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Perlu dukungan anggaran pemerintah berkait dengan pendampingan terhadap korban, penguatan sarana dan prasarana, penyediaan tempat untuk *shelter*; penyediaan tempat untuk rumah aman, bantuan usaha bagi keluarga dan korban. Perlu kesamaan visi, misi dalam penanganan hubungan seksual sedarah dan keberpihakan terhadap korban dalam penanganan hubungan seksual sedarah. Perlu aturan hukum bagi korban yang masih sekolah agar dapat melanjutkan.

Kepada Kementerian Sosial cq Direktorat Anak dalam membuat kebijakan tentang penanganan kekerasan terhadap anak khususnya masalah hubungan seksual sedarah penanganan tidak hanya kepada korban, tetapi juga keluarga,

dan masa depan anak hasil hubungan seksual untuk diberi perlindungan sosial dan hukum untuk kelangsungan hidup, melalui peningkatan kuantitas dan kualitas pendamping terhadap korban, sosialisasi dan penyadaran di lingkungan terdekat, rehabilitasi sosial korban dan pelaku di bawah umur (ABH), penanaman nilai agama sejak dini, *parenting* pranikah perlindungan terhadap keluarga, keberpihakan aparat penegak hukum terhadap korban.

Upaya penanganan yang dilakukan melalui profesi pekerjaan sosial dapat meliputi: Korban, keluarga, dan atau bersama masyarakat dapat melapor ke RT, lurah, dinas sosial kota atau provinsi. Pihak-pihak penerima laporan awal merujuk ke lembaga yang menangani hubungan seksual sedarah ke Rumah Aman dan Rumah Sakit. Tahapan proses pelayanan dengan pendampingan sosial-psikologis korban melalui: Penjangkauan, apabila korban masih di dalam keluarga atau rumah aman. *Assesment* (pengungkapan dan pemahaman permasalahan hubungan sedarah yang dialami korban untuk mengidentifikasi sumber dan potensi korban dan lingkungan sekitar, kebutuhan yang diperlukan dalam penanganan korban). Diagnosis (penentuan penyebab masalah, kebutuhan layanan dan sumber-sumber yang dapat diakses untuk penanganan korban). Penyusunan Rencana *treatment* yang dilakukan, seperti pemeriksaan kesehatan, konsultasi psikologis (pemulihan traumatik dan kondisi psikologis), pemeriksaan kejiwaan ke psikiater (bagi yang mengalami gangguan kejiwaan baik yang ringan, sedang, dan yang berat), Pendampingan sosial oleh pekerja sosial dalam resosialisasi korban keluarga, masyarakat atau lembaga rujukan berikutnya (sekolah, panti penitipan bayi, lembaga keagamaan dan advokasi bila berhadapan dengan proses hukum sebagai saksi dari pelaku Hubungan sedarah.

Treatment: yaitu pelaksanaan dari perencanaan, kegiatan pelayanan data kasus harus terinci secara jelas dan lengkap yang dapat digunakan sebagai bahan monitoring, bimbingan lanjut dan terminasi, diarahkan perubahan perilaku korban agar optimis menghadapi kehidupan, berorientasi

ke depan, berjuang keras meraih masa depan dan ditekankan pada sikap kemandirian agar korban dapat berfungsi sosial dalam menjalani kehidupannya. Monitoring korban, setelah resosialisasi (pemulangan/rujukan layanan) untuk memantau perkembangan pemulihan kondisi mental sosial-psikologis dan kemandirian. Bimbingan lanjutan, apabila masih diperlukan kelayan untuk penanganan kasusnya. Terminasi (penghentian pelayanan) apabila korban sudah dianggap selesai menerima pelayanan secara menyeluruh dan terpadu (komprehensif).

Pustaka Acuan

- Adicahya, Akmal, J. (2014). *Persepsi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap UU PKDRT No 23 Tahun 2004. De Jure/ : Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 6(2), 148–156.
- Abda'la. (2015). *Dinamika Beragama*. Kompas, Kamis, 30 Juli 2015.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. (2011). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual* (cetakan kedua). Bandung: Refika Aditama
- Achi Sudiarti Luhulima. (2000). *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Bandung: Alumnii.
- Arif Gosita. (1985). *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo
- Bhasin, Kamla. (1996). *Penggugat Patriarkhi*. Yogyakarta: Bentang terjemahan Kalynamitra.
- Brison. Jan dan Don Miller. (1998). *Surviving sexual violence, a philosophical perspective*. In Stanley G. French, Wanda Teays and Laura M. Purdy (eds), *Violence Against Women: Philosophical Perspectives*. Ithaca: Cornell University Press
- Collier. (1995). *Combating Sexual Harassment in the Workplace*. Buckingham: Open University Press
- Davit setyawan (2014). *Hubungan Sedarah terhadap Anak: Banyak Terjadi, Sedikit Terungkap*, KPAI 23 Januari 2014.
- Dwi Hapsari Retnaningrum, (2009). *Hubungan Sedarah sebagai Bentuk Manifestasi Kekerasan terhadap Perempuan*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 9 No. 1 Januari 2009.
- E Kristi Poerwandari. (2000). *Kekerasan terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologi Feministik Convention Wacth*. Jakarta: UI
- Erikson E.H. (1967). *Identity and The Live Cycle, Selected Papers, Psychological Issues*. Monographs, Vol I ,No.1, New York: International Universities Press.
- Edwards, Holden, dan Felitti (2003). *Child Abuse and It's Relationship to Conduct Disorder Psychological*

- Abuse*, (<http://priory.com>) diakses pada tanggal 03 Februari 2015
- Hadiati, M. (2006). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Pidana. Perspektif*, 6(2), 82–91.
- Hassan Abdul Hakeem. (2002). *Manusia dalam Ensiklopedi Tematis Spiritualitas Islam*. Bandung: Mizan
- Hess, Beth B. and Myra Max Ferre (eds). (1991). *Analyzing Gender: a Handbook of Social Science Research*. California: Sage Publications.
- Huraerah, Abu. (2006). *Kekerasan Pada Anak*. Bandung: Penerbit Nuansa.
- J.R. Raco. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakter dan Keunggulan*, Jakarta: Grafindo.
- Kartini Kartono. (1989). *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. Jakarta: Mandar Maju
- Kazan, Patricia. (1998). *Sexual assault and the Problem of Consent*”, in Stanley G. French, Wanda Teays and Laura M. Purdy (eds), *Violence Against Women: Philosophical Perspectives*. Ithaca: Cornell University Press.
- Kollman, Nathalie. (1998). *Kekerasan terhadap Perempuan*. Jakarta: YLKI dan Ford Foundation
- Luke, (1974) dalam Susi Eja Yuarsi, 2002. *Tembok Tradisi dan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan kebijakan UGM dan Ford Foundation.
- M.m Nilam W. (2009). *Psikologi Populer: Relasi Orang Tua dan Anak*. Jakarta: Gramedia.
- Mas’udi, Masdar F. (1997). *Perempuan dalam Wacana Keislaman*. Dalam Perempuan dan Pemberdayaan: Kumpulan Karangan untuk Menghormati Ulang Tahun ke-70 Ibu Saparinah Sadli. Jakarta: Kerjasama Program Studi Kajian Wanita Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Harian Kompas dan Penerbit Obor
- Moleong, J Lexy. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya
- Nurjaya, I. N. (2011). *Memahami Kedudukan Dan Kapasitas Hukum Adat Dalam Politik Pembangunan Hukum Nasional. Perspektif*, 16(4), 236–243.
- Poloma, Margaret M. (1979). *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Radjawali Press
- Rumagit, S. K. (2013). *Kekerasan dan Diskriminasi Antar Umat Beragama di Indonesia. Lex Administratum*, 1(2), 56–65.
- Santoso.(2002). *Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga*, Jakarta: Raih Asa Sukses
- Sawitri Supardi Sadarjoen. (2005). *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*. Bandung: Refika Aditama
- Schuler, Margaret (ed). (1992). *Freedom from Violence: Women’s Strategies from Around the World*. New York: UNIFEM
- Sofian, Ahmad, et al. (2002). *Menggagas Tempat yang Aman bagi Perempuan*, Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM bekerja sama dengan Ford Foundation
- Somantri, G. R. (2005). Memahami metode kualitatif. *Makara, Sosial Humaniora*, 9(2), 57–65. Retrieved from <http://journal.ui.ac.id/index.php/humanities/article/view/122/118>
- Sudarman Danim. (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 90. <http://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Supraktik. (1995). *Mengenai Perilaku Abnormal*. Jakarta: Nanisius
- Taganing, N. M. (2008). *Hubungan Pola Asuh Otoriter dengan Perilaku Agresif Pada Remaja. Journal of Chemical Information and Modeling*, 53, 1–11. <http://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Tri Wuryaningsih,(2006), *Topik Penelitian Berbasis Isu Gender dan Kesejahteraan Perlindungan Anak: Makalah pada Pelatihan Metode Penelitian Berspektif Gender untuk Dosen dan Mahasiswa pada tanggal 28-29 Juli 2006 di Puslitwan Unsoed, Purwokerto: Puslitwan*
- WHO. (2016). *WHO| Child Maltreatment*. Retrieved from <https://www.mendeley.com/library/#>
- Zohra Andi Baso. dkk. (2002). *Menghadang Langkah Perempuan*. Yogyakarta: PSK dan Kebijakan UGM dan Ford Foundation

Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan dengan Teori *Self Esteem*

Improving Street Children Welfare with Self Esteem Theory

Pipin Armita

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga. Jl. Marsda Adi Sucipto, Yogyakarta, 55281.

Telpon (0274) 512474. HP. 089687086343. Email: pipinarmita@gmail.com.

Diterima 30 Agustus 2016, diperbaiki 15 September 2016, disetujui 5 Oktober 2016.

Abstract

This study was intended to provide a solution to community or social organizations how to improve social welfare of street children with the self esteem theory and to know what are the constraints faced by street children in improving social welfare. Acceptance and knowing the existing potential toward street children are the basic concept of enhancing street children social welfare, because street children are still able to develop themselves optimally. This article offers four aspects in providing solutions to improve social welfare of street children with self esteem theory: power, significance, virtue, and competence. The basic concept is to offer treatment, protection, and empowerment of street children that can give a better results. All they take then is the willingness of all parties, especially social worker, community, and social organizations to sit together, discuss to find the best solution for street children and then formulate an intervention program that targeted and simultaneously undertake a more coordinated division of work. The basic argument that can be worked out is the street children can develop themselves if a community or social institution introduced self esteem theory in them.

Keywords: *social welfare, street children, self esteem*

Abstrak

Tulisan ini dimaksudkan untuk memberikan solusi kepada komunitas atau lembaga sosial dalam meningkatkan kesejahteraan sosial anak jalanan dengan teori *self esteem* dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi anak jalanan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Sikap penerimaan terhadap diri anak jalanan dan mengetahui potensi yang dimiliki adalah dasar untuk meningkatkan kesejahteraan sosial anak jalanan, karena seseorang anak masih dapat berkembang secara optimal. Tulisan ini menawarkan empat aspek dalam memberi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial anak jalanan dengan teori *self esteem*: Kekuatan, Keberartian, Kebajikan, dan kemampuan. Konsep dasar yang ditawarkan adalah agar penanganan dan upaya perlindungan dan pemberdayaan pada anak jalanan dapat memberi hasil yang lebih baik, dibutuhkan kesediaan semua pihak, terutama pekerja sosial dan komunitas atau lembaga sosial untuk duduk bersama, berdiskusi mencari jalan keluar terbaik bagi anak jalanan dan merumuskan program intervensi yang tepat sasaran dan sekaligus melakukan pembagian kerja yang lebih terkoordinasi. Argumen dasar yang dikembangkan adalah anak dapat mengembangkan dirinya jika komunitas atau lembaga sosial mengenalkan *self esteem* yang ada pada diri anak jalanan.

Kata kunci: *kesejahteraan sosial; anak jalanan; self esteem*

A. Pendahuluan

Permasalahan yang sangat kompleks yang perlu mendapatkan perhatian serius dari banyak pihak, baik keluarga, masyarakat, maupun pemerintah adalah merebaknya anak jalanan. Tetapi sejauh ini perhatian tersebut belum efektif dan solutif, belum memadai, belum terencana, dan belum terintegrasi dengan baik. Anak jalanan

termasuk kategori anak yang tidak berdaya. Secara psikologis, anak jalanan adalah anak-anak yang pada suatu taraf tertentu belum memiliki cukup mental dan emosional yang kuat, sementara mereka harus bergelut dengan dunia jalanan yang keras dan cenderung berpengaruh negatif bagi perkembangan dan pembentukan kepribadiannya (Mursyid Itsnaini, 2010).

Meskipun masalah anak jalanan sudah menjadi global, tetapi sampai sekarang belum ada data yang lengkap dan akurat tentang jumlah anak jalanan di Indonesia maupun di seluruh dunia. Secara global dapat diperkirakan, bahwa ada sekitar 100 juta anak jalanan di belahan dunia. Sebagian mereka adalah anak jalanan yang berusia belasan tahun, tetapi ada juga diantaranya yang berusia di bawah 10 tahun (Edi Suharto, 2007: 230). Di wilayah masyarakat kota, keberadaan anak jalanan menjadi suatu realitas kehidupan. Dengan demikian, anak jalanan menjadi semakin tidak mendapatkan makna hidup dan apresiasi positif dalam hubungan-hubungan sosial budaya dengan masyarakat kota pada umumnya. Norma-norma kehidupan anak jalanan secara tegas dianggap tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan yang berlaku umum. Situasi ini menurut James H. Stronge (2000: 66), menjadikan kehidupan anak jalanan selalu berada dalam bayang-bayang resiko yang tinggi, mereka sering merasakan ketidakstabilan sosial dan emosional, ketidakamanan serta sering menghadapi deprivation ekonomi.

Keberadaan anak jalanan dan anak terlantar sering terlihat di kota-kota besar di Indonesia. Jumlah anak jalanan dan anak terlantar dari tahun ketahun selalu mengalami peningkatan, hal ini menjadi kondisi yang sangat memprihatinkan. Menurut Darmawan W. (2008), anak jalanan seharusnya dilindungi dan dijamin hak-haknya sebagaimana anak pada umumnya, agar menjadi manusia yang bermanfaat dan mempunyai masa depan yang cerah. Anak-anak perlu mendapatkan hak-haknya secara normal sebagaimana layaknya, antara lain hak sipil dan kemerdekaan (*civil right and freedoms*), lingkungan keluarga dan pilihan pemeliharaan (*family environment and alternative care*), kesehatan dasar dan kesejahteraan (*basic health and welfare*), pendidikan, rekreasi dan budaya (*educational, leisure, and culture activities*), serta perlindungan khusus (*special protection*). Hak-hak tersebut yang seharusnya diterima oleh seorang anak belum dapat terpenuhi, sehingga seorang anak terpaksa memilih untuk hidup dijalan.

Pada saat ini, penanganan anak-anak jalanan mulai digiatkan dengan baik. Dapat dilihat dari banyaknya bermunculan rumah singgah, panti, dan sanggar yang memfasilitasi anak-anak jalanan dalam mengembangkan diri mereka dengan pendidikan dan *soft skill*. Pemerintah mempunyai tanggung jawab besar terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak-anak terlantar, termasuk anak jalanan. Hal ini tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa, “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Hak-hak asasi manusia pada umumnya, seperti halnya tercantum dalam Undang-undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan dalam Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1989 dan telah diratifikasi oleh pemerintah RI melalui Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 telah meletakkan dasar utama bagi pemenuhan hak-hak anak.

Penanganan anak jalanan tidak hanya dari pemerintah saja. Tetapi banyak juga penanggulangan dan penanganan dari LSM, organisasi mahasiswa atau bahkan perseorangan. Tumbuh kembangnya anak harus diperhatikan dengan baik, karena anak merupakan generasi penerus masa depan. Tidak terkecuali juga dengan anak jalanan, mereka mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan dan mengasah bakat yang ada dalam diri mereka. Menurut Pasal 9 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjelaskan bahwa, “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan termasuk juga anak jalanan” (Herlina Apong, dkk, 2003: 88). Dasar seseorang anak dapat berkembang secara optimal, dapat dilihat dari sikap penerimaan terhadap diri sendiri dan mengetahui potensi yang ada dalam diri mereka. Tetapi hal itu tidak cukup dari kesadaran dari diri mereka sendiri, tentunya harus ada dorongan dari pihak luar untuk mengembalikan potensi dan kemampuan mereka.

Di kota Yogyakarta, komunitas atau lembaga sosial sudah cukup memadai. Tetapi tidak

semua komunitas atau lembaga sosial yang tahu bagaimana solusi yang tepat untuk menangani masalah anak jalanan. Padahal, setiap komunitas atau lembaga sosial harus mampu memfasilitasi anak-anak jalanan dalam mengembangkan diri mereka dengan pendekatan sosial berupa *soft skill* dan kesadaran akan kemampuan diri, yang penulis sebut dengan teori *self esteem*. Masalah yang dihadapi anak jalanan sekarang ini adalah pola asuh dan dengan siapa anak jalanan berhubungan. Disinilah peran komunitas dan lembaga sosial dalam membina kemampuan anak jalanan. Komunitas dan lembaga sosial harus mampu membawa anak pada pemahaman dan penerimaan terhadap diri, serta menjadi pribadi yang kemudian lebih berarti di masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan kajian mendalam yang berkaitan dengan solusi untuk menangani anak jalanan. Oleh karena itu, dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis mengangkat judul “Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan dengan Teori *Self Esteem*”. Penulisan karya ilmiah ini difokuskan untuk membahas pendekatan sosial yang dapat dilakukan oleh komunitas atau lembaga sosial berupa teori *self esteem* yang dimiliki anak jalanan, untuk memberikan solusi yang mendasar dalam meningkatkan kesejahteraan sosial anak jalanan dengan teori *self esteem* dan untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi anak jalanan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Secara teoritis, manfaat dari penulisan ini adalah komunitas atau lembaga sosial dapat melakukan pendekatan dengan teori *self esteem* pada anak jalanan. Oleh karena masyarakat telah dipandang sebagai keluarga dan komunitas yang harmonis (Niels Mulder, 2004: 110), penulisan ini sebagai informasi kepada masyarakat terutama bagi pekerja sosial akan pentingnya teori *self esteem* untuk anak jalanan.

B. Penggunaan Metode Kajian

Tulisan ini dilakukan berbasis pada kajian kepustakaan, untuk mendapatkan konsepsi kebijakan teori atau doktrin dan pemikiran konseptual bertolak dari penelitian pendahulu yang

berkaitan dengan objek telaah kajian, membatasi kegiatan kepada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja. dipergunakan untuk mengkonfirmasi dan memperjelas (klarifikasi) data yang diperoleh (Mestetika Zed, 2004: 2). Metode penulisan ini menggunakan pendekatan deskriptif. Menurut Nawawi, metode deskriptif mempunyai dua ciri pokok, memusatkan perhatian pada masalah yang ada bersifat aktual, menggambarkan fakta tentang masalah yang diselidiki dengan interpretasi rasional (Juwita, 2015). Analisis dilakukan dalam bentuk uraian kata-kata (deskriptif).

C. Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan

1. Definisi Anak Jalanan dan Masalahnya

Menurut Kementerian Sosial RI, anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat umum lainnya. Anak jalanan dalam konteks ini adalah anak yang berusia antara enam sampai dengan delapan belas tahun. Sosok anak jalanan bermunculan dikota-kota, baik itu di *emper-emper* toko, di stasiun, terminal, pasar, tempat wisata bahkan ada yang dimakam-makam, anak-anak jalanan menjadikan tempat mangkalnya sebagai tempat berteduh, berlindung, sekaligus mencari sumber kehidupan, meskipun ada juga yang masih tinggal dengan keluarganya. Jumlah anak jalanan dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan (Mariana D.N Nasution, Fuad Nashori, 2007). Anak jalanan adalah anak yang sebagian waktu mereka gunakan di jalan atau tempat umum, baik untuk mencari nafkah maupun berkeliaran. Dalam mencari nafkah, ada beberapa anak yang rela melakukan dengan kemauan mereka sendiri, tetapi banyak pula anak yang dipaksa untuk bekerja di jalan (mengemis, mengamen, menjadi penyemir sepatu) oleh orang-orang jahat sekitar mereka dengan berbagai alasan, baik orang tua yang tidak bertanggung jawab maupun pihak keluarga lain, dengan alasan ekonomi keluarga.

Fenomena anak jalanan mempunyai hubungan dengan masalah-masalah lain, baik secara internal maupun eksternal, seperti ekonomi, psikologi, sosial, budaya, lingkungan, pendidikan

an, agama, dan keluarga. Mereka korban dari kondisi yang dialami individu, baik internal, eksternal maupun kombinasi keduanya. Banyaknya masalah yang tampak pada fenomena anak jalanan di kota besar di Indonesia, termasuk Yogyakarta adalah sebuah potret masalah perkotaan. Munculnya anak jalanan, tidak bisa dilihat dari faktor ekonomi saja, tetapi banyak faktor yang menjadi pemicu, seperti kemiskinan, perhatian keluarga, kenakalan remaja, pola asuh yang salah.

Menurut Moeliono dan Dananto (2007), masalah yang dihadapi oleh anak jalanan berdasarkan dengan siapa berhubungan. Lima sumber masalah anak jalanan: Pertama, anak jalanan dengan anak jalanan. Kesan yang dimunculkan oleh anak jalanan *high risk* sebagai sosok yang bebas, tidak dikontrol orang tua, tidak wajib setor uang, bebas jajan, merokok, bergaya hidup santai sering menjadi daya tarik sendiri bagi anak jalanan *vulnerable* untuk mengikuti jejak anak jalanan *high risk*. Kekerasan antaranak jalanan juga sering terjadi dalam berbagai bentuk seperti perkeltahan, penggunaan senjata tajam, pengerojukan, *pengompasan* atau pemerasan, intimidasi psikis dan bahkan seksual, akibat kekerasan terwujud dalam trauma psikis dan lingkaran setan kekerasan. Kedua, anak jalanan dengan orang tua. Kemiskinan sering dituding sebagai biang keterlibatan anak dalam ekonomi keluarga, dengan dalih kemiskinan anak diperlakukan secara salah dan dipaksa bekerja untuk membantu ekonomi orang tua. Ketiga, anak jalanan dengan masyarakat, yang cenderung memberi stigma buruk pada anak jalanan. Anak jalanan dianggap sebagai pengganggu kenyamanan lingkungan, pelaku kriminalitas dan kekerasan. Keempat, anak jalanan dengan LSM pendamping, terkadang terjadi persaingan antara LSM, sehingga untuk menarik perhatian anak, LSM memberi iming-iming, janji atau bingkisan dan uang saku. Anak jalanan tiba-tiba merasa jadi idola yang diperebutkan, bahkan menuduh LSM “menjual kemiskinan anak jalanan”. Kelima, anak jalanan dengan negara, yang berkewajiban menjamin hak asasi anak. Tiga persoalan besar yang di-

alami anak jalanan adalah identitas dan akte kelahiran, terbatasnya akses anak pada berbagai fasilitas pelayanan umum, serta diskriminasi dan kekerasan aparat pemerintah (negara) terhadap anak jalanan.

Banyak orang di lingkup ini tampaknya tidak pernah ada jalan keluar dari kemiskinan, yang cenderung mendapat apatisme masyarakat luas dan sedikit saja politisi mau menyentuhnya. Program konseling yang biasanya disertai program pelatihan karir, jarang ditemukan di lingkup ini, kendati ditemukan program konseling pekerjaan di komunitas, sering kali konselornya sendiri dicurigai atau diabaikan lantaran kurangnya informasi publik dan akses sosial yang dimiliki warga miskin (Robert L. Gibson, Marianne H. Mitchell, 2011: 267).

2. Latar Belakang Menjadi Anak Jalanan

Beberapa hal yang menyebabkan munculnya fenomena anak jalanan, yaitu sejumlah kebijakan makro dalam bidang sosial ekonomi telah menyumbang munculnya fenomena anak jalanan. Modernisasi, industrialisasi, migrasi dan urbanisasi menyebabkan terjadinya perubahan jumlah anggota keluarga dan gaya hidup yang membuat dukungan sosial dan perlindungan terhadap anak menjadi berkurang. Kekerasan dalam keluarga menjadi latar belakang penting yang menyebabkan anak keluar dari rumah yang mengalami tekanan ekonomi dan jumlah anggota keluarga yang besar. Terkait permasalahan ekonomi, sehingga anak terpaksa ikut membantu orang tua dengan bekerja di jalanan. Orang tua “mengayangkan” sebagai sumber ekonomi keluarga pengganti peran yang seharusnya dilakukan oleh orang dewasa (Syahrudin, Maulana, 2014).

Sebenarnya banyak faktor yang menyebabkan anak-anak terjerumus dalam kehidupan di jalanan, misalnya kesulitan keuangan keluarga atau tekanan kemiskinan, ketidakharmonisan rumah tangga, dan masalah khusus menyangkut hubungan anak dengan orang tua. Kombinasi dari faktor ini sering kali memaksa anak-anak mengambil inisiatif mencari nafkah atau hidup mandiri di jalanan. Kadangkala pengaruh te-

man atau kerabat juga ikut menentukan keputusan untuk hidup di jalanan (Bagong Suyanto, 2013: 211). Studi yang dilakukan Kemensos Pusat dan Unika Atma Jaya Jakarta (1999) di Surabaya yang mewawancarai 889 anak jalanan di berbagai sudut kota menemukan, bahwa faktor penyebab atau alasan anak memilih hidup di jalanan adalah karena kurang biaya sekolah (28,2 persen) dan membantu pekerjaan orang tua (28,6 persen). Pada batas-batas tertentu, tekanan kemiskinan merupakan kondisi yang mendorong anak-anak hidup di jalanan. Akan tetapi bukan berarti kemiskinan merupakan satu-satunya faktor determinan yang menyebabkan anak lari dari rumah dan terpaksa hidup di jalanan. Menurut penjelasan Justika S. Baharjah, kebanyakan anak bekerja di jalanan bukan atas kemauan mereka sendiri, melainkan sekitar 60 persen di antaranya karena dipaksa oleh orang tuanya, yang seharusnya memberi perlindungan.

3. Upaya Menangani Anak Jalanan dengan Teori *Self Esteem*

Definisi *self esteem* (harga diri) menurut beberapa tokoh, di antaranya Branden (dalam Gufron dan Rini 2010: 43), mendefinisikan *self esteem* adalah keyakinan individu terhadap kemampuan dirinya untuk belajar membuat pilihan dan keputusan yang layak serta merespons secara efektif terhadap perubahan. Coopersmith mendefinisikan, *self esteem* adalah penilaian yang dibuat oleh seseorang dan biasanya tetap tentang dirinya, yang mengekspresikan satu sikap menyetujui atau tidak setuju, dan menganggap dirinya mampu, berarti, sukses dan berharga. Menurut Ghufon dan Rini, *self esteem* adalah hasil dari penelitian yang dilakukan dan perlakuan orang lain terhadap dirinya yang menunjukkan kemampuan individu memiliki rasa percaya diri serta mampu berhasil dan berguna. Sebagai kebutuhan psikologis, terpenuhinya kebutuhan harga diri menentukan kondisi kesehatan psikologis, sebaliknya berakibat terganggunya kondisi psikologis yang dapat menggejala pada berbagai bentuk gangguan fisik dan psikis jika tidak terpenuhinya kebutuhan harga diri.

Self esteem adalah penilaian pribadi terhadap hal yang dicapai dengan menganalisa kemampuan perilaku mengenali diri. Harga diri diperoleh dari diri sendiri dan orang lain. Dalam harga diri, yang menjadi aspek utama adalah dicintai dan menerima penghargaan dari orang lain, manusia cenderung bersifat negatif walaupun cinta dan mengakui kemampuan orang lain, tetapi jarang mengekspresikan. Harga diri bermakna dan berhasil jika diterima dan diakui orang lain, merasa mampu menghadapi kehidupan dan dapat mengontrol dirinya (Widiyatun, 1999: 34). Menurut Michener dan Delamater (1999), sumber terpenting dalam pembentukan dan perkembangan harga diri adalah perbandingan sosial, yang dapat mempengaruhi harga diri, karena perasaan mampu (kompeten) atau berharga, dapat diperoleh dari suatu performance yang tergantung sebagian besar kepada siapa membandingkan, baik dengan diri kita sendiri atau dengan orang lain.

Berdasarkan dari berbagi pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa *self esteem* merupakan evaluasi menyeluruh terhadap diri sendiri yang bersifat khas, mengenai percaya diri, keberhargaan, mandiri, bebas, mengenai kemampuan, keberhasilan, serta penerimaan diri yang dibuat dan dipertahankan oleh individu, berasal dari interaksi individu dengan orang lain. Proses pembentukan *self esteem* dimulai saat bayi merasakan tepukan pertama kali yang diterima orang mengenai kelahirannya (Nur Ghufon dan Rini Risnawati, 2010: 41-42). *Self esteem* sudah terbentuk pada masa kanak-kanak sehingga seorang anak sangat perlu mendapatkan rasa penghargaan dari orang tuanya. Proses selanjutnya, *self esteem* dibentuk melalui perlakuan yang diterima individu dari orang lingkungannya, seperti dimanja dan diperhatikan orang tua dan orang lain. *Self esteem* bukan merupakan faktor yang dapat dipelajari dan terbentuknya sepanjang pengalaman individu (Daradjat, 2013: 18).

Self esteem berkaitan dengan individu mempersepsikan diri secara keseluruhan, penilaian seseorang tentang dirinya dapat berbeda dengan persepsi ideal yang diinginkan, yang kemudian

dapat berpengaruh pada diri orang tersebut. Apabila perbedaan keadaan dirinya dengan persepsi idealnya besar, menimbulkan harga diri yang rendah, sebaliknya jika keadaan dirinya dengan persepsi idealnya kecil, orang tersebut memiliki harga diri yang tinggi (Sorga Perucha Iful Prameswari, dkk., 2013: 58), *self esteem* sangat berperan penting dalam perilaku individu. Coopersmith mengemukakan, bahwa harga diri menentukan seseorang beradaptasi berdasarkan tuntutan lingkungan, berperan dalam perilaku melalui proses berpikir, emosi, nilai cita-cita serta tujuan yang hendak dicapai seseorang. Pengalaman sebagai sarana mencapai kematangan dan perkembangan kepribadian, tetapi pengalaman tidak selalu memberikan umpan balik yang positif. Jika umpan balik yang diterima remaja positif, harga dirinya membaik, sebaliknya jika umpan yang diterima remaja negatif, juga mempengaruhi harga diri remaja tersebut.

Di dalam Nur Ghufro dan Rini Risnawati (2010) menyebutkan, karakteristik *self esteem* dibagi dua bentuk, karakteristik *self esteem* rendah (*low self esteem*) dan karakteristik *self esteem* tinggi (*high self esteem*). Untuk karakteristik *self esteem* rendah, Frey dan Carlock menyebutkan adanya indikasi-indikasi individu yang memiliki *self esteem* rendah, seperti mengungkapkan kata-kata yang biasa menunjukkan harga dirinya rendah, merasa takut terhadap pengalaman baru, tidak percaya akan kemampuan diri, sehingga cenderung menghindari hal-hal yang baru dan beresiko, serta bereaksi secara berlebihan terhadap kegagalan, sangat ingin menjadi sempurna sehingga sulit menghadapi kegagalan. Karakteristik *self esteem* tinggi, Reasoner menyebutkan, bahwa individu yang memiliki *self esteem* tinggi cenderung menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan diri dengan cara potensi yang dimilikinya. Karakteristik *self esteem* tinggi, antara lain aktif dan dapat mengekspresikan dirinya dengan baik, tidak merasa bangga yang berlebihan akan dirinya, lebih menghargai orang lain, menghargai prestasi dan kebaikan orang lain, mau mengakui kesalahan yang dilakukan,

tidak menganggap dirinya lebih baik dari orang lain, tidak menganggap dirinya lebih lemah dari orang lain, dan lebih mudah menyesuaikan diri dengan suasana yang menyenangkan sehingga tingkat kecemasannya rendah dan memiliki ketahanan diri yang seimbang.

Self esteem rendah menyebabkan orang kehilangan orientasi dalam menghadapi realitas, sesungguhnya dia tidak sanggup melihat dan menyadari realitas yang ada pada dirinya, sehingga mudah merasa sedih, gelisah, tertekan, dan tidak mampu menggali potensi dalam dirinya. Mereka barangkali sadar memiliki potensi bagus untuk tumbuh dan berkembang, tetapi sebuah penghalang besar *self esteem* rendah merintanginya sehingga tidak bisa mewujudkan kemampuannya dalam bentuk kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup. Empat aspek teori *Self esteem* menurut Coopersmi dalam upaya menangani anak jalanan, *power* (kekuatan), *significance* (keberartian), *virtue* (kebajikan), *competence* (kemampuan), (Setiawan, D.S., 2012).

Pemaknaan diri sebagai bentuk harga diri sangat penting bagi anak jalanan. Anak yang pada mulanya banyak menghabiskan waktu di jalanan harus diberikan pendekatan secara pelan-pelan dan juga berkelanjutan. Pegiat atau pekerja sosial dapat menerapkan teori *self esteem* yang meliputi: *Power* (kekuatan), kemampuan yang dimiliki untuk mengendalikan atau mempengaruhi orang lain. Kekuatan ditandai oleh adanya pengakuan dan rasa hormat yang diterima individu dari orang lain. Didasari atas alasan bahwa setiap anak pasti memiliki sisi baik dan potensinya masing-masing, setiap komunitas atau lembaga sosial tidak boleh membedakan anak jalanan yang datang karena membutuhkan bantuan sosial dan yang tidak.

Komunitas atau lembaga sosial juga harus aktif melakukan peninjauan ke daerah-daerah tertentu untuk mendata anak jalanan dan mengajak mereka bergabung di komunitas sosial agar mendapatkan pelayanan sosial, tanpa melihat mereka masih memiliki keluarga atau tidak, normal atau kurang normal (cacat atau idiot), semuanya diajak bergabung di komunitas atau

lembaga sosial dengan harapan mereka bisa menjadi lebih baik dan lebih terurus, banyak masalah dan perbedaan yang ditemui dari setiap anak jalanan tetapi banyak pula alasan dan cara untuk menjadikan mereka menjadi lebih berarti.

Significance (keberartian), adalah penerimaan yang diperoleh berdasarkan penelitian orang lain, ditandai oleh adanya kepedulian dan afeksi yang diterima individu dari orang lain. Banyak sekali komunitas dan lembaga sosial yang peduli anak jalanan, kepedulian tersebut harus selalu didukung. Setiap komunitas atau lembaga sosial harus mendukung kegiatan-kegiatan yang memberi kontribusi yang baik kepada anak, seperti kegiatan motivasi, pelatihan, dan partisipasi lomba agar anak mau mengikuti kegiatan tersebut sehingga mereka semakin memiliki sikap percaya diri atas dirinya sendiri. *Virtue* (kebajikan), adalah ketaatan terhadap etika atau norma moral masyarakat, ditandai oleh ketaatan untuk menjauhi tingkah laku yang tidak diperbolehkan dan terbebas dari perasaan yang tidak menyenangkan. Eksistensi komunitas atau lembaga sosial idealnya membuat anak jalanan sudah tidak lagi terjun ke jalan mencari nafkah, mencari pekerjaan lebih baik, dengan membuka usaha sendiri atau bekerja kepada orang lain. Solusi lain yang dapat dilakukan oleh komunitas atau lembaga sosial adalah dengan mengembalikan anak duduk di bangku sekolah, meskipun masih ada beberapa yang nekat kembali ke jalan, tetapi komunitas atau lembaga sosial sudah berupaya berbuat kebajikan bagi anak jalanan.

Competence (kemampuan), adalah kemampuan untuk berhasil sesuai dengan tujuan yang dimiliki, ditandai oleh individu yang berhasil memenuhi tuntutan prestasi dan dalam beradaptasi. Banyaknya komunitas atau lembaga sosial yang mengadakan berbagai macam kegiatan dan pelatihan untuk anak jalanan, membuktikan bahwa mereka mengakui anak jalanan mampu berkembang dengan lebih baik dari perkiraan orang. Anak diarahkan untuk menggali potensi mereka masing-masing dengan berbagai pelatihan dan keterampilan, dimotivasi untuk bisa kembali ke bangku sekolah formal karena penting bagi

kehidupan mereka ke depan, secara perlahan mereka diberi dorongan dan motivasi agar tidak ada lagi merasa minder, masing-masing memiliki potensi yang pantas untuk dibanggakan.

Anak jalanan yang pada mulanya tidak suka mandi menjadi mau mandi, yang mulanya duduk dan berbicara kasar serta seenaknya sekarang jadi lebih sopan dan punya tata krama, pakaian yang biasanya terkesan kotor, kumuh dan asal pakai menjadi lebih bersih serta lebih pantas, harga diri dan potensi anak lebih diperhatikan. Menurut Bagong Suyanto (2013), agar penanganan dan upaya perlindungan serta pemberdayaan pada anak jalanan dapat memberi hasil lebih baik, dibutuhkan kesediaan semua pihak duduk bersama, berdiskusi untuk mencari jalan keluar yang terbaik bagi anak-anak jalanan dan kemudian merumuskan program intervensi yang tepat sasaran dan sekaligus melakukan pembagian kerja yang terkoordinasi, termasuk juga pekerja sosial yang sangat berperan dalam hal ini.

Menurut Tata Sudrajat, selain teori *self esteem*, ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan LSM dan atau pekerja sosial dalam penanganan anak jalanan, yaitu *street based*, model penanganan anak jalanan di tempat anak jalanan itu berasal atau tinggal, *street educator* datang kepada mereka, berdialog, mendampingi mereka bekerja, memahami dan menerima situasinya, serta menempatkan diri sebagai teman. *Centre based*, adalah pendekatan dan penanganan anak jalanan di lembaga atau panti. Anak-anak yang masuk dalam program ini ditampung dan diberi pelayanan di lembaga atau panti, malam hari diberi makanan dan perlindungan, serta perlakuan hangat dan bersahabat dari pekerja sosial. *Community based* adalah model penanganan yang melibatkan seluruh potensi masyarakat, terutama keluarga atau orang tua anak jalanan. Pendekatan ini bersifat preventif, yakni mencegah anak agar tidak masuk dan terjerumus dalam kehidupan di jalanan. Keluarga diberi kegiatan penyuluhan tentang pengasuhan anak dan upaya untuk meningkatkan taraf hidup, sementara anak-anak diberi kesempatan memperoleh pendidikan formal dan informal, pengisian waktu luang

dan kegiatan lain yang bermanfaat. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat agar sanggup melindungi, mengasuh dan memenuhi kebutuhan anak-anaknya secara mandiri.

Dari berbagai pendekatan yang diuraikan, tidak berarti satu pendekatan yang ada lebih baik daripada pendekatan lain. Pendekatan yang lebih tepat, banyak ditentukan oleh kebutuhan dan masalah yang dihadapi anak jalanan. Agar pekerja sosial dapat membantu anak mengembangkan perilaku dan mengurus diri sendiri, perlu secara proaktif mempromosikan program-program intervensi primer yang akan mendorong perilaku ini. Program pendidikan dapat digunakan untuk mengajari anak mengatasi dan mengelola *stress*, membangun hubungan sosial positif, bertanggung jawab, dan belajar mengurus kesehatan fisik dan psikologis (David Geldard, 2012: 34). Pittman Etal mengemukakan, bahwa anak tumbuh di tengah masyarakat, bukan hanya di sekolah dan di program anak. Organisasi berbasis masyarakat, lembaga pelayanan, bisnis, dan sosial adalah lingkup berbagai strategi dapat digunakan untuk berkontribusi pada perkembangan seorang anak remaja. Akan tetapi konteks-konteks cenderung tumpang tindih dengan derajat yang berbeda-beda, kebijakan-kebijakan sosial seharusnya melihat perpotongan antara anak remaja dan konteks-konteks yang membentuk dan membangun pengalaman perkembangan mereka, intervensi seharusnya memfokuskan pada dukungan dan kesempatan yang berkaitan dengan efikasi diri, pemberdayaan, dan pembentukan identitas positif.

D. Penutup

Keberadaan anak jalanan, sebagai suatu realitas kehidupan dalam masyarakat, kadang-kadang tidak mendapatkan makna dan apresiasi positif dalam hubungan sosial budaya masyarakat, kondisi yang sangat memprihatinkan padahal jumlah anak jalanan dan anak terlantar dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Anak jalanan seharusnya dilindungi dan dijamin hak-haknya seperti anak pada umumnya agar

menjadi manusia yang bermanfaat dan mempunyai masa depan yang cerah. Anak-anak perlu mendapatkan hak-haknya secara normal seperti layaknya, antara lain hak sipil dan kemerdekaan, lingkungan keluarga dan pilihan pemeliharaan, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, rekreasi dan budaya, dan perlindungan khusus. Hak tersebut belum dapat terpenuhi oleh sebagian anak, sehingga terpaksa memilih hidup dijalanan. Pekerja sosial dapat membantu anak mengembangkan perilaku, mengurus diri sendiri, proaktif mempromosikan program intervensi primer yang mendorong perilaku ini. Program pendidikan dapat digunakan untuk mengajari anak mengatasi dan mengelola *stress*, membangun hubungan sosial positif, bertanggung jawab, dan belajar bagaimana mengurus kesehatan fisik dan psikologis.

Pustaka Acuan

- Apong, Herlina, dkk. (2003). *Perlindungan Anak Berbasis Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: Harapan Prima
- Daradjat. (2013). *Psikologi Kepribadian*. Jakarta: Jember Tiga
- Darmawan, W., "Peta Masalah Anak Jalanan dan Alternatif Model Pemecahannya Berbasis Pemberdayaan Keluarga", dalam HTML Document, 21 Januari 2008
- Fathi, Rizqullah, *Makin Meningkatnya Jumlah Anak Jalanan di Kota Besar: Faktor Penyebab, Dampak, dan Upaya Mengatasi*, dalam <http://saveanakjalanan.blogspot.com>. Akses 10 Desember 2014
- Geldard, David, editor: Kathryn Geldard. (2012). *Konseling Remaja Intervensi Praktis Bagi Remaja Beresiko*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Gibson, Robert L., Marianne H. Mitchell. (2011). *Bimbingan dan Konseling*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Gufron, Nur, dan Rini Risnawati. (2010). *Teori-teori Psikologi*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media
- Itsnaeni, Mursyid. (2010). "Pemberdayaan Anak Jalanan Oleh Rumah Singgah Kawah di Kelurahan Klitren, Gondokusuman, Yogyakarta". *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, Yogyakarta
- Juwita. *Deskriptif Kualitatif*. dalam Juwita.blog.fisip.uns.ac.id. akses tanggal 16 April 2015
- Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 tentang pemenuhan hak-hak anak
- Mulder, Niels. (2004). *Individu, Masyarakat, dan Sejarah*, diterjemahkan dari *Individual, Society and History According to Indonesia School Texts*, oleh A. Widayamartaya, cet.5. Yogyakarta: Kanisius

- Nasution, Mariana D.N., Fuad Nashori. (2007). "Harga Diri Anak Jalanan". *Indigenous, Jurnal Ilmiah Berkala Psikologi*, vol. 9, No. 1
- Prameswari, Sorga Perucha Iful, Siti Aisah, Mifbakhuddin. (2013). "Hubungan Obesitas dengan Citra Diri Harga Diri Pada Remaja Putri di Kelurahan Jombang". *Jurnal Keperawatan Komunitas*. Vol. 1, No. 1
- Setiawan, D.S.. (2012). "Perbedaan Harga Diri Mahasiswa Bertato Dengan Mahasiswa Tidak Bertato Pada Mahasiswa Laki-laki Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga". *Skripsi*, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.
- Stronge, James H.. (2000). *The Educational of Homeless Children and Youth in The United State: A Progress Report*, dalam terj. Roslyn Arlin Mickelson (ed.), *Children on the Street of the Americas: Homelessness, Educational and Globalization in the United States, Brazil and Cuba*, New York: Routledge
- Suharto, Edi. (2007). *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik: Peran Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan (Welfare) di Indonesia*. Bandung: Alfabeta
- Suyanto, Bagong. (2013). *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group
- Syahrudin, Maulana, "Faktor-faktor yang Menyebabkan Munculnya Anaka Jalanan", dalam <http://maulodonk221027.blogspot.com/2012/06/fator-faktor-yang-menyebabkan.html>. Akses 10 Desember 2014.
- Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 9 ayat (1) tentang *Perlindungan Anak*
- Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*
- Widiyatun. (1999). *Ilmu Perilaku*. Jakarta: Infomedia
- Zed, Mestetika. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Index Penulis

A

Amalia Zuliyanti Siregar dan Husmiati 57

Asrizal 1

C

Chatarina Rusmiyati dan Akhmad Purnama 219

Chulaifah dan Sri Prastyowati 35

E

Elly Kuntjorowati 191

Eny Hikmawati dan Tri Gutomo 131

G

Gunanto Surjono 179, 357

I

Ikawati 101, 337

K

Kissumi Diyanayati dan Etty Padmiati 9

Kurnia Novianti, Henny Warsilah dan Ary Wahyono 203

M

Mahmuddin 25

N

Napsiah 329

O

Oman Sukmana 307

P

Pipin Armita 377

Pranowo dan A. Nururrochman Hidayatullah 317

R

Ratih Probosiwi 89

S

Setyo Sumarno 47, 245

Soetji Andari 77, 365

Sri Kuntari 265

Sri Yuni Murtiwiidayanti 145, 295
Suryani dan Enni Hardiati 65
Syamsuddin dan Gunadi Setyo Utomo 257

T

Tateki Yoga Tursilarini 165
Tomy Hendrawanto 349
Trilaksmi Udiati dan Sunit Agus Tri Cahyono 115
Triyono 235

W

Warto 281

Ucapan Terima Kasih

Dalam Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial (JPKS) Volume 15 Nomor 4 Desember 2016, *review* dan proses cetak artikel melibatkan empat mitra bestari, dewan redaktur mengucapkan terima kasih kepada mitra bestari yang namanya tersebut di bawah ini:

1. Prof. Dr. Phil. Janianton Damanik, M.Si. (Pembangunan Sosial, UGM)
2. Drs. Latiful Khuluq, M.A., B.SW., Ph. D. (Kesejahteraan Sosial, UIN Sunan Kalijaga)
3. Dr. Harmona Daulay, S.Sos., M.Si. (Sosiologi, USU)
4. Drs. Doddy Sumbogo Singgih, M.Si. (Sosial Kemasyarakatan, Unair)

Semoga kerjasama dengan mitra bestari tersebut dapat mengontrol kualitas sajian tulisan di JPKS, dapat lebih membawa manfaat bagi pembaca, masyarakat yang memiliki kepedulian dalam permasalahan sosial pada umumnya, dan masalah kesejahteraan sosial pada khususnya.

Dewan Redaktur JPKS